

PERENCANAAN WILAYAH

Editor:

**DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H.,
S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.**

Penulis:

**Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.
Ar. Fendy Faizal Gobel, ST., M.Sc, IAI.
Yohanes P. Erick A
Fahmy Rinanda Saputri, S.T., M.Eng.
Indriani Umar, ST., M.URP
Ardiyanto Maksimilianus Gai
Akhmad Andi Saputra, ST., MT.
Ir. Firdaus, ST., M.Si., M.T, IPM.
Irma Maria Dulame**



GET PRESS INDONESIA

PERENCANAAN WILAYAH

Penulis :

Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.
Ar. Fendy Faizal Gobel, ST., M.Sc, IAI.
Yohanes P. Erick A
Fahmy Rinanda Saputri, S.T., M.Eng.
Indriani Umar, ST., M.URP
Ardiyanto Maksimilianus Gai
Akhmad Andi Saputra, ST., MT.
Ir. Firdaus, ST., M.Si., M.T, IPM.
Irma Maria Dulame

ISBN :

Editor : Adinda M.A.

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
Dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Perencanaan Wilayah dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah Dan Klasifikasi Wilayah, Teori Pertumbuhan Wilayah dan Pemecahan Permasalahan Di Bidang Perencanaan Wilayah.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Oktober 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 RUANG LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KLASIFIKASI WILAYAH.....	1
1.1 Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah	1
1.2 Klasifikasi Wilayah	4
DAFTAR PUSTAKA	8
BAB 2 ANALISIS NASIONAL DAN ANALISIS WILAYAH	10
2.1 Pendahuluan	10
2.2 Analisis Daya Dukung Fisik Wilayah	11
2.2.1 Analisis Kemampuan Lahan.....	11
2.2.2 Analisis Kesesuaian Lahan	12
2.3 Analisis Kependudukan.....	13
2.4 Analisis Ekonomi Wilayah.....	14
2.5 Analisis Sarana dan Prasarana Wilayah.....	17
2.6 Analisis Struktur dan Pola Ruang.....	18
2.6.1 Analisis Struktur Tata Ruang.....	18
3.6.2 Analisis Pola Pemanfaatan Ruang	20
DAFTAR PUSTAKA	24
BAB 3 TEORI LOKASI DAN TEORI BEHAVIOUR.....	25
3.1 Teori Lokasi.....	25
3.1.1 Pengantar	25

3.1.2 The Isolated State (Thunen-1826)	26
3.1.3 Industrial Location and Market Area (Laundhardt-1882)	27
3.1.4 Principles of Economics (Marshall-1890).....	28
3.1.5 The Economic Law of Market (Fetter-1924)	28
3.1.6 The Theory of the Location of Industries (Weber-1929)	29
3.1.7 Central Place Theory/ CPT (Christaller-1933)	30
3.1.8 Theory of Tord Palander (Palander-1935)	31
3.1.9 The Sector Model (Hoyt-1939)	31
3.1.10 The Location of Economic Activity (Hoover-1948) ..	32
3.1.11 Theory of Sargent Florence (Florence-1948)	33
3.1.12 Theory of Profit Maximisation (Losch-1954)	33
3.1.13. The Growth Pole Theory (Perroux-1955).....	34
3.1.14 The Theory of Smith (Smith-1956).....	34
3.1.15 Location and the Space Economy Theory (Isard-1956)	35
3.1.16 Renner's Theory (Renner-1960).....	35
3.1.17 Bid-Rent Theory (Alonso-1960)	36
3.1.18 Allan Pred's Theory (Pred-1967)	36
3.1.19 Theodor Sabathil's Theory (Sabathil-1969)	36
3.1.20 Peter Tesch's Theory (Tesch-1980).....	37
3.1.21 Urban Economic Theory (Fujita-1989)	37
3.1.22 New Economic Geography Theory (Krugman-1991)	38
3.1.23 The Hoffmann Theory (Hoffmann-1991)	38
3.1.24 Thomas Goette Theory (Goette-1994)	38

3.2 Teori Behaviour	39
3.3 Kesimpulan.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB 4 PROYEKSI PENDUDUK BERDASARKAN MODEL KOHORT DAN MODEL MULTI-REGION	45
4.1 Proyeksi Penduduk	45
4.2 Model Proyeksi Penduduk.....	47
4.3 Model Kohort.....	49
4.3.1 Ciri-ciri Model Kohort	49
4.3.2 Tahapan Proyeksi Model Kohort	51
4.3.3 Studi Kasus Model Kohort	52
4.4 Model Multi-Region.....	54
4.4.1 Ciri-ciri Model Multi-Region	55
4.4.2 Tahapan Proyeksi Model Multi-Region	56
4.4.3 Persamaan Matematis dalam Model Multi-Region ..	57
DAFTAR PUSTAKA	59
BAB 5 TEORI PERTUMBUHAN WILAYAH.....	60
5.1 Pendahuluan	60
5.2 Teori Pertumbuhan Wilayah Ditinjau dari Aspek Sektoral.....	61
5.2.1 Teori Neo Klasik	61
5.2.2 Teori Neo Keynesian	63
5.2.3 Teori Pentahapan (<i>Staging Theory</i>).....	65
5.2.4 Teori Basis Ekonomi (<i>Economic Base Theory</i>)	70
5.2.5 Teori Dependensi (Teori Ketergantungan).....	72

5.3 Teori Pertumbuhan Wilayah Ditinjau dari Aspek Spasial	72
5.3.1 Teori Lokasi Terpusat (<i>Central Place Theory</i>).....	72
5.3.2 Teori Pusat Pertumbuhan (<i>Growth Pole Theory</i>) .	76
5.3.3 Teori Agropolitan.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
BAB 6 PROSEDUR DAN PROSES PERENCANAAN WILAYAH	81
6.1 Pengertian.....	81
6.1.1 Pemahaman prosedur perencanaan wilayah	81
6.1.2 Pemahaman proses perencanaan wilayah	82
6.1.3 Skala wilayah terhadap prosedur dan proses perencanaan wilayah.....	84
6.2 Kegunaan.....	85
6.3 Model Proses Perencanaan Wilayah.....	86
6.4 Langkah-langkah Perencanaan Wilayah.....	90
6.5 Peran Daerah dalam Proses Perencanaan Wilayah	94
6.6 Kendala dalam Proses Perencanaan Wilayah	96
DAFTAR PUSTAKA	99
BAB 7 PERMASALAHAN DI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH	101
7.1 Pendahuluan	101
7.2 Persoalan Pertanahan	103
7.3 Permasalahan Dalam Penggunaan Data.....	105
7.4 Ketidaksesuaian Program Pembangunan Dan Rencana Tata Ruang.....	106
7.5 Kelompok Permasalahan Yang Dihadapi Perencana Wilayah.....	111

7.5.1 Permasalahan Mikro	111
7.5.2 Permasalahan Makro	113
DAFTAR PUSTAKA	115
BAB 8 ANALISIS PERENCANAAN WILAYAH.....	116
8.1 Analisis Daya Dukung Fisik Wilayah	116
8.1.1 Analisis Kemampuan Lahan	116
8.2 Analisis Kependudukan.....	119
8.3 Analisis Ekonomi Wilayah.....	121
8.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	122
8.3.2 Pendapatan Regional.....	124
8.3.3 Analisis Ekonomi Basis.....	125
DAFTAR PUSTAKA	128
BAB 9 PEMECAHAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH.....	129
9.1 Pengertian.....	129
9.1.1 Why.....	130
9.1.2 Where	131
9.1.3 When	131
9.1.4 Who	132
9.2 Need For Urband & Regional Planning.....	133
9.3 Penyebaran Wilayah.....	133
9.4 Types of Regional planning - Assignment Point ...	135
9.5 Pemecahan Permasalahan di Bidang Perencanaan Wilayah.....	148
9.6 Perencanaan Daerah Mencairkan dan Akhirnya Mengalahkan Demokrasi.....	149

9.7 Undergraduate Program in Urban and Regional ..	152
DAFTAR PUSTAKA	157
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 The Land Management Paradigm	4
Gambar 1.2 Tipe Wilayah Pengembangan	6
Gambar 5.1 Tempat Sentral Berhierarki 3 (K=3)	74
Gambar 5.2 Tempat Sentral Berhierarki 4 (K=4)	74
Gambar 5.3 Tempat Sentral Berhierarki 7 (K=7)	75
Gambar 6.1 Visualisasi Prosedur	82
Gambar 6.2 Proses dalam Prosedur Perencanaan	83
Gambar 6.3 Visualisasi Proses	83
Gambar 6.4 Bagan Proses Perencanaan Klasik	87
Gambar 6.5 Sistem Menurut McLoughlin	87
Gambar 6.6 Proses Perencanaan Menurut Terry Moore ...	89
Gambar 6.7 Diagram Analisis Kebijakan Publik William Dunn	89
Gambar 6.8 Tahapan Perencanaan	90

DAFTAR TABEL

BAB 1

RUANG LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KLASIFIKASI WILAYAH

Oleh Lisa Astria Milasari

1.1 Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah

Perencanaan dapat menentukan suatu tujuan dalam memilih langkah-langkah strategi yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan pada bidang ekonomi yang tidak terpisahkan berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Lebih dari sekedar perencanaan wilayah sebagai alat teknis, dalam proses pengambilan keputusan secara integratif dan partisipatif dalam strategi pembangunan keberlanjutan.

Sebagai bentuk mengembangkan kerangka kebijakan perkotaan dan wilayah sebagai standar kehidupan layak masyarakat di masa mendatang. Tindak lanjutnya perencanaan wilayah akan menjadi sarana mengartikan bentuk kebijakan ke produk rencana dan tindakan perencanaan, serta memberikan umpan balik bagi pemangku kepentingan. Perencanaan wilayah menekankan pada perencanaan fisik, ekonomi, sosial pada strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa wilayah merupakan ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek

administratif dan/atau aspek fungsional. Perencanaan wilayah biasanya terkait dengan kehidupan masyarakat seperti kesempatan kerja, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan permasalahan ekonomi lainnya. Perencanaan wilayah memberikan sudut pandang berbeda dalam menjaga tingkat efisiensi penggunaan lahan terhadap peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi, seperti pada daerah perkotaan atau daerah yang akan berkembang.

Perencanaan wilayah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan berbagai cara, yakni pembangunan sosial dan inklusi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Perencanaan wilayah terutama bertujuan dalam mewujudkan standar layak bagi kehidupan dan kondisi kerja setiap elemen masyarakat saat ini dan masa mendatang.

Perencanaan wilayah merupakan katalis pertumbuhan ekonomi yang menyediakan peluang baru ekonomi, regulasi lahan dan penyediaan infrastruktur memadai secara tepat waktu. Lingkup perencanaan wilayah sebagai salah satu hasil perencanaan secara administratif didasarkan secara administratif pada kebijakan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan produk penataan ruang, yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, serta pengawasan produk penataan ruang. (LA Milasari, dkk, 2023)

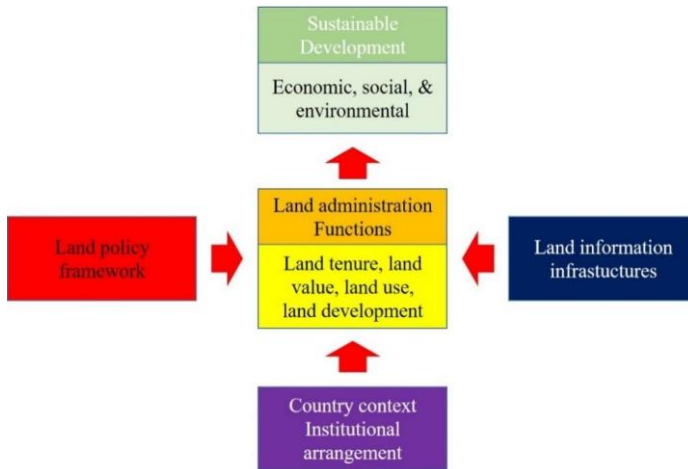
Terdapat elemen dasar perencanaan wilayah di Indonesia, yaitu merencanakan berarti telah memilih, sebagai alat mobilisasi sumber daya alam, perencanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, serta merencanakan masa depan. Menurut Tarigan, R (2009) mengatakan perencanaan wilayah di Indonesia memerlukan langkah-langkah terencana yang meliputi :

1. Deskripsi situasi saat ini dan pengidentifikasian masalah (baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang). Data (data primer dan sekunder) harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan saat ini;

2. Mendefinisikan visi, misi dan tujuan perencanaan;
3. Identifikasi hambatan dan keterbatasan yang ada atau yang diperkirakan di masa mendatang;
4. Perkiraan berbagai variabel penting dan terkait, baik yang dapat diketahui maupun yang berada di luar perencanaan;
5. Menetapkan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu;
6. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai cara untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang terbatas dan faktor produksi yang tersedia;
7. Memilih alternatif terbaik sebagai penentuan berbagai aktifitas pendukung dalam perencanaan;
8. Menentukan lokasi berbagai aktifitas perencanaan yang akan dilakukan;
9. Menyusun kebijakan dan strategi di tiap kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan wilayah mencakup tiga aspek di masyarakat, yaitu aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan aspek fisik. Dalam hal ini, setiap perencanaan wilayah di berbagai tingkatan daerah selalu terkait dengan ketiga aspek kehidupan tersebut. Ketiga dimensi ini sangat sulit untuk dipisahkan dalam skala besar, tetapi secara inheren saling terkait, dan dalam beberapa hal hubungan antara kegiatan dapat diamati sehubungan dengan penentuan prioritas.

Dalam perspektif pengelolaan lahan sebagaimana dikemukakan bahwa orientasi utama paradigma pengelolaan lahan adalah pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kerangka kebijakan pertanahan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berikut skema gambar 1 paradigma pengelolaan lahan dibawah ini.



Gambar 1.1 The Land Management Paradigm
(Sumber: Enemark dkk 2005)

1.2 Klasifikasi Wilayah

Klasifikasi perencanaan berdasarkan tingkat operasionalisasinya dalam bentuk perencanaan secara sektoral maupun bersifat lintas sektoral pada kawasan tertentu. Klasifikasi perencanaan menurut tingkatnya adalah sebagai berikut :

- Normative planning***, berupa perumusan kebijakan dengan memberikan pertimbangan dan alternatif mengenai pengambilan keputusan, baik secara ideal maupun yang tujuan yang ingin dicapai.
- Strategic planning***, lebih terkait pada program pembangunan yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran, dengan melalui kriteria-kriteria dan proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan
- Operational planning***, terkait pada implementasi proyek dengan tindakan-tindakan melibatkan pemangku kebijakan yang dilatarbelakangi oleh perubahan.

Aktivitas perencanaan wilayah memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan wilayah dan juga menjadi dasar awal

sebagai respon terhadap pertumbuhan wilayah. Melalui perencanaan diharapkan dapat mencapai tujuan dan penyelesaian solusi dari permasalahan perencanaan. Perencanaan wilayah merupakan proses penetapan yang digunakan pada kawasan tertentu tergantung pada tujuan yang diinginkan. Dalam menetapkan wilayah maupun kawasan harus memperkirakan berbagai masalah yang timbul dan mengetahui tujuan yang akan dicapai. Perencanaan wilayah sering dimasukkan dalam produk perencanaan tata ruang wilayah nasional dan rencana pengembangan wilayah regional.

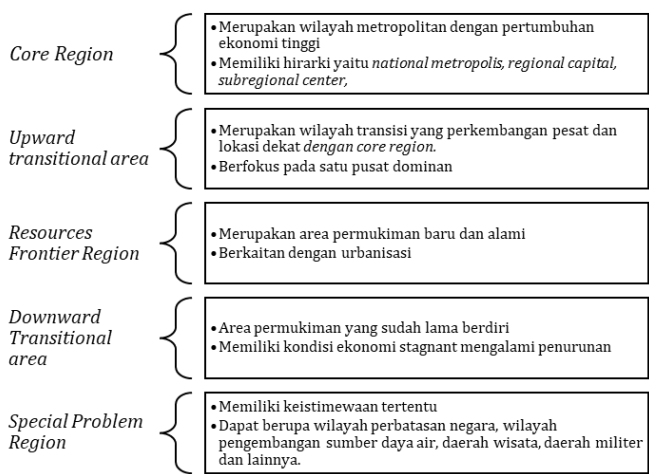
Lingkup perencanaan wilayah sebagai salah satu hasil perencanaan secara administratif didasarkan secara administratif pada kebijakan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan produk penataan ruang, yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, serta pengawasan produk penataan ruang. Perencanaan wilayah berbagai negara memiliki sudut pandang yang tidak sama pada kehidupan ekonomi dan permasalahan yang dihadapi. Di negara berkembang konsep perencanaan wilayah dikaitkan dengan hasil pembangunan wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan wilayah sebagai bentuk administratif berdasarkan pendekatan wilayah dengan batas-batas dan kebijakan otonomi daerah dengan kewenangan pemerintah mencakup tahapan awal perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, dan pengendalian wilayah atau tata ruang. (LA Milasari, dkk, 2023).

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses perencanaan yakni melalui sektor dan wilayah, sebagaimana keberhasilan dari pembangunan sangat ditentukan oleh pengelolaan daerah secara berkelanjutan baik dalam sosial, ekonomi, budaya maupun penguasaan teknologi oleh sumberdaya manusia. Disamping itu berkaitan dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007, pasal 14 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang terdiri dari rencana umum dan rencana terinci. Dengan bentuk produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu pada skala nasional, skala propinsi, maupun skala kabupaten atau kota.

Bentuk perencanaan Wilayah atau dengan istilah pengembangan wilayah (regional development planning) berupa potensi sumber daya yang tersedia, memiliki perkembangan wilayah berbeda dengan perkembangan lainnya baik secara ekonomi, demografi, maupun fisik. Justifikasinya karakteristik daerah yang berbeda, kesannya akan menimbulkan intervensi pembangunan yang berdampak dengan wilayah sekitarnya. Adapun tujuan dari perencanaan wilayah antara lain adalah :

1. Membentuk keharmonisan antara kelompok masyarakat, aktivitas dan keruangan
2. Menurunkan kemajemukan antar wilayah
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap daerah

Klasifikasi wilayah dalam perencanaan terbagi menjadi tiga wilayah yakni wilayah homogen, wilayah sistem atau fungsional dan wilayah perencanaan atau pengelolaan. Wilayah merupakan area atau kawasan yang berdasarkan permasalahan dan potensi dari suatu wilayah. Terdapat lima tipe yang diidentifikasi sebagai wilayah pengembangan, yakni :



Gambar 1. 2 Tipe Wilayah Pengembangan

Konsep yang memandang wilayah sebagai cara mengklrifikasi berkembang sesuai dengan perkembangan

ekonomi. Ketika sistem pertanian yang alami, wilayah dianggap sebagai wilayah homogenitas. Interaksi antara sub wilayah diidentifikasi pada hubungan fungsional. Penetapan wilayah pada delineasi wilayah akan menunjukkan wilayah secara subjektif sebagai kerangka penentuan klasifikasi pada wilayah perencanaan dan pengembangan (*planning region*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I.H., 2020. Covid-19 dalam perpektif perencanaan wilayah dan kota.
- Arba, H.M. and SH, M., 2022. *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- As, N., 2013. Struktur Tata Ruang Wilayah dan Kota.
- Azis, R., 2018. Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi. Deepublish.
- Baja, I.S., 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Penerbit Andi.
- Cahill, M., 2010. Ebook: Transport, environment and society. McGraw-Hill Education (UK).
- Fatimah, S., 2019. *Teori Perencanaan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Glasson, J., 1977. Pengantar Perencanaan Wilayah. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit LPFE-UI.
- Hajar, N.K.D.S., Amrizal, D., Izharsyah, J.R. and Mahardika, A., 2022. *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Hall, P. and Tewdwr-Jones, M., 2019. Urban and regional planning. Routledge.
- Hardiansah, E.C., 2015. Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisas. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 26(1), pp.1-6.
- Harun, U.R., 2010. *Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 10(1).
- Johara, J.T., 1992. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB.
- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, 2015. Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota Dan Wilayah.
- Kuncoro, M., 2018. Perencanaan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.

- Mahi, I.A.K., Trigunarso, S.I. and SKM, M.K., 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Matheus, I.R., 2022. *Analisis Potensi Wilayah Pedesaan: Pendekatan Efektif dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Andi.
- Milasari, LA., dkk. 2023. *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Makassar : CV Tohar Medika.
- Rustiadi, E., 2018. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pamungkas, A.G., 2022. *Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN*. STANDAR: Better Standard Better Living, 1(2), pp.17-21.
- Pramono, R.W.D., 2021. *Modul Teknik Analisis Dan Perencanaan Wilayah*. Deepublish.
- Prayitno, G., 2022. *Perencanaan Desa Terpadu (Vol. 1)*. UB Media.
- Sidabutar, Y.F. and Indera, E., 2021. Kajian Potensi Perencanaan Wilayah Kota Binjai Sumatera Utara. *Jurnal Potensi*, 1(1), pp.36-49.
- Sofiyah, U., Lestari, E.K. and Yunitasari, D., 2022. *Perencanaan Wilayah Perkotaan Melalui Konsep Smart City Di Kabupaten Jember*. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 17(1), pp.104-123.
- Sugiyanto, Gito, dkk. 2023. *Perencanaan Wilayah dan Perkotaan*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sutaryono, Riyadi R., Widiyantoro, Susilo, 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah : Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta : STPN Press.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wahid, A.Y. and SH, M.S., 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.

BAB 2

ANALISIS NASIONAL DAN ANALISIS WILAYAH

Oleh Fendy Faizal Gobel

2.1 Pendahuluan

Perencanaan wilayah adalah proses dalam mengatur penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam di suatu wilayah yang bersifat kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Perencanaan mencakup pada input, proses dan output dari suatu rancangan. Dengan ciri-ciri pokok yakni pemecahan persoalan-persoalan pada saat ini maupun di waktu yang akan datang (Lisa astria milasari, 2022). Analisis nasional dan analisis wilayah merupakan dua komponen penting dalam perencanaan wilayah. Analisis nasional adalah suatu kajian yang dilakukan untuk memahami kondisi dan potensi wilayah secara nasional. Perencanaan wilayah membutuhkan dasar yang kuat dan komprehensif dalam pemahaman tentang situasi dan kondisi nasional. Dalam perencanaan wilayah, pentingnya analisis nasional tidak dapat diabaikan dalam penentuan prioritas dan penyebaran sumber daya. Analisis nasional dapat mengarahkan investasi dan pembangunan infrastruktur yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan dengan memahami kebutuhan dan potensi secara nasional. Selain itu, analisis nasional juga dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi wilayah dalam konteks nasional. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, analisis nasional menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan rencana pembangunan

wilayah. Oleh karena itu, peran analisis nasional dalam perencanaan wilayah sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh perencana wilayah. Analisis nasional dan analisis wilayah memiliki perbedaan dalam perencanaan wilayah. Fokus utama analisis wilayah adalah mengidentifikasi potensi yang terdapat dalam wilayah tersebut, serta memperhatikan masalah-masalah yang muncul di dalamnya., sedangkan analisis nasional lebih fokus pada faktor perumusan strategi dan kebijakan yang tepat untuk pengembangan wilayah.

2.2 Analisis Daya Dukung Fisik Wilayah

Analisis daya dukung fisik wilayah dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memahami kemampuan sebuah wilayah untuk menampung penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi kemampuan lahan yang dapat mempengaruhi penggunaan lahan dan kegiatan manusia di suatu wilayah. Secara garis besar analisis daya dukung fisik wilayah akan dilakukan dua analisis besar, yaitu analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan.

2.2.1 Analisis Kemampuan Lahan

Lahan merupakan komponen penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia, karena berperan sebagai lokasi di mana manusia melakukan berbagai aktivitasnya. Fungsi pertama dari penggunaan lahan adalah sebagai tempat tinggal atau pemukiman manusia (Yunanda and Ernamaityanti, 2020). Pada dasarnya, analisis kemampuan lahan ditujukan untuk mengevaluasi potensi pengembangan lahan sebagai perkotaan dan memberikan pedoman dalam rekomendasi arahan penggunaan lahan. Melalui analisis kemampuan lahan, dapat mengevaluasi kemampuan suatu lahan dalam mendukung berbagai fungsi penggunaan lahan, seperti fungsi pertanian, fungsi pemukiman, fungsi industri, atau fungsi hutan lindung. Dalam melakukan analisis kemampuan lahan, terdapat beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan, antara lain:

1. Faktor fisik, seperti topografi, kelerengan, jenis tanah, kedalaman tanah, tekstur tanah dan potensi bencana alam.

2. Faktor kimia, seperti pH tanah, kandungan bahan organik, kandungan hara, dan kandungan unsur hara makro dan mikro.
3. Faktor biologi, seperti jenis tanaman yang cocok tumbuh di lahan tersebut, keberadaan mikro organisme, keberadaan hama/penyakit tanaman dan iklim.

Analisis topografi menjadi faktor penting dalam menentukan aksesibilitas lahan serta kerentanan terhadap fenomena bencana alam seperti banjir dan longsor. Analisis potensi bencana alam membantu dalam mengidentifikasi risiko banjir, longsor, atau gempa bumi yang mungkin mempengaruhi kemampuan lahan. Analisis iklim melibatkan pemahaman tentang pola cuaca, suhu, dan curah hujan yang relevan dalam menentukan varietas tanaman yang tepat untuk ditanam di suatu lahan. Analisis kesuburan tanah memperhatikan parameter fisik, kimia, dan biologi tanah untuk menentukan potensi pertumbuhan tanaman yang optimal.

2.2.2 Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan adalah suatu metode yang mengevaluasi apakah suatu lahan cocok atau tidak untuk digunakan sesuai dengan fungsi tertentu, seperti pertanian, peternakan, atau permukiman. Analisis ini melibatkan pengumpulan data tentang kondisi lahan, seperti topografi, jenis tanah, iklim, ataupun penggunaan lahan sebelumnya. Selain itu, analisis kesesuaian lahan juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, seperti aksesibilitas, kebutuhan masyarakat, dan potensi pasar. Analisis kesesuaian lahan adalah proses evaluasi untuk menentukan apakah suatu lahan cocok untuk digunakan dalam kegiatan tertentu berdasarkan karakteristik fisiknya. Dengan menggunakan hasil analisis ini, kita dapat mengetahui jenis kegiatan apa yang tepat untuk dikembangkan di daerah tersebut.

Ada dua jenis analisis yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan yaitu kesesuaian lahan fisik dan kesesuaian lahan non-fisik (Setiaji, Nugraha and Firdaus, 2018). Analisis kesesuaian lahan fisik lebih berfokus pada karakteristik fisik

lahan, seperti topografi, jenis tanah, ketersediaan air, dan rawan bencana. Sedangkan analisis kesesuaian lahan non-fisik lebih berfokus pada faktor sosial dan ekonomi, seperti aksesibilitas, pasar, dan kebijakan pemerintah. Beberapa metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan antara lain metode teknik perencanaan, analisis spasial, scoring, dan sistem informasi geografis. Metode teknik perencanaan terdiri dari analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Analisis spasial digunakan untuk menghasilkan luasan wilayah kesesuaian. Metode skoring digunakan dalam analisis kesesuaian lahan untuk lokasi pengembangan permukiman. Sistem informasi geografis (GIS) juga sering digunakan dalam analisis kesesuaian lahan untuk berbagai tujuan, seperti penentuan lahan pertanian, peternakan, atau permukiman. Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan jenis penggunaan lahan yang akan dievaluasi.

2.3 Analisis Kependudukan

Analisis kependudukan adalah suatu proses pengumpulan, pemrosesan dan interpretasi data yang terkait dengan populasi suatu daerah (Bidarti, 2020). Proses analisis ini dilakukan dengan penyajian data demografi seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan lain-lain yang memberikan gambaran tentang jumlah, struktur, dan karakteristik penduduk. Langkah pertama dalam analisis kependudukan adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sensus penduduk, survei kelahiran, kematian, pernikahan, dan data administratif. Langkah penting dalam analisis kependudukan adalah pengumpulan data yang menyeluruh dan akurat, data yang berkualitas berpengaruh terhadap validitas dan keandalan hasil analisis. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan memproses data. Pemrosesan data meliputi penyusunan, pemecahan kode, dan mengubah data menjadi format yang dapat dianalisis. Dalam tahap ini, dilakukan validasi data untuk menghilangkan data yang tidak valid atau tidak lengkap. Data dari berbagai sumber juga digabungkan agar dapat

memberikan gambaran yang komprehensif tentang populasi yang dianalisis.

Setelah data diproses, deskripsi dan karakterisasi populasi dilakukan. Pada titik ini, karakteristik didasarkan pada berbagai faktor, seperti jenis kelamin, umur, suku/etnis, pekerjaan, dan tingkatan pendidikan. Selanjutnya, analisis kependudukan melibatkan identifikasi dan analisis pertumbuhan populasi. Pertumbuhan ini mencakup perubahan dalam jumlah penduduk, demografi umur, angka kelahiran, tingkat kematian, dan perpindahan penduduk. Dengan menganalisis pertumbuhan ini, kita dapat mengidentifikasi pola dan perubahan signifikan yang terjadi dalam populasi. Misalnya, peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran dapat menghasilkan pergeseran dalam struktur usia penduduk yang berdampak pada kebijakan pensiun, layanan kesehatan, dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, terdapat juga teknik proyeksi berdasarkan komponen perubahan, yang digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang berdasarkan data pertumbuhan penduduk pada masa lalu. Proyeksi penduduk melibatkan estimasi jumlah penduduk di waktu yang akan datang berdasarkan prediksi tren pertumbuhan. Melalui metode statistik dan demografi, kita dapat memproyeksikan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk di masa depan. Proyeksi populasi ini membantu dalam perencanaan jangka panjang, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

2.4 Analisis Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan berbagai langkah, seperti mendirikan lembaga baru, mengembangkan sektor industri yang berbeda, meningkatkan kemampuan kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih unggul, menemukan peluang pasar baru, serta mendorong penyebaran pengetahuan dan pertumbuhan perusahaan yang baru. (Muljarijadi, 2017). Pembangunan ekonomi bertujuan utama untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk

setempat dengan meningkatkan jumlah dan variasi pekerjaan yang tersedia.

Pembangunan ekonomi, menurut beberapa ekonom, memiliki definisi yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi diartikan sebagai:

- a. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yang berarti tingkat pertumbuhan PDRB/GNP pada tingkat tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk.
- b. Perkembangan PDRB/GNP yang terjadi dalam suatu wilayah/negara diikuti oleh restrukturisasi dan modernisasi struktur ekonominya

Proses perencanaan pembangunan daerah dipengaruhi oleh dua faktor berikut:

- a. Dalam proses pembangunan terdapat tekanan yang datang dari lingkungan domestik dan internasional yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi daerah.
- b. Perekonomian suatu daerah dalam sebuah negara dipengaruhi oleh setiap sektor dengan cara yang berbeda.

Dalam teori ekonomi klasik, terdapat dua prinsip utama yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal, yaitu mencapai keseimbangan (equilibrium) dan memperhatikan mobilitas faktor produksi di daerah tersebut (Djadjuli, 2018). Dalam konteks perekonomian, keseimbangan alamiah akan tercapai ketika modal dapat mengalir bebas tanpa adanya pembatasan. Dengan demikian, modal akan berpindah dari daerah dengan upah tinggi ke daerah dengan upah rendah. Keterkaitan ekonomi secara umum mencerminkan hubungan antara perekonomian suatu wilayah dengan lingkungannya. Metode analisis shift share menjadi alat yang sangat berguna untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi di suatu daerah dalam perbandingan dengan perekonomian nasional.

Analisis ini menyediakan informasi mengenai kinerja ekonomi dalam tiga sektor yang saling terkait, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menganalisis perubahan agregat pengerjaan secara

sektoral dibandingkan dengan perubahan sektor yang sama dalam perekonomian acuan.

- b. Pengukuran pergeseran proposional digunakan untuk menentukan perubahan relatif dalam pertumbuhan atau penurunan ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar sebagai acuan. Dengan pengukuran ini, kita dapat mengetahui apakah ekonomi daerah terfokus pada sektor industri yang berkembang lebih cepat daripada perekonomian acuan.
- c. Pergeseran diferensial membantu kita dalam menilai sejauh mana daya saing industri lokal dalam suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial suatu industri positif, itu berarti industri tersebut memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi daripada industri yang sama dalam perekonomian acuan.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Hasibuan *et al.*, 2022). Salah satu cara penting untuk memahami kondisi ekonomi dalam suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu adalah dengan melihat data PDRB, baik dalam bentuk harga berlaku maupun harga konstan. PDRB dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di wilayah tersebut, atau sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut. PDRB berdasarkan harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Di sisi lain, PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai acuan. PDRB berdasarkan harga berlaku digunakan untuk melihat perubahan dan struktur ekonomi, sementara harga konstan digunakan untuk memahami pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Konsep dasar teori ekonomi mengelompokkan semua kegiatan ekonomi menjadi dua sektor, yakni sektor basis dan sektor non basis (Hutapea *et al.*, 2020). Wilayah dibagi berdasarkan konsep-konsep perwilayahan, yakni homogenitas,

nodalitas, dan administrasi. Tujuan dari deliniasi wilayah ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan basis dan non basis. Kegiatan basis merujuk pada kegiatan masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk diekspor ke luar lingkungan masyarakat maupun berorientasi pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Efisiensi teknis dan ekonomis merupakan faktor penting dalam pertumbuhan basis wilayah tersebut. Di sisi lain, kegiatan non basis merujuk pada kegiatan masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat dalam kawasan kehidupan ekonomi mereka sendiri. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan, dan kualitas hidup menjadi faktor penentu dalam kegiatan non basis ini. Teknik LQ sering digunakan dalam analisis kondisi perekonomian untuk mengidentifikasi spesialisasi dalam kegiatan ekonomi atau mengukur tingkat konsentrasi relatif kegiatan ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan sektor yang menjadi pemimpin (leading sector) dalam suatu kegiatan ekonomi atau industri (R. Jumiyan, 2018).

2.5 Analisis Sarana dan Prasarana Wilayah

Analisis sarana dan prasarana wilayah adalah suatu proses yang sering ditekankan dalam perencanaan wilayah. Analisis ini menilai secara menyeluruh terhadap infrastruktur dan fasilitas yang ada di wilayah tersebut, yang bertujuan untuk memahami kondisi eksisting, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dan merumuskan strategi pengembangan yang efektif. Sarana prasarana infrastruktur yang ada pada suatu wilayah adalah dasar atau kerangka yang dijadikan sebagai acuan bagi permukiman yang memberikan manfaat sebagai komponen pelayanan masyarakat dengan memiliki fungsi dalam mendukung segala kegiatan yang ada dalam lingkungan permukiman melalui fasilitas-fasilitas yang telah ada (Fendy Faizal Gobel, 2022).

Langkah awal dalam menganalisis sarana dan prasarana wilayah adalah menghimpun informasi tentang keadaan infrastruktur yang sudah ada. Data tersebut meliputi informasi tentang jaringan transportasi, energi, air, sanitasi, telekomunikasi,

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Data informasi tersebut didapatkan melalui survey lapangan ataupun dari RTRW dan RDTR. Selanjutnya, melakukan evaluasi kondisi infrastruktur dengan meninjau menyeluruh terhadap kondisi fisik dan sistem dari setiap sarana dan prasarana yang ada. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan, kekurangan, atau masalah yang kemungkinan akan timbul. Misalnya, terdapat jalan rusak, jaringan listrik yang tidak stabil, kekurangan pasokan air bersih, atau kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai.

Setelah mengevaluasi kondisi infrastruktur, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di wilayah tersebut. Analisis harus mempertimbangkan kebutuhan penduduk dan kepentingan pemerintah daerah di wilayah tersebut. Pertumbuhan populasi, kebutuhan ekonomi, serta kebutuhan sosial dan layanan dasar menjadi faktor penting dalam menentukan kebutuhan infrastruktur prioritas. Dalam melakukan analisis sarana dan prasarana wilayah, penting juga untuk memperhatikan dampak yang mungkin terjadi dari pengembangan infrastruktur yang diprioritaskan. Penilaian dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi harus dilakukan untuk memahami konsekuensi dari proyek infrastruktur tersebut. Contohnya, pembangunan jalan baru dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada lingkungan alam sekitarnya.

Setelah melakukan analisis dan penilaian, tahap berikutnya adalah merencanakan pengembangan infrastruktur. Rencana ini mencakup proyek prioritas, sumber dana serta sumber daya yang diperlukan. Rencana tersebut harus mempertimbangkan aspek keuangan, teknis, dan administratif yang terlibat dalam pelaksanaan proyek prioritas tersebut.

2.6 Analisis Struktur dan Pola Ruang

2.6.1 Analisis Struktur Tata Ruang

Infrastruktur berperan sebagai fasilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan membentuk tata ruang wilayah, yang wajib dapat memberikan layanan secara efisien, aman, dan

nyaman. Melakukan analisis terhadap tata ruang melibatkan pengamatan dan penilaian terhadap susunan fisik dan pengaturan ruang di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Komponen dari struktur tata ruang meliputi bangunan, jalan, taman, serta zona fungsional yang ada di daerah tersebut. Pentingnya struktur tata ruang dalam sebuah kota atau pemukiman adalah karena dapat berdampak pada efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan keindahan area tersebut. Infrastruktur juga harus mampu memfasilitasi peningkatan produktivitas masyarakat dengan tujuan membuat produk-produk yang dikembangkan menjadi lebih kompetitif secara ekonomi. Salah satu elemen penting dalam analisis struktur tata ruang adalah tata massa bangunan. Pengaturan tata massa bangunan memiliki dampak signifikan terhadap kemudahan akses, konektivitas, dan integrasi berbagai zona fungsional di suatu area. Sebagai contoh, jika bangunan komersial mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, maka akan meningkatkan aksesibilitas layanan dan memfasilitasi aktivitas perdagangan. Selain itu, pengaturan struktur yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada dan mengurangi konflik dalam penggunaan lahan.

Secara umum, pengembangan infrastruktur sumber daya air bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan dan menyediakan air untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti air minum, pembangkit tenaga listrik, dan pengendalian banjir. Diharapkan bahwa upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, dan PSU permukiman merupakan aset penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Selain itu, infrastruktur memainkan peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global, terutama dalam menyediakan jaringan distribusi, sumber energi, dan elemen produksi lainnya. Sebagai contoh, jaringan jalan adalah fasilitas yang menghubungkan sumber produksi, pasar, dan konsumen, dan juga merupakan bagian dari ruang publik yang digunakan untuk interaksi sosial antara kelompok masyarakat, memfasilitasi ekspresi diri, dan membangun ikatan sosial dan

budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan jalan juga berfungsi sebagai linkage dan penyatuan wilayah.

Analisis struktur tata ruang dilakukan dengan tujuan untuk mengenali pola, keterhubungan, dan ciri-ciri yang memengaruhi penggunaan dan hubungan antara elemen-elemen yang berbeda dalam suatu ruang. Langkah awal dalam analisis struktur tata ruang, dilakukan pengidentifikasian dan penilaian terhadap komponen fisik yang membentuk suatu wilayah. Proses ini mencakup pemetaan dan penilaian elemen-elemen fisik seperti bangunan, jalan, ruang terbuka hijau, atau ruang terbuka biru. Penilaian elemen-elemen fisik ini mencakup berbagai aspek seperti ukuran, bentuk, lokasi, dan orientasi dari masing-masing elemen tersebut. Selanjutnya, analisis struktur tata ruang memperhatikan hubungan spasial antara elemen-elemen yang ada. Dalam hal ini, dilakukan pengamatan terhadap bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan terhubung satu sama lain dalam ruang. Contohnya, dapat meliputi hubungan antara bangunan dan jalan, koneksi antara ruang terbuka hijau dan area permukiman, atau pola pergerakan yang terbentuk antara berbagai elemen tersebut. Selain pemetaan dan penilaian, analisis terhadap struktur tata ruang juga melibatkan pengevaluasian terhadap keefektifan dan efisiensi dari tata ruang yang telah ada. Proses ini mencakup penilaian terhadap kebutuhan dan kesesuaian ruang untuk berbagai kegiatan manusia, keterjangkauan sarana transportasi, konektivitas antar wilayah, serta dampak lingkungan yang timbul akibat dari struktur tata ruang tersebut.

3.6.2 Analisis Pola Pemanfaatan Ruang

Pola pemanfaatan ruang merujuk pada strategi suatu wilayah yang lahannya digunakan untuk berbagai kegiatan manusia. Pola pemanfaatan ruang berdasarkan pada faktor-faktor pembentuknya seperti tujuan penggunaan, kondisi geografis, kebutuhan populasi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan sosial-ekonomi. Pola pemanfaatan ruang mencakup distribusi, penggunaan, dan organisasi berbagai jenis aktivitas, baik dalam konteks perkotaan maupun pedesaan.

Dalam konteks perkotaan, pola pemanfaatan ruang dapat mencakup tujuan penggunaan lahan untuk pemukiman, perdagangan, industri, transportasi, dan fasilitas umum seperti taman dan tempat ibadah. Sedangkan dalam konteks pedesaan, tujuan pola pemanfaatan ruang dapat mencakup penggunaan lahan untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Faktor topografi, iklim, dan jenis tanah dapat mempengaruhi pola pemanfaatan ruang.

Berikut adalah beberapa pola pemanfaatan ruang umum: Fungsi Pemukiman dimana ruang suatu wilayah difungsikan sebagai tempat tinggal masyarakat (Gobel, 2019). Fungsi hunian dapat mencakup pemukiman perkotaan, permukiman pedesaan, atau campuran dari keduanya. Fungsi Komersial dimana ruang digunakan untuk kegiatan komersial, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, toko, dan restoran. Kecenderungan wilayah fungsi komersial ini biasanya terletak di sekitaran pusat kota atau daerah yang memiliki aksesibilitas yang baik. Selanjutnya fungsi industri dimana ruang digunakan untuk kegiatan industri dan proses manufaktur. Fungsi ini dapat terbagi pada zona pabrik, gudang, fasilitas produksi, dan area logistik. Untuk menghindari dampak negatif terhadap fungsi permukiman, maka zona industri biasanya ditempatkan di luar pusat kota. Fungsi rekreasi, dimana ruang digunakan untuk kegiatan rekreasi dan hiburan, seperti taman, taman bermain, lapangan olahraga, dan tempat wisata. Area rekreasi diposisikan pada lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi pendidikan dan kesehatan dimana ruang digunakan untuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Fungsi pertanian dimana ruang digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, perkebunan, dan hutan. Pola ini lebih umum tersebar di daerah pedesaan. Fungsi kawasan lindung, ruang digunakan untuk konservasi dan pelestarian alam, seperti taman nasional, kawasan perlindungan alam, dan hutan lindung. Tujuan utamanya adalah melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Untuk menganalisis pola pemanfaatan ruang, dapat digunakan beberapa metode dan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode pemetaan dan analisis spasial. Langkah awal adalah membuat peta dasar menggunakan perangkat lunak khusus pemetaan yang menunjukkan batas wilayah, jaringan jalan, sungai, dan elemen penting lainnya untuk memberikan konteks spasial. Setelah itu melakukan digitalisasi dengan menggunakan gambar poligon untuk kategorisasi penggunaan lahan misalnya permukiman, industri, perdagangan dan jasa, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan analisis spasial, yang pertama adalah analisis distribusi, yaitu mengidentifikasi pola spasial penggunaan lahan dengan melihat pola yang tersebar di wilayah tersebut. Kedua adalah analisis proximity, yaitu mengevaluasi jarak antara berbagai jenis penggunaan lahan. Ketiga adalah analisis overlay, yaitu menganalisis terjadinya interaksi atau konflik yang terjadi antara berbagai jenis penggunaan lahan, contohnya melihat tumpang tindih antara fungsi permukiman dan fungsi industri. Keempat adalah analisis perubahan, dimana proses melihat perubahan dalam pemanfaatan ruang dengan membandingkan peta penggunaan lahan dari periode waktu tertentu.
2. Metode data statistik. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data pemanfaatan ruang, seperti distribusi, frekuensi, dan ukuran pemusatan data. Berbagai jenis data yang dapat dipakai pada analisis statistik adalah data spasial, data survey, data statistik deskriptif dan data arsip. Untuk mengumpulkan data untuk analisis statistik dilakukan secara survey secara langsung, survey data sekunder, data geospasial, dan pengolahan data dari RTRW dan RDTR.
3. Pendekatan dengan analisis perencanaan wilayah. Analisis perencanaan wilayah menyediakan strategi perencanaan dan rekomendasi yang tujuannya untuk mengatur pemanfaatan lahan, memenuhi kebutuhan pengembangan wilayah, dan menyediakan kebutuhan berdasarkan permintaan masyarakat. Rekomendasi ini dapat meliputi rekomendasi penggunaan lahan, rencana infrastruktur, strategi pengelolaan lingkungan, program sosial, atau strategi

kebijakan ekonomi. Analisis perencanaan wilayah juga menyertakan proyeksi untuk memperkirakan perubahan masa depan dalam wilayah tersebut, seperti pertumbuhan populasi, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan hunian, kebutuhan sarana publik, dan lain-lain. Proyeksi ini membantu dalam merencanakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan adaptif.

4. Pendekatan dengan analisis dampak lingkungan. Menyusun analisis dampak lingkungan dilakukan untuk mengevaluasi efek dari pola pemanfaatan ruang terhadap perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Analisis dampak lingkungan dimulai dari mengidentifikasi dampak potensial yang mungkin terjadi akibat pola pemanfaatan ruang, dampak potensial yang tidak boleh diabaikan mencakup dampak terhadap habitat alami, keanekaragaman hayati, kualitas air dan tanah, polusi udara, perubahan iklim, serta dampak sosial dan budaya. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi melalui survei lapangan, pemantauan lingkungan, serta data sekunder dari dokumen RTRW dan RDTR. Selanjutnya melakukan analisis, analisis ini melibatkan penilaian kuantitatif dan kualitatif dari dampak-dampak yang teridentifikasi sebelumnya, hasil analisis diterapkan untuk mengkaji tingkat signifikansi dampak, mengidentifikasi dampak paling krusial, dan merumuskan tindakan mitigasi yang sesuai untuk mereduksi dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidarti, A. (2020) Teori kependudukan. Lindan Bestari.
- Djadjuli, R.D. (2018) 'Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol5(2), p. hal. 10.
- Fendy Faizal gobel, R.D.M. (2022) Studio Tata Bangunan Dan Kawasan Implementasi Pada Nelayan Rancangan Permukiman Nelayan. Cv Muhammad Fahmi Al Azizy.
- Gobel, F. (2019) 'Konsep Penataan Kawasan Permukiman Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato', Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering, 2(2), p. 31.
- Hasibuan, R.R.A. et al. (2022) 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan', Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(3), pp. 683–693.
- Hutapea, A. et al. (2020) 'Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan', Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(03), pp. 1–11.
- Lisa astria milasari, D. (2022) Pengantar Perencanaan Wilayah Dan Kota. Tohar Media.
- Muljarijadi, B. (2017) Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output. Unpad Press.
- R. Jumiyaniti, K. (2018) 'Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo', Gorontalo Development Review, 1(1), p. 29.
- Setiaji, K., Nugraha, A.L. and Firdaus, H.S. (2018) 'Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Terhadap Produktivitas Budidaya Udang Menggunakan SIG (Studi Kasus : Kabupaten Kendal)', Jurnal Geodesi, 2(Sistem Informasi Geografis), pp. 128–137.
- Yunanda, M. and Ernamaiyanti, E. (2020) 'Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Pengembangan Perumahan Dan Pemukiman provinsi Banten', Jurnal Teknik Sipil, 9(1), pp. 25–31.

BAB 3

TEORI LOKASI DAN TEORI BEHAVIOUR

Oleh Yohanes P. Erick A.

3.1 Teori Lokasi

3.1.1 Pengantar

Ruang (spasial) pada akhirnya akan mempengaruhi cara kerja sistem perekonomian, hal tersebut dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi apabila dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Selain itu juga dapat menghasilkan keuntungan geografis, seperti aksesibilitas yang mudah dari suatu daerah, dan persediaan bahan baku yang tinggi. Ruang (spasial) juga merupakan sumber keuntungan yang muncul dari sifat kumulatif dari proses produktif di ruang: khususnya, kedekatan spasial menghasilkan ekonomi yang mengurangi biaya produksi (misalnya biaya transportasi dari aktivitas yang beroperasi) dan, dalam istilah yang lebih modern, biaya transaksi (misalnya biaya transaksi pasar karena pengumpulan informasi).

Pertimbangan ini menyoroti kebutuhan untuk menggantikan pendekatan alokatif murni yang tipikal dari interpretasi statis fenomena ekonomi dengan pendekatan dinamis, bahkan evolusioner, yang mengikat keputusan alokatif dengan proses pembangunan. Distribusi geografis sumber daya dan potensi pembangunan hanya ditentukan secara minimal oleh faktor eksogen (bahan baku dan keunggulan alam). Untuk tingkat yang jauh lebih besar, itu dihasilkan dari faktor sejarah masa lalu dan baru-baru ini: modal manusia, modal tetap sosial, kesuburan tanah (karena pekerjaan manusia), dan aksesibilitas (diukur

sebagai jarak tertimbang dari pusat-pusat produksi utama dan konsumsi).

Ekonomi regional adalah cabang ekonomi yang menggabungkan ruang (spasial) dimensi ke dalam analisis cara kerja pasar. Dilakukan dengan memasukkan ruang dalam skema logis, hukum dan model yang mengatur dan menafsirkan pembentukan harga, permintaan, kapasitas produksi, tingkat *output* dan pembangunan, tingkat pertumbuhan, dan distribusi pendapatan dalam kondisi kekayaan daerah yang tidak merata. Dua kelompok besar teori membentuk ekonomi regional:

- a. Teori lokasi, cabang ekonomi regional tertua, pertama kali dikembangkan pada awal 1900-an, yang berkaitan dengan mekanisme ekonomi yang mendistribusikan aktivitas di ruang hampa;
- b. Teori pertumbuhan (dan pembangunan) regional, yang berfokus pada aspek spasial dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan teritorial.

Teori lokasi memberi ekonomi regional identitas ilmiah-disiplinnya dan merupakan inti teoretis-metodologisnya. Ini biasanya memiliki fondasi mikroekonomi dan mengadopsi pendekatan statis tradisional. Dalam istilah ekonomi mikro, teori lokasi melibatkan penyelidikan terhadap pilihan lokasi; tetapi juga melibatkan analisis perbedaan dalam distribusi spasial kegiatan penyelidikan yang memungkinkan interpretasi ketidakseimbangan dan hierarki teritorial. Teori lokasi menggunakan konsep eksternalitas dan ekonomi aglomerasi untuk menjelaskan fenomena teritorial makro seperti perbedaan dalam distribusi spasial kegiatan, sehingga meletakkan basis teritorial untuk pendekatan dinamis.

3.1.2 The Isolated State (Thunen-1826)

Teori lokasi berakar pada abad XIX, ketika Johann Heinrich von Thunen, seorang pemilik tanah Prusia yang menawarkan teori awal lokasi aktivitas pertanian pada tahun 1826 di *Der Isolierte Staat*. Model teori Thunen menunjukkan bahwa aksesibilitas ke pasar (kota) dapat menciptakan sistem penggunaan lahan pertanian yang lengkap. Thunen berhipotesis

bahwa variasi penggunaan lahan ada karena perbedaan biaya transportasi, namun petani biasanya tidak menanam produknya di lokasi pasar, itu yang harus dipindahkan atau diangkut ke sana. Perbedaan ini berarti biaya transportasi akan berpengaruh pada sewa lokasi, model pertanian dimana menggambarkan aktivitas pertanian secara spasial dalam kaitannya dengan sewa. Kegiatan yang membutuhkan penanaman intensif dan tidak dapat diangkut dalam jarak jauh akan membayar sewa yang lebih tinggi agar dekat dengan pasar.

3.1.3 Industrial Location and Market Area (Launhardt-1882)

Minat pada teori lokasi bangkit kembali lebih dari 50 tahun kemudian, terutama berkat karya Carl Friedrich Wilhelm Launhardt di tahun 1882. Launhardt menyajikan perlakuan signifikan pertama dari teori lokasi industri dan perawatan sistematis paling awal dari pembagian area pasar di antara perusahaan yang bersaing meskipun Thunen sebelumnya telah membahas lokasi industri, memvariasikan keadaan lebih dari yang dilakukan Launhardt, teori lokasi Launhardt masih mengandung benih gagasan yang kemudian dikembangkan oleh Alfred Weber, Tord Palander, dan ahli teori yang lebih baru. Misalnya, dia membuat sketsa prinsip tiang: konstruksi geometris untuk menemukan titik ekuilibrium lokasi. Seluruh arus analisis lokasi industri, hadir dalam ekonomi dan penelitian operasional, mengacu pada Weber, di sisi lain telah terjadi generalisasi metode tata letak jalan yang disajikan pada tahun 1872. Pada tataran metodologis, telah dipertahankan dan menggunakan metode hipotetis-deduktif. Mengenai isinya, mengedepankan keinginan memahami pembentukan konsentrasi kegiatan dan manusia, yang membawanya ke analisis menarik tentang aglomerasi ekonomi. Ada seluruh cabang analisis lokasi industri di bidang ekonomi dan penelitian operasional yang merujuk kembali ke Weber. Pengaruh teori Weber tetap ada, karena kontribusinya melibatkan lebih dari sekadar presentasi model yang sederhana. Adapun isinya, ia mencoba memahami pembentukan konsentrasi

kegiatan ekonomi dan populasi, yang mengarah pada analisis ekonomi aglomerasi yang menarik.

3.1.4 Principles of Economics (Marshall-1890)

Alfred Marshall (1842-1924) adalah salah satu nama besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi kontemporer, dan buku yang paling banyak dikenalnya *Principles of Economics* adalah salah satu poin penting dalam literatur ilmu sosial. Pengaruhnya sangat besar sedemikian rupa sehingga 25 tahun pertama ekonomi abad ke-20 dapat digambarkan sebagai Zaman Marshall dan perkembangan selanjutnya sebagai perpanjangan dan gerakan kontra terhadap pengaruhnya. Alfred Marshall lahir di Clapham pada tahun 1842 di kota London. Teori nilai Marshall menyatakan bahwa kekuatan dalam penawaran dan permintaan dapat menentukan nilai. Dengan demikian, teori tersebut menggabungkan utilitas marjinal dengan biaya subjektif aktual. Menurut Marshall, permintaan memperoleh utilitas marjinal sementara penawaran memperoleh biaya sebenarnya dari barang dan jasa. Terkait dengan teori lokasi, Marshall (1920) menyatakan bahwa lokasi yang padat dengan aktivitas serupa menghasilkan ekonomi aglomerasi yang berharga bagi perusahaan, yaitu akses yang lebih baik ke tenaga kerja terampil (pengumpulan pasar tenaga kerja), pemasok khusus (input bersama), dan limpahan pengetahuan dari perusahaan pesaing. Dalam bukunya *Principles of Economics*, yang diterbitkan pada tahun 1890, Marshall pertama kali mencirikan klaster sebagai konsentrasi industri khusus di tempat tertentu yang disebutnya distrik industri. Teori tersebut menyatakan bahwa memusatkan industri di wilayah tertentu menciptakan beberapa keuntungan.

3.1.5 The Economic Law of Market (Fetter-1924)

The Economic Law of Market, yang disebut oleh Frank A. Fetter tahun 1924 tersebut, berkaitan dengan pembagian wilayah antara dua pusat yang bersaing. Dikatakan bahwa aturan ini dapat dengan mudah diperiksa dalam enam kasus, yang masing-masing ditentukan oleh kombinasi perbedaan tarif angkutan dan harga di dua pusat. Fetter berpendapat bahwa semua produksi

dapat dijual di pasar yang memiliki permintaan tidak terbatas. Menurutnya, lokasi industri ditentukan oleh permintaan dan konsumsi produk.

3.1.6 The Theory of the Location of Industries (Weber-1929)

Alfred Weber, seorang ekonom Jerman adalah orang pertama yang memberikan eksposisi ilmiah pada teori lokasi yang mampu mengisi celah teoritis yang diciptakan oleh para ekonom klasik. Weber mengemukakan teori lokasi industrinya yang terkenal pada tahun 1909 yang diterbitkan dalam bahasa Jerman, buku berjudul '*Über den Standort der Industrien*'. Teori tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang diterbitkan sebagai '*The Theory of the Location of Industries*' pada tahun 1929. Weber menggunakan dalam teorinya:

1. *Ubiquities* adalah bahan yang tersedia di mana-mana di seluruh dataran seragam dengan biaya yang sama;
2. Materi yang dilokalkan hanya tersedia di lokasi tertentu;
3. Bahan murni adalah bahan terlokalisasi yang memasukkan seluruh beratnya ke dalam produk jadi, seperti minyak bumi;
4. Bahan penurun berat badan adalah komoditas lokal yang hanya memberikan sebagian atau tidak sama sekali dari beratnya ke dalam produk jadi;
5. Isodapane adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang sama total biaya transportasinya;
6. Isotim adalah garis biaya transportasi yang sama untuk setiap bahan atau produk.

Pendekatan biaya-terkecil Weber didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

1. Perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan sehubungan dengan biaya;
2. Adanya penetapan harga kompetitif yang sempurna;
3. Tarif transportasi bersifat homogen, sedangkan biaya transportasi merupakan fungsi dari berat dan jarak;
4. Ada pusat pembelian tertentu dan permintaan tertentu;
5. Sumber bahan baku adalah titik tetap.

Lokasi optimal Weber, tergantung pada input dan struktur biaya, pada dasarnya adalah dimana:

1. Total biaya transportasi per unit output minimal.
2. Jika tidak, disekonomis transportasi diimbangi oleh aglomerasi ekonomi dan biaya tenaga kerja yang rendah.

Di dalam teori ini Weber mempertimbangkan empat masalah, yaitu: a) biaya transportasi; b) biaya tenaga kerja; c) aglomerasi; dan d) biaya de-aglomerasi tanah. Diilustrasikan dalam teorinya dengan cara diagramatik meskipun teorinya dikritik oleh banyak ekonom. Dalam model biaya-terkecil Weberian ini, para pengusaha akan menempatkan industri mereka pada titik-titik dengan biaya minimum yang dicapai sebagai respons terhadap tiga faktor lokasi dasar: biaya transportasi relatif; biaya tenaga kerja; dan biaya aglomerasi atau deglomerasi. Teori Weber, yang disebut segitiga lokasi, mencari lokasi optimal untuk produksi suatu barang berdasarkan lokasi pasar yang tetap dan dua sumber bahan baku, yang secara geografis membentuk segitiga.

3.1.7 Central Place Theory/ CPT (Christaller-1933)

Perkembangan teori lokasi selanjutnya pada tahun 1933, ketika teori lokasi layanan pertama kali muncul, ditulis oleh Walter Christaller dengan memperkenalkan *Central Place Theory* (CPT) sebagai cara untuk menjelaskan lokasi, jumlah, ukuran pemukiman, dan karakteristik fungsional dimana lokasi tersebut berperan sebagai tempat sentral yang memberikan dan mendistribusikan barang dan jasa serta pelayanan kepada daerah sekitarnya. Teori geografi ini mencoba menjelaskan bagaimana kota dan permukiman lainnya terdistribusi secara spasial dan bagaimana dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut Christaller di suatu wilayah tertentu hanya ada satu kota pusat besar (tempat sentral) yang dikelilingi oleh serangkaian kota kecil, kota kecil, dan dusun (area pasarnya). Kota pusat berfungsi menyediakan dan memasok barang serta jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang atau penduduk yang tinggal di komunitas sekitar. Teori ini menjadi salah satu parameter dalam rangka menentukan lokasi yang terbaik untuk toko barang dan jasa perekonomian tersier lainnya saat ini.

3.1.8 Theory of Tord Palander (Palander-1935)

Ekonom Swedia Tord Palander dalam bukunya *'Beitrage zur Standortstheorie'* (1935) menjelaskan lokasi industri yang cocok. Palander menekankan pada batas antara dua area pasar dan juga menjelaskan bagaimana dua pabrik membuat produk yang sama secara linier pasar didistribusikan secara horizontal di dataran isotropik. Weber menentukan apakah dua perusahaan akan berlokasi bersama dengan menggambar isodapan kritis di sekitar titik biaya transportasi minimum mereka. Jika isodapan ini berpotongan, perusahaan dapat memperoleh ekonomi dengan menempatkan bersama di mana saja dalam zona persimpangan ini.

3.1.9 The Sector Model (Hoyt-1939)

Model Hoyt menunjukkan bahwa orang akan tinggal di sektor yang berbeda berdasarkan tingkat pendapatan. Karena tanah yang diinginkan lebih mahal, lingkungan kelas elit dibangun di zona yang terpisah dari zona kelas pekerja yang lebih rendah. Model sektor, juga dikenal sebagai model Hoyt, adalah model penggunaan lahan perkotaan dimana membahas mengenai penataan ruang kegiatan di daerah perkotaan. Teori tersebut diusulkan pada tahun 1939 oleh ekonom lahan Homer Hoyt, yang merupakan modifikasi dari model zona konsentris pengembangan kota. Hoyt menekankan bagaimana kota tumbuh dan beraktivitas mengatur dirinya sendiri dalam bentuk zona konsentris, saat pertumbuhan populasi terjadi, semakin penting untuk memahami cara pertumbuhan kota. Manfaat dari penerapan model ini termasuk fakta bahwa hal itu memungkinkan perkembangan pertumbuhan ke luar.

Urbanisasi pertumbuhan kota dan perkembangan kota membuat kota semakin kompleks. Setiap kota adalah rumah bagi sejumlah besar kegiatan ekonomi dan bagaimana kegiatan ini dilakukan di kota dijelaskan oleh model penggunaan lahan. Ada faktor dan karakteristik tertentu yang menentukan lokasi industri, bangunan komersial, kawasan pusat bisnis, dan kawasan pemukiman. Hoyt berpendapat bahwa kota tidak berkembang dalam bentuk lingkaran sederhana, melainkan memiliki sektor.

Hoyt mengemukakan bahwa hanya sedikit kegiatan yang tumbuh dalam bentuk sektor-sektor yang tersebar di sepanjang jalur-jalur perjalanan utama. Kegiatan di suatu sektor dianggap sama di seluruh sektor karena tujuan/ fungsi yang dilayaninya. Penggunaan lahan di setiap sektor akan tetap sama karena yang sejenis menarik yang sejenis. Sektor kelas atas akan tetap menjadi kelas atas karena itu akan menjadi daerah yang paling dicari untuk ditinggali, sehingga hanya orang kaya yang mampu tinggal di sana. Sektor industri akan tetap menjadi industri karena kawasan tersebut memiliki keunggulan khas berupa jalur kereta api atau sungai. Sektor-sektor tersebut dapat berupa perumahan, kegiatan industri, dll.

Sektor-sektor ini tumbuh di sepanjang jalur kereta api, jalan raya atau sungai. Signifikansi model Hoyt, antara lain:

1. Ekologis dan konsep sewa ekonomi untuk menjelaskan pola penggunaan lahan;
2. Penekanan pada peran jalur transportasi dalam mempengaruhi penataan ruang kota;
3. Jarak dan arah pertumbuhan dari pusat kota dipertimbangkan;
4. Menghadirkan lokasi industri dan nilai amenitas lingkungan sebagai penentu dalam suatu tempat hunian.

3.1.10 The Location of Economic Activity (Hoover-1948)

Edgar Hoover dalam bukunya *'The Location Theory and Shoe and Leather Industry'* pada tahun 1937 dan *'The Location of Economic Activity'* pada tahun 1948 membahas tentang faktor biaya dan faktor permintaan. Hoover yang merupakan salah satu pelopor terkemuka di bidang analisis lokasi berpendapat bahwa jika biaya produksi konstan dari biaya transportasi, itu menentukan harga komoditas. Teori Hoover (1937 dan 1948) didasarkan pada harga pengiriman, dimana harga yang dikirimkan untuk setiap pembeli akan menjadi biaya produksi ditambah biaya transportasi. Hal tersebut diwakili oleh garis isotim yang menghubungkan tempat-tempat dengan harga pengiriman yang sama. Teori lokasi telah menjadi bagian integral dari geografi ekonomi, ilmu regional, dan ekonomi spasial. Teori

lokasi menjawab pertanyaan tentang kegiatan ekonomi apa yang terletak di mana dan mengapa. Teori lokasi atau teori ekonomi mikro umumnya mengasumsikan bahwa agen bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Perusahaan dengan demikian memilih lokasi yang memaksimalkan keuntungan mereka dan individu memilih lokasi yang memaksimalkan utilitas mereka.

3.1.11 Theory of Sargent Florence (Florence-1948)

Sargent Florence dalam bukunya '*Investment, Location and Size of Plant*' (1948) mencoba mengukur lokasi industri dengan pendekatan induktif. Sargent Florence, seorang kritikus teori lokasi Alfred Weber, telah mengembangkan pendekatan yang sama sekali berbeda untuk lokasi industri. Dalam pandangannya, hubungan industri dengan wilayah geografis tidak sepenting hubungan industri dengan distribusi penduduk yang diduduki secara keseluruhan. Dalam teori ini, masalah lokasi industri lebih terkait dengan distribusi penduduk negara yang diduduki daripada wilayah geografisnya. Dia menekankan bahwa kegiatan ekonomi adalah terutama bergantung pada populasi daripada lokasi geografis. Baginya, distribusi jumlah penduduk menentukan distribusi industri. Dia menjelaskan teorinya dengan bantuan '*Location Quotient*' dan '*Koefisien Pelokalan*'. Dia menjelaskan batas-batas politik sebuah wilayah untuk lokasi industri dan juga mencoba menjelaskan desentralisasi industri daripada konsentrasi industri di wilayah tertentu. Ini adalah kelemahan utama dari teori ini.

3.1.12 Theory of Profit Maximisation (Losch-1954)

Kemudian, pengembangan teori lokasi dipercepat, dengan kontribusi dari penulis seperti August Losch, seorang ekonom Jerman yang menerbitkan *Theory of Profit Maximisation* di tahun 1954. Losch memodifikasi teori CPT Christaller karena dia yakin teori itu terlalu kaku, model Christaller mengarah pada pola di mana distribusi barang dan akumulasi keuntungan didasarkan sepenuhnya pada lokasi. Menurut Losch, industri tidak harus terletak di lokasi dengan biaya paling rendah (biaya transportasi dan biaya tenaga kerja) melainkan akan ditempatkan di area

dimana keuntungan maksimum akan terjadi. Losch juga menyatakan bahwa, ketika suatu daerah memiliki beberapa heksagon, yang terletak di atas satu sama lain dan mengelilingi pusat tertentu, sebuah kota metropolitan akan tumbuh. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa di sekitar inti kota, akan tumbuh banyak segi enam atau area pasar komoditas yang berbeda. Tidak seperti Weber, yang mendalilkan seluruh teorinya dalam keadaan ekonomi persaingan sempurna, Losch, sebaliknya, menjelaskan teorinya dalam lingkungan persaingan monopolistik.

3.1.13. The Growth Pole Theory (Perroux-1955)

Ekonom Prancis Francois Perroux menguraikan bahwa pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan, tidak seragam di seluruh wilayah tetapi terjadi di sekitar kutub (atau gugus) tertentu. Kutub ini sering dicirikan oleh industri inti di sekitar industri terkait yang berkembang, terutama melalui efek langsung dan tidak langsung. Teori *Growth Pole* diusulkan oleh Perroux pada tahun 1955 sebagai bagian dari perencanaan ekonomi di Prancis, dengan menaruh perhatian pada fenomena pembangunan ekonomi dan proses perubahan struktural.

3.1.14 The Theory of Smith (Smith-1956)

Smith dalam teorinya telah memberikan kerangka teoritis untuk lokasi industri. Teorinya juga dikenal sebagai 'Teori Kurva Biaya Area'. Smith telah berusaha untuk menggunakan pendekatan Weber dengan biaya paling sedikit persaingan sempurna dengan beberapa acuan pada pendekatan area pasar persaingan monopolistik dari Losch. D.M Smith mendalilkan teorinya sebagai 'teori Kurva Biaya Area' pada tahun 1956 dimana dia menggabungkan 'Teori Biaya Terkecil' Weberian dan 'Teori Maksimalisasi Keuntungan' Loschian. Dia mengadopsi pendekatan persaingan sempurna dengan biaya terkecil dan pendekatan area pasar persaingan monopolistik. Dia menggunakan istilah isopleth biaya (garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan biaya yang sama) dan kontur biaya (garis jumlah semua pengeluaran yang mungkin dialami perusahaan di suatu wilayah) Karena kurangnya pengetahuan tentang biaya dan

pendapatan di wilayah tertentu dan konsumen tidak bertindak dalam rasionalitas ekonomi, pengusaha hampir tidak menemukan yang paling tepat lokasi biaya (LCL) untuk industri. Di kedua sisi lokasi dengan biaya terendah (LCL), terdapat dua margin spasial diidentifikasi. Keuntungan maksimum akan dimungkinkan dalam lokasi ini. Smith mempertimbangkan tiga kondisi optimal di mana perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

3.1.15 Location and the Space Economy Theory (Isard-1956)

Walter Isard telah memberikan teori lokasi pada tahun 1956 melalui publikasi berjudul, *Location and the Space Economy*. Isard telah memodifikasi skema Loschian, dalam upaya membuatnya lebih realistis. Isard mengaitkan teori lokasi dengan teori umum ekonomi melalui prinsip substitusi. Isard (1956) mengklaim bahwa hanya dengan menggunakan pendekatan Weberian dia dapat berhasil menganalisis lokasi industri besi dan baja di Amerika Serikat.

3.1.16 Renner's Theory (Renner-1960)

Dalam bukunya '*World Economic Geography: An Introduction to Geonomics*' (1960), Renner mengembangkan beberapa prinsip umum lokasi industri. Menurutnya ada empat jenis industri 'ekstraktif' (terdiri dari operasi apa pun yang menghilangkan logam, mineral, dan agregat dari alam); 'reproduksi' (penambangan, penggalian, penangkapan ikan, perburuan, penebangan, dll. yang menggunakan kekuatan alam secara siklis untuk menghasilkan produk); 'fabrikasi' (ini adalah proses manufaktur di mana bahan mentah bersifat komersial dan hasilnya adalah produk jadi atau barang olahan misalnya mencium, menyempurnakan, merakit bagian-bagian dll,) dan 'memfasilitasi'.

Elemen lokasi industri, George Renner mengidentifikasi enam elemen untuk lokasi industri: a) bahan mentah, b) pasar, c) tenaga kerja (manajemen terampil, tidak terampil), d) kekuasaan, e) modal, f) transportasi. Renner menekankan keterkaitan antar industri dengan disjungtif dan bersifat konjungtif. Simbiosis

disjungtif berarti tanpa hubungan antar industri misalnya lokasi industri besi dan industri susu di wilayah tertentu. Simbiosis konjungtif adalah situasi di mana industri ada bersama karena hubungan organik antara kemudian.

3.1.17 Bid-Rent Theory (Alonso-1960)

Pada tahun 1960, William Alonso mengemukakan teori *Bid-Rent* bahwa pengguna lahan (misalnya pengguna ritel, kantor, atau perumahan) bersaing untuk mendapatkan lokasi yang paling mudah diakses ke CBD dimana pengguna bersedia membayar sewa penawaran dan mengurangi biaya perjalanan mereka. Pendekatan teori lokasi perkotaan oleh Alonso tersebut mulai berkembang pada tahun 1960-an dan didasarkan pada prinsip bahwa harga sewa berkurang dari pusat kota untuk mengimbangi pendapatan yang lebih rendah dan biaya operasi yang lebih tinggi, tidak terkecuali biaya transportasi.

3.1.18 Allan Pred's Theory (Pred-1967)

Pred (1967) mengembangkan representasi berdasarkan matriks perilaku di mana satu sumbu mewakili informasi yang tersedia dan kapasitas untuk menggunakannya untuk mempertimbangkan kompleksitas faktor perilaku dalam keputusan lokasi. Dihipotesiskan bahwa ada tiga bidang di mana kegiatan industri hipotetis dapat dilakukan secara menguntungkan. Lokasi optimal diidentifikasi dalam masing-masing area ini. Posisi geografis sejumlah perusahaan imajiner terkait dengan posisi Perilaku mereka dalam matriks.

3.1.19 Theodor Sabathil's Theory (Sabathil-1969)

Disertasi Theodor Sabathil tahun 1969 dianggap sebagai salah satu studi mendalam awal di bidang pemilihan lokasi internasional. Sabathil sebagian besar berfokus pada pemilihan negara, yang merupakan bagian dari proses pemilihan lokasi. Dalam konteks ini, Sabathil menyusun katalog komprehensif tentang faktor lokasi dan pendekatan teoretis untuk pemilihan lokasi; yang terakhir tidak terlalu detail. Sabathil juga tidak mempertimbangkan faktor situs hukum, alam, atau budaya.

3.1.20 Peter Tesch's Theory (Tesch-1980)

Disertasi pada tahun 1980 oleh Peter Tesch merupakan tonggak sejarah lain dalam pengembangan lebih lanjut teori tersebut, Tesch menggabungkan teori perdagangan internasional dan investasi dengan teori situs. Dia adalah orang pertama yang memasukkan kondisi kerangka khusus negara dalam analisisnya. Dasar utama untuk komentarnya tentang berbagai jenis internasionalisasi adalah keunggulan kompetitif spesifik lokasi. Dalam konteks ini, Tesch mengembangkan katalog kriteria untuk keputusan lokasi internasional yang dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Faktor lokasi yang mempengaruhi semua aktivitas perusahaan;
2. Ketersediaan dan biaya faktor lokasi yang berdampak pada faktor produksi;
3. Faktor lokasi yang berhubungan dengan perputaran.

3.1.21 Urban Economic Theory (Fujita-1989)

Perkembangan selanjutnya, Masahisa Fujita tahun 1989 dalam bukunya *Urban Economic Theory*, dimana Fujita mengkaji alasan ekonomi mengapa orang memilih untuk tinggal dimana mereka tinggal dan berkembang, melalui analisis fungsi sewa tawaran, teori terpadu penggunaan lahan perkotaan dan ukuran kota. Perilaku lokasi pemukiman rumah tangga diperiksa dalam kerangka ekonomi mikro dan ekuilibrium dan pola penggunaan lahan pemukiman yang optimal dibahas. Keseimbangan yang sesuai dan ukuran kota optimal dipelajari dalam berbagai konteks, selain juga memperluas teori klasik von Thunen dan Alonso dengan tambahan faktor eksternalitas seperti barang publik lokal, kepadatan dan kemacetan, dan prasangka rasial. Dalam model dasar *Urban Economic Theory*, selain konsentrasi pekerjaan di bagian tengah, diasumsikan bahwa kota dilayani oleh transportasi radial. sistem. Oleh karena itu, juga diasumsikan bahwa ruang perkotaan adalah homogen, dan lahannya tersedia untuk digunakan sebagai tempat tinggal.

3.1.22 New Economic Geography Theory (Krugman-1991)

Definisi geografi ekonomi yang jauh lebih sempit adalah yang digunakan oleh para ekonom yang mempraktikkan apa yang disebut geografi ekonomi baru. Paul Krugman, ekonom Amerika pada tahun 1991, dalam pandangan ini, geografi ekonomi adalah lokasi produksi dalam ruang, fitur yang paling mencolok adalah aglomerasi atau konsentrasinya. Krugman mendefinisikan Geografi Ekonomi Baru sebagai teori lokasi produksi, seperti halnya konsep teori lokasi klasik, yang diajukan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan dan evolusi struktur spasial ekonomi. Tahun 1998, Krugman mendefinisikan model geografi ekonomi baru gaya sentripetal yang mendorong konsentrasi geografis dan aglomerasi melawan kekuatan sentrifugal seperti faktor tidak bergerak (termasuk tanah, sumber daya alam, dan manusia). Tidak mengherankan bahwa geografi ternyata mungkin merupakan bidang ekonomi nonlinier yang paling alami. Konsepsi yang lebih luas menarik tidak hanya dari hubungan interdisipliner dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, tetapi juga dari ekonomi, dimana perkembangan ekonomi institusional dan evolusioner telah menyatu dengan baik dengan pandangan dunia yang lebih luas dari para ahli geografi.

3.1.23 The Hoffmann Theory (Hoffmann-1991)

Pola Hoffmann menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak mengadopsi kebijakan tertentu menuju industrialisasi, barang-barang konsumsi cenderung berkembang sebelum barang modal. Tetapi barang modal yang keluar dari sektor industri, dalam jangka panjang, akan tumbuh lebih cepat. Hoffman (1991) menyatakan bahwa “peralihan bahasa dan pencampuran bahasa di antara orang-orang dwibahasa atau multibahasa terkadang dapat ditandai dengan interjeksi atau penghubung kalimat.”

3.1.24 Thomas Goette Theory (Goette-1994)

Studi Thomas Goette tahun 1994 mencoba mengklasifikasikan faktor-faktor lokasi internasional yang penting dan menyusun proses pemilihan lokasi internasional. Goette membedakan antara kondisi lokasi ekonomi (potensi

penjualan, kondisi persaingan, infrastruktur dan biaya transportasi, tenaga kerja, kondisi moneter), kondisi lokasi politik (undang-undang perpajakan, perlindungan lingkungan, hambatan masuk pasar kelembagaan, dukungan bisnis, risiko politik), kondisi lokasi budaya (perbedaan bahasa, mentalitas, agama, dan kurangnya penerimaan perusahaan asing), dan kondisi lokasi geografis (iklim, topografi). Studi ini sekali lagi menunjukkan bahwa upaya untuk mencakup semua aspek akan mengakibatkan hilangnya kualitas karena semua faktor tidak atau tidak dapat dipertimbangkan. Goette juga berteori bahwa, khususnya, keputusan lokasi industri dalam perusahaan biasanya merupakan proses pengambilan keputusan sekali-sekali dan terkait dengan divisi. Berdasarkan hal ini, Goette mengasumsikan kurva pembelajaran yang relatif rendah, dan karenanya memiliki sedikit potensi untuk perbaikan untuk proyek selanjutnya. Sebagai salah satu kontribusi besar terakhir, Thomas Glatte bertujuan untuk meningkatkan dan mengglobalisasikan sistem yang dikenal dalam bukunya "Pemilihan Lokasi Produksi Internasional" dengan menyediakan proses seleksi 10 tahapan, menyarankan metode terpilih untuk setiap tahapan seleksi dan menawarkan daftar kriteria yang komprehensif untuk praktisi.

3.2 Teori Behaviour

Jarak dipandang sebagai gesekan sosial yang perlu diatasi dalam teori lokasi. Gesekan tersebut merupakan sebuah metafora untuk biaya transportasi dan komunikasi. Menurut Isard (1956:24) baik ruang dan waktu harus menjadi pertimbangan vital dalam setiap teori ekonomi. Jika ada pengertian untuk lokasi ekonomi, itu karena ada keteraturan tertentu dalam variasi biaya dan harga ruang. Karena itu adalah faktor jarak yang merupakan inti dari analisis lokasi, ada banyak alasan untuk input transportasi dimana jarak dan berat adalah dua faktor dasar, dan tarif transportasi sebagai harga dari input ini. Williams (1971), bagaimanapun, mendefinisikan aspek jarak lebih sempit dan menekankan peran akses sebagai faktor dalam evolusi kota, bahwa keputusan lokasi perkotaan, khususnya

penciptaan kota, adalah produk bersih dari banyak orang yang mencoba untuk menjadi lebih mudah diakses satu sama lain.

Pendekatan perilaku tampaknya kurang dimanfaatkan dalam teori lokasi meskipun berpotensi untuk menjelaskan banyak keputusan lokasi bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip maksimalisasi keuntungan. Sejauh ini belum diteliti secara memuaskan bagaimana persepsi ruang mempengaruhi perilaku spasial manusia. Tidak ada yang keberatan bahwa banyak keputusan, setidaknya sebagian, bergantung pada bagaimana orang memandang ruang di sekitarnya, bagaimana mereka membedakannya dan nilai apa yang mereka tempatkan pada berbagai elemen ruang ini. Penilaian faktor lokasi oleh pembuat keputusan paling sering bergantung pada kualitas spesifik bisnis dan kualitas pembuat keputusan. Anehnya, beberapa dekade telah berlalu sejak kontribusi penting terakhir di bidang teori lokasi perilaku.

Teori lokasi perilaku sebagai penyertaan keadaan psikologis dan subjektif dari pembuat keputusan ke dalam teori lokasi, seperti rasionalitas terbatas, penggunaan heuristik, dan persepsi spasial subjektif. Pred (1967) mengembangkan representasi berdasarkan matriks perilaku dimana satu sumbu mewakili informasi yang tersedia dan kapasitas untuk menggunakannya untuk mempertimbangkan kompleksitas faktor perilaku dalam keputusan lokasi. Teori lokasi perilaku dapat definisikan sebagai penyertaan keadaan psikologis dan subjektif dari pembuat keputusan ke dalam teori lokasi, seperti rasionalitas terbatas, penggunaan heuristik, dan persepsi spasial subjektif.

Aspek perilaku keputusan lokasi: Pada setiap tahap satu set alternatif lokasi diidentifikasi, dan kemudian prosedur evaluasi digunakan untuk mengurangi set pilihan. Tahapan sering dari hirarki geografis dan informasi dan mempertimbangkan, pada gilirannya, keputusan regional, lokal, dan situs. Semua perilaku manusia dapat dikategorikan ke dalam empat fungsi. Keempat fungsi ini adalah pelarian, perhatian, akses ke benda-benda berwujud, dan sensorik. Perhatikan bahwa keempat kategori perilaku ini tidak menyiratkan bahwa perilaku ini

"buruk". Kategori ini adalah label untuk tindakan perilaku positif dan negatif. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan lokasi antara lain faktor wilayah, pertimbangan masyarakat, dan faktor terkait tapak. Faktor masyarakat terdiri dari kualitas hidup, pelayanan, sikap, pajak, peraturan lingkungan, utilitas, dan dukungan pembangunan.

3.3 Kesimpulan

Dalam perspektif keruangan melalui studi tentang letak geografis, dan bagaimana keterkaitannya dengan teori-teori ekonomi penting, konsep wilayah memungkinkan pemahaman dan penjelasan cara hidup, bagaimana orang dan kelompok mengatur dan berhubungan satu sama lain, berkolaborasi untuk mengidentifikasi cara menggunakan dan menyesuaikan ruang dan lingkungan. Dimungkinkan untuk menghubungkan dan mengukur produksi dan konsumsi barang dan jasa melalui hubungan dan pertukaran material dan simbolik. Konfigurasi teritorial secara aktif mendorong perubahan dalam dinamika regional dan dalam proses produksi dan konsumsi dan, dalam istilah yang lebih luas, cara hidup.

Ilmu pengetahuan Perencanaan Wilayah terus berkembang, dalam pencarian jawaban atas fenomena ekonomi dan geografis. Dirasakan bahwa geografi ekonomi produksi memberikan peran yang jelas kepada lokal, hasil yang umumnya berlawanan dengan intuisi di era ekonomi informasi global. Menurut perspektif ini, diperkuat oleh penelitian, konteks kelembagaan (dan bukan hanya kedekatan geografis atau ketersediaan teknologi) bertindak untuk menentukan kondisi dimana pengetahuan sebenarnya dapat diterjemahkan dan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, atau kedekatan fisik tidak satu-satunya sumber kepadatan dalam hubungan perusahaan, dinamika ini juga tidak dapat dijamin oleh ketersediaan teknologi informasi, yang dianggap sebagai pengganti lokasi. Keselarasan menunjukkan bahwa dasar untuk pengembangan hubungan yang kuat dan pemahaman bersama adalah afinitas atau kesamaan kelembagaan. Beberapa ahli teori ekonomi mengkritik klasik lokasi ini hingga saat ini, namun, nilai

dan penerapan posisi dan model mereka tidak dapat disangkal, kesesuaian studi mereka, termasuk memahami aktivitas ekonomi spasial suatu wilayah, yang pada gilirannya menghasilkannya dinamika kependudukan sendiri dengan beberapa kemungkinan penataan ruang. Tercatat bahwa fenomena yang terkait dengan Pembangunan Ekonomi Regional telah muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir sebagai tren global, mengingat pergerakan internal akibat krisis kesehatan (COVID-19) dan konflik global (yaitu Rusia-Ukraina). Kontribusi ilmiah terletak pada penguatan hubungan antara apa yang dibahas di dunia akademis dan apa yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, William. 1964. *Location Theory, In John Friedman And William Alonso, Regional Development and Planning*. MIT Press: Cambridge. ^[L]_[SEP]
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Praeger Publishers: New York. ^[L]_[SEP]
- Capello, Roberta. 2011. *Location, Regional Growth and Local Development Theories*. AESTIMUM 58, Giugno 2011:1-25. Firenze University Press.
- Chan, Yupo. 2011. *Location Theory and Decision Analysis: Analytics of Spatial Information Technology Second Edition*. Springer: New York. ^[L]_[SEP]
- Christaller, W. 1966. *Central Places in Southern Germany*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Eiselt, G.A. Vladimir Marianov, Eds. 2011. *Foundations of Location ^[L]_[SEP]Analysis*. Springer: New York. ^[L]_[SEP]
- Erick A., Yohanes P. 2022. *Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan: Studi Kasus Kesehatan Lingkungan Permukiman*. Book Chapter Halaman 196-208. GET Press: Padang.
- Evans, A. W. 1985. *Urban Economics: An Introduction*. Basil Blackwell: London.
- Fujita, M. 1989. *Urban Economic Theory: Land Use and City Size*. Cambridge, Cambridgeshire, Inglaterra: Cambridge University Press.
- Haggett, Peter. 1965. *Location Analysis In Human Geography*. Arnold: London. ^[L]_[SEP]
- Isard, W. 1956. *Location and Space-Economy*. MIT Press: Massachusetts.
- John F. McDonald, Daniel P. McMillen. 2010. *Urban Economics and Real Estate: Theory and Policy*. John Wiley & Sons: New York.
- Jordaan, A. C., B. E. Drost, M. A. Makgata. 2004. *Land Value as a Function of Distance from the CBD: The Case of the Eastern Suburbs of Pretoria*. Sajems NS 7 No. 3 page 532-541.
- Launhardt, Wilhelm. 1900. *The Theory of Trace: Being a Discussion of the Principles of Location*. Lawrence Asylum Press.

- Lichfield, Nathaniel. 2009. *Economics in Urban Conservation*. Cambridge University Press. [L] [SEP]
- Lynch, K. 1990. *Image of the City*. MIT Press: Massachusetts.
- Loch, August. 1968. *The Economics of Location*. John Wiley and Sons: New York, USA.
- Marshall, John U. 1969. *The Location of Service Towns*. University of Toronto Press: Toronto. [L] [SEP]
- Penninx, Inge, Jonas de Maeyer, Sophie Leroy, Sophie de Mulder. 2021. Behavioural Studies in Spatial Planning. Real Corp 2021 Proceedings/Tagungsband 7-10 September 2021 ISBN 978-3-9504945-0-1.
- Pred, A. 1967. *Behaviour and Location: Foundations for a Geographic and Dynamic Location Theory*. Royal University of Lund: Lund. [L] [SEP]
- Richard, H. A. 1962. Transportation Costs and Plant Location: A Review of Principal Theories. *Transportation Journal*, 19-24.
- Rushton, Gerard. 1973. *Optimal location of Facilities*. Compress: Iowa.
- Sabat, W. and Tomasz Pilewicz. 2019. Behavioural Location Theory (Evolution, Tools, and Future). Warsaw School of Economic: Warsaw.
- Smith, David. 1971. *Industrial Location: An Economic Geographical Analysis*. John Wiley and Sons: New York. [L] [SEP]
- Stefan Nickel, Justo Puerto. 2005. *Location Theory: A Unified Approach*. Springer Verlag: Berlin.
- von Thunen, J. H. 1966. *The Isolated State*. Oxford: Pergamon Press.
- Weber, Alfred. 1929. *Theory of Location of Industries*. The University of Chicago Press: Illinois.
- Williams, O. P. 1971. *Metropolitan Political Analysis: A Social Access Approach*. The Free Press: New York.

BAB 4

PROYEKSI PENDUDUK BERDASARKAN MODEL KOHORT DAN MODEL MULTI-REGION

Oleh Fahmy Rinanda Saputri

4.1 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah suatu cara atau metode untuk memperkirakan atau menggambarkan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada asumsi tentang tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (UGM, n.d.). Setiap komponen memiliki peran penting dalam menentukan jumlah dan komposisi penduduk di masa depan.

1. **Kelahiran:** Tingkat kelahiran merujuk pada jumlah bayi yang lahir dalam satu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat fertilitas, kesehatan reproduksi, dan kebijakan keluarga. Proyeksi penduduk akan mempertimbangkan tren kelahiran historis dan asumsi tentang perubahan di masa depan untuk mengestimasi jumlah kelahiran di masa mendatang.
2. **Kematian:** Tingkat kematian mencerminkan jumlah orang yang meninggal dalam satu wilayah pada periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kematian meliputi kualitas sistem kesehatan, kondisi lingkungan, akses ke pelayanan medis, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan harapan hidup. Proyeksi

penduduk akan mempertimbangkan tren kematian sebelumnya dan asumsi tentang perubahan di masa depan untuk memperkirakan jumlah kematian di masa mendatang.

3. Migrasi: Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Migrasi dapat bersifat internal (dalam negara) atau eksternal (lintas negara). Tingkat migrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peluang kerja, perubahan ekonomi, kondisi sosial, dan kebijakan imigrasi. Proyeksi penduduk akan mempertimbangkan tren migrasi historis dan asumsi tentang perubahan di masa depan untuk menghitung jumlah migrasi di masa mendatang.

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya proyeksi penduduk adalah (Rini Handayani, 2020):

jelaskan lebih rinci masing-masing manfaatnya:

1. Dasar dalam Perencanaan: Proyeksi penduduk memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Dengan mengetahui perkiraan pertumbuhan dan komposisi penduduk di masa depan, pemerintah dan lembaga lainnya dapat merencanakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan berbagai program sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk yang diperkirakan. Tanpa proyeksi penduduk yang akurat, risiko kesalahan perencanaan menjadi lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Tools untuk Mendapatkan Gambaran Besar Masalah yang Dihadapi di Masa yang Akan Datang: Proyeksi penduduk membantu pemangku kebijakan memahami tantangan dan masalah yang mungkin dihadapi di masa depan terkait pertumbuhan dan komposisi penduduk. Misalnya, proyeksi penduduk dapat menyoroti potensi peningkatan jumlah lansia dan dampaknya pada sistem kesehatan dan jaminan sosial, atau proyeksi dapat menunjukkan potensi

pertumbuhan penduduk muda dan implikasinya pada lapangan kerja dan layanan pendidikan. Dengan memahami gambaran besar masalah ini, kebijakan yang tepat dapat diarahkan untuk menghadapinya.

3. Tools yang Dibutuhkan pada Proses Penyusunan Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan yang Dihadapi: Proyeksi penduduk menjadi alat yang sangat berharga dalam proses penyusunan kebijakan yang efektif. Berdasarkan hasil proyeksi, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi isu-isu kunci yang akan dihadapi di masa depan dan merancang strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, proyeksi yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk muda dapat mengarah pada kebijakan peningkatan pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Atau, proyeksi yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk dapat mendorong kebijakan untuk meningkatkan kesadaran tentang perencanaan keluarga dan program kesuburan.

4.2 Model Proyeksi Penduduk

Informasi dasar penduduk, seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya, sangat penting dalam berbagai perencanaan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, proyeksi penduduk menjadi sangat berarti dan menjadi kunci dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Proyeksi penduduk tidak hanya memberikan dasar untuk menentukan arah dan dasar pengambilan keputusan rencana di masa depan, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (Handiyatmo et al., 2010).

Setiap perencanaan pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, energi, penyediaan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebijakan lingkungan, membutuhkan data proyeksi penduduk sebagai dasar informasi. Proyeksi penduduk juga memberikan data dasar yang diperlukan untuk memperkirakan jumlah angkatan kerja dari kelompok usia muda

yang masuk ke dalam tenaga kerja serta kelompok usia tua yang keluar dari angkatan kerja karena kematian, ketidakmampuan, dan pensiun. Semua informasi ini membantu para perencana dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan masyarakat.

Ada beberapa metode proyeksi penduduk yang digunakan untuk membuat estimasi jumlah dan komposisi penduduk di masa depan. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:

1. Model Ekstrapolasi Linier: Model ini merupakan metode proyeksi penduduk yang sederhana dan sering digunakan. Ia didasarkan pada asumsi bahwa tren pertumbuhan populasi di masa lalu akan berlanjut secara linier di masa mendatang. Dengan menggunakan data historis tentang kelahiran, kematian, dan migrasi, model ekstrapolasi linier memproyeksikan pertumbuhan rata-rata untuk mengestimasi jumlah penduduk di periode waktu berikutnya.
2. Model Kohort: Model kohort fokus pada proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia atau generasi tertentu, yang disebut kohor. Model ini mengikuti pergerakan setiap kohor dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya berdasarkan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi yang telah diamati sebelumnya. Proyeksi ini memberikan informasi yang terperinci tentang bagaimana jumlah penduduk akan berubah dalam kelompok usia tertentu di masa mendatang.
3. Model Proyeksi Komponen: Model ini menggabungkan tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan populasi: kelahiran, kematian, dan migrasi. Model proyeksi komponen memperhitungkan proyeksi untuk setiap komponen secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan proyeksi total jumlah penduduk di masa mendatang. Model ini memerlukan data yang akurat tentang tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi, serta asumsi yang baik tentang bagaimana faktor-faktor ini akan berubah di masa depan.

4. **Model Proyeksi Berbasis Matematika:** Model matematika lebih canggih dan kompleks daripada model-model sebelumnya. Model ini menggunakan persamaan matematis dan statistik untuk mengestimasi pertumbuhan penduduk berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Model berbasis matematika memperhitungkan interaksi antara kelahiran, kematian, dan migrasi dalam perhitungannya.
5. **Model Proyeksi Multi-Region:** Model ini mencakup proyeksi penduduk untuk beberapa wilayah atau daerah sekaligus. Ia mempertimbangkan pergerakan penduduk antar wilayah (migrasi) selain tingkat kelahiran dan kematian di setiap wilayah. Proyeksi ini relevan untuk perencanaan dan kebijakan yang melibatkan beberapa wilayah, seperti proyeksi pertumbuhan populasi di tingkat nasional, regional, atau lokal.

Pemilihan model proyeksi penduduk yang tepat tergantung pada tujuan proyeksi, ketersediaan data, dan tingkat akurasi yang diinginkan. Terkadang, kombinasi beberapa model juga dapat digunakan untuk mendapatkan perkiraan yang lebih baik dan komprehensif tentang pertumbuhan populasi di masa mendatang. Namun dalam sub bab ini akan dibahas lebih spesifik mengenai proyeksi penduduk berdasarkan model Kohort dan Multi-Region.

4.3 Model Kohort

Proyeksi penduduk berdasarkan model Kohort adalah salah satu metode proyeksi penduduk yang didasarkan pada kelompok usia atau generasi tertentu, yang disebut kohor. Model ini mencoba memprediksi pertumbuhan dan komposisi penduduk di masa depan dengan mengamati dan mengikuti pergerakan kelompok usia dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya.

4.3.1 Ciri-ciri Model Kohort

Model Kohort dalam proyeksi penduduk memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakannya dari metode

proyeksi penduduk lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri model kohort:

1. **Berbasis Kelompok Usia:** Model kohort berfokus pada perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia atau generasi tertentu, yang disebut kohor. Penduduk dibagi menjadi kelompok-kelompok usia, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan seterusnya. Setiap kohor kemudian diikuti dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi yang telah diamati sebelumnya.
2. **Menggunakan Data Historis:** Model kohort memerlukan data historis yang lengkap tentang kelahiran, kematian, dan migrasi dari kohor sebelumnya untuk membuat proyeksi ke depan. Data historis digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola pertumbuhan populasi dalam kelompok usia tertentu dan membantu dalam mengestimasi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa mendatang.
3. **Memberikan Proyeksi Berdasarkan Kelompok Usia:** Ciri khas model kohort adalah memberikan proyeksi penduduk secara terperinci berdasarkan kelompok usia. Dengan demikian, model ini mampu memberikan informasi tentang bagaimana komposisi penduduk berubah dari satu kelompok usia ke kelompok usia lainnya seiring waktu.
4. **Kompleksitas dalam Perhitungan:** Model kohort memerlukan perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan metode proyeksi penduduk lainnya karena melibatkan pergerakan setiap kohor secara terpisah. Perhitungan ini melibatkan asumsi tentang tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi di masa mendatang.
5. **Memperhitungkan Perubahan Tren:** Model kohort memperhitungkan perubahan tren dalam kelahiran, kematian, dan migrasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini memungkinkan model untuk menggambarkan bagaimana pola pertumbuhan dan

komposisi penduduk dapat berubah secara signifikan dalam jangka waktu yang panjang.

6. Akurat untuk Proyeksi Jangka Panjang: Model kohort cenderung lebih akurat untuk proyeksi jangka panjang karena melibatkan informasi tentang perubahan demografis yang sebenarnya dalam kelompok usia. Namun, akurasi model ini juga bergantung pada keakuratan data historis dan asumsi yang digunakan dalam perhitungannya.

4.3.2 Tahapan Proyeksi Model Kohort

Tahapan proyeksi model kohor mencakup langkah-langkah yang harus dijalankan untuk menghasilkan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia atau generasi tertentu. Berikut adalah tahapan-tahapan proyeksi Model Kohort:

1. Pembagian Penduduk Menjadi Kohor: Pada awalnya, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok usia atau generasi yang disebut kohor. Contoh kelompok usia adalah 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan seterusnya. Data awal ini mencatat jumlah penduduk dalam setiap kelompok usia pada saat tertentu (misalnya pada tahun awal proyeksi).
2. Perhitungan Tingkat Kelahiran: Untuk setiap kelompok usia, tingkat kelahiran yang diamati sebelumnya digunakan untuk mengestimasi jumlah kelahiran di masa mendatang. Tingkat kelahiran adalah jumlah bayi yang lahir per seribu perempuan pada kelompok usia tertentu.
3. Perhitungan Tingkat Kematian: Untuk setiap kelompok usia, tingkat kematian yang diamati sebelumnya digunakan untuk memperkirakan jumlah kematian di masa mendatang. Tingkat kematian adalah jumlah kematian per seribu penduduk pada kelompok usia tertentu.
4. Proyeksi Ke Depan: Dengan mengetahui jumlah kelahiran dan kematian untuk setiap kelompok usia, proyeksi penduduk dapat dihitung untuk periode waktu berikutnya. Jumlah kohor bergerak maju dengan

tambahan kelahiran dan pengurangan kematian di setiap periode waktu.

5. Perhitungan Migrasi (Opsional): Pada beberapa kasus, metode kohor juga dapat mempertimbangkan tingkat migrasi antar kelompok usia atau generasi, jika data migrasi tersedia. Namun, migrasi sering kali sulit untuk diprediksi dan dapat menjadi tantangan dalam proyeksi penduduk.

Metode Kohor mempertimbangkan perubahan dalam struktur umur penduduk dan memberikan gambaran tentang bagaimana pertumbuhan penduduk akan terjadi dalam kelompok usia tertentu. Namun, metode ini bergantung pada data historis yang akurat tentang kelahiran, kematian, dan migrasi, serta asumsi yang digunakan untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan di masa mendatang.

4.3.3 Studi Kasus Model Kohort

Pada periode awal, kondisi penduduk suatu daerah dapat dikelompokkan berdasarkan kohortnya, dan ini ditunjukkan dalam vektor P_0 . Vektor P_0 berisi jumlah penduduk dalam setiap kelompok usia atau kohor pada saat awal proyeksi. Misalkan vektor P_0 memiliki komponen sebagai berikut:

$P_0 = [P_0(0-4), P_0(5-9), P_0(10-14), \dots, P_0(n)]$

Di mana $P_0(0-4)$ merupakan jumlah penduduk pada kelompok usia 0-4 tahun, $P_0(5-9)$ adalah jumlah penduduk pada kelompok usia 5-9 tahun, dan seterusnya, hingga $P_0(n)$ adalah jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang terakhir dalam periode awal.

Selanjutnya, perubahan penduduk di setiap kelompok usia selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) akan diproyeksikan berdasarkan tiga faktor utama: kelahiran (B), kematian (D), dan migrasi (M).

Misalkan P_1 adalah vektor yang menunjukkan jumlah penduduk dalam setiap kelompok usia setelah satu periode waktu. Maka, perubahan penduduk di setiap kelompok usia dapat dihitung sebagai berikut:

1. Perubahan karena kelahiran (B): Jumlah kelahiran pada setiap kelompok usia dapat dihitung dengan mengalikan jumlah perempuan pada kelompok usia tersebut dengan tingkat kelahiran untuk kelompok usia tersebut. Misalnya, untuk kelompok usia 20-24 tahun, jumlah kelahiran adalah:

Jumlah Kelahiran 20-24 tahun = (Jumlah Perempuan 20-24 tahun) * (Tingkat Kelahiran 20-24 tahun)

2. Perubahan karena kematian (D): Jumlah kematian pada setiap kelompok usia dapat dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut dengan tingkat kematian untuk kelompok usia tersebut. Misalnya, untuk kelompok usia 60-64 tahun, jumlah kematian adalah:

Jumlah Kematian 60-64 tahun = (Jumlah Penduduk 60-64 tahun) * (Tingkat Kematian 60-64 tahun)

3. Perubahan karena migrasi (M): Jumlah migrasi pada setiap kelompok usia dapat dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut dengan tingkat migrasi untuk kelompok usia tersebut. Jika data migrasi tersedia, maka perubahan ini dapat dihitung. Namun, jika data migrasi tidak ada, perubahan karena migrasi diabaikan dalam proyeksi.

Setelah menghitung perubahan penduduk di setiap kelompok usia berdasarkan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, vektor P_1 dapat dihitung sebagai berikut:

$P_1 = P_0 + \text{Perubahan karena kelahiran (B)} - \text{Perubahan karena kematian (D)} \pm \text{Perubahan karena migrasi (M)}$

Dengan mengulang proses ini untuk setiap periode waktu, kita dapat menghasilkan proyeksi penduduk berdasarkan metode kohort. Metode ini memungkinkan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan perubahan komposisi dan jumlah penduduk dalam setiap kelompok usia, yang memiliki implikasi penting dalam merencanakan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

4.4 Model Multi-Region

Proyeksi Penduduk Model Multi-Region merupakan metode proyeksi penduduk yang sangat relevan dalam konteks perencanaan pembangunan dan kebijakan di tingkat nasional dan regional. Model ini secara khusus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk untuk beberapa wilayah atau daerah sekaligus, mencakup tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu fitur utama dari model ini adalah inklusi faktor migrasi, yang mencakup pergerakan penduduk antar wilayah.

Dengan menggabungkan data mengenai kelahiran, kematian, migrasi, dan karakteristik demografis lainnya di setiap wilayah, proyeksi penduduk multi-region memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pertumbuhan populasi dapat berbeda di setiap wilayah dan bagaimana interaksi antar wilayah dapat mempengaruhi dinamika populasi secara keseluruhan. Tingkat migrasi antar wilayah memainkan peran penting dalam proyeksi ini, karena mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di wilayah asal dan tujuan migrasi.

Melalui model ini, para perencana dan pembuat kebijakan dapat memahami lebih baik perbedaan kondisi dan tantangan demografis yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Proyeksi penduduk multi-region membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik unik setiap wilayah, termasuk peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan potensi ekonomi.

Selain itu, model ini memungkinkan evaluasi dan perbandingan kinerja pembangunan antar wilayah. Hal ini membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efektif dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Proyeksi penduduk model multi-region memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pertumbuhan populasi di masa mendatang, yang menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah.

4.4.1 Ciri-ciri Model Multi-Region

Proyeksi Penduduk Berdasarkan Model Multi-Region memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari metode proyeksi penduduk lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri model proyeksi penduduk berdasarkan multi-region:

1. Melibatkan Lebih dari Satu Wilayah: Ciri utama dari model ini adalah melibatkan lebih dari satu wilayah atau daerah dalam proyeksi. Wilayah-wilayah ini bisa berupa tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten, kota, atau wilayah geografis lainnya. Model multi-region menggabungkan proyeksi penduduk untuk setiap wilayah yang berbeda.
2. Memperhitungkan Migrasi Antar Wilayah: Salah satu ciri penting dari model ini adalah mempertimbangkan pergerakan penduduk antar wilayah atau migrasi. Migrasi dapat berupa inmigrasi (penduduk yang datang ke wilayah tersebut dari wilayah lain) dan emigrasi (penduduk yang pindah dari wilayah tersebut ke wilayah lain). Tingkat migrasi antar wilayah menjadi faktor penting dalam proyeksi ini karena dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di wilayah asal dan tujuan migrasi.
3. Interaksi Antar Wilayah: Model multi-region juga memperhitungkan interaksi dan hubungan antar wilayah. Faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, infrastruktur, dan kebijakan migrasi di satu wilayah dapat mempengaruhi migrasi penduduk dari dan ke wilayah lainnya. Interaksi antar wilayah ini dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang bagaimana pertumbuhan populasi di satu wilayah dapat dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan di wilayah lain.
4. Data dan Asumsi yang Kompleks: Model proyeksi penduduk multi-region memerlukan data yang akurat dan lengkap dari masing-masing wilayah yang terlibat. Data ini meliputi jumlah penduduk pada setiap kelompok usia, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di setiap wilayah. Selain itu, model ini juga memerlukan asumsi tentang tingkat pertumbuhan penduduk di setiap wilayah, yang

dapat didasarkan pada tren historis, analisis demografis, dan pertimbangan kebijakan.

5. Menyediakan Proyeksi untuk Setiap Wilayah: Model ini memberikan proyeksi penduduk untuk setiap wilayah yang terlibat. Hasil proyeksi penduduk ini memberikan informasi tentang bagaimana jumlah dan komposisi penduduk akan berkembang di masing-masing wilayah di masa mendatang. Hal ini sangat berharga dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan di tingkat nasional dan regional, karena memungkinkan penyusunan rencana yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

4.4.2 Tahapan Proyeksi Model Multi-Region

Tahapan proyeksi penduduk berdasarkan model multi-region melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan memerlukan data yang akurat dari masing-masing wilayah yang terlibat. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proyeksi penduduk model multi-region:

1. Pengumpulan Data Demografis: Tahapan pertama adalah mengumpulkan data demografis dari masing-masing wilayah yang akan diproyeksikan. Data yang diperlukan meliputi jumlah penduduk pada setiap kelompok usia atau kohor, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan data migrasi seperti tingkat inmigrasi dan emigrasi di setiap wilayah.
2. Evaluasi Data dan Perapihan: Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan perapihan data untuk memastikan keakuratannya. Data yang tidak lengkap atau tidak konsisten harus diperbaiki atau dilakukan perapihan untuk mengatasi potensi anomali atau kesalahan.
3. Penyesuaian Data Antara Wilayah: Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dan diperapihkan di setiap wilayah harus disesuaikan untuk memastikan konsistensi dalam definisi dan parameter proyeksi. Penyesuaian ini

penting karena wilayah-wilayah yang berbeda mungkin memiliki definisi dan metode pengumpulan data yang berbeda pula.

4. **Penentuan Asumsi:** Tahapan selanjutnya adalah menentukan asumsi tentang tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa mendatang untuk setiap wilayah. Asumsi ini dapat didasarkan pada tren historis, analisis demografis, dan pertimbangan kebijakan atau skenario yang mungkin terjadi di masa depan.
5. **Penghitungan Proyeksi Penduduk:** Setelah data dan asumsi ditetapkan, tahap berikutnya adalah menghitung proyeksi penduduk untuk setiap wilayah. Proyeksi penduduk ini melibatkan penggunaan data awal, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi, serta asumsi yang telah ditentukan untuk mengestimasi jumlah penduduk di masa mendatang.
6. **Analisis Hasil Proyeksi:** Setelah proyeksi penduduk dihitung, tahap berikutnya adalah menganalisis hasilnya. Hasil proyeksi dapat digunakan untuk membandingkan pertumbuhan penduduk antar wilayah, mengidentifikasi tren dan pola pertumbuhan, serta memahami dampak dari faktor-faktor demografis yang berbeda di setiap wilayah.
7. **Interpretasi dan Penerapan:** Hasil proyeksi penduduk model multi-region digunakan untuk memberikan informasi penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan di tingkat nasional dan regional. Interpretasi hasil proyeksi membantu dalam merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh wilayah.

4.4.3 Persamaan Matematis dalam Model Multi-Region

Proyeksi penduduk berdasarkan model multi-region melibatkan berbagai persamaan dan perhitungan yang kompleks untuk mengestimasi pertumbuhan penduduk di masing-masing

wilayah. Namun, tidak ada persamaan tunggal yang digunakan dalam model ini karena proyeksi bergantung pada berbagai faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan interaksi antar wilayah. Beberapa komponen dan persamaan yang umum digunakan dalam proyeksi penduduk model multi-region:

1. Tingkat Kelahiran (Birth Rate): Tingkat kelahiran adalah jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Untuk mengestimasi pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah, perlu diketahui tingkat kelahiran pada setiap wilayah. Persamaan yang digunakan untuk menghitung jumlah kelahiran di wilayah tersebut adalah:

Jumlah Kelahiran = Tingkat Kelahiran $\times$ Jumlah Penduduk $\times$ Konstanta

2. Tingkat Kematian (Death Rate): Tingkat kematian adalah jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Untuk menghitung jumlah kematian di masing-masing wilayah, digunakan persamaan berikut:

Jumlah Kematian = Tingkat Kematian $\times$ Jumlah Penduduk $\times$ Konstanta

3. Tingkat Migrasi (Migration Rate): Tingkat migrasi mencakup tingkat inmigrasi (penduduk yang datang ke wilayah tersebut dari wilayah lain) dan tingkat emigrasi (penduduk yang pindah dari wilayah tersebut ke wilayah lain). Untuk mengestimasi jumlah migrasi di wilayah tersebut, digunakan persamaan sebagai berikut:

Jumlah Migrasi = (Tingkat Inmigrasi - Tingkat Emigrasi) $\times$ Jumlah Penduduk $\times$ Konstanta

4. Pertumbuhan Penduduk (Population Growth): Pertumbuhan penduduk adalah selisih antara kelahiran, kematian, dan migrasi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah adalah:

Pertumbuhan Penduduk = Jumlah Kelahiran - Jumlah Kematian + Jumlah Migrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Handiyatmo, D., Sahara, I., & Rangkuti, H. (2010). Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja. In *BPS-Jakarta*.
- Rini Handayani. (2020). *Modul Dasar-Dasar Kependudukan (KSM 123)* (p. 15).
- UGM, P. (n.d.). Executive Summary Proyeksi Penduduk & Kebutuhan Pangan Indonesia. In *Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering*.
<https://mplk.politanikoe.ac.id/index.php/program-studi/38-manajemen-pertanian-lahan-kering/topik-kuliah-praktek/perindungan-tanaman/458-predator-hama-kumbang-tentara-leather-winged-beetles>

BAB 5

TEORI PERTUMBUHAN WILAYAH

Oleh Indriani Umar

5.1 Pendahuluan

Batasan dan sistem suatu wilayah ditentukan oleh faktor administratif dan/atau fungsional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan unit geografis dan semua elemen yang terkait dengannya. Rustiadi (Nugraha 2012) mendefinisikan wilayah sebagai suatu kesatuan geografis dengan batas-batas yang pasti dimana bagian-bagian penyusun wilayah tersebut saling berdekatan.

Keanekaragaman bentuk dan topografi wilayah menjadikan setiap wilayah memiliki perbedaan dalam hal potensi dan masalah yang dihadapi setiap wilayah. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda serta permasalahan yang dihadapi berbeda, sehingga kegiatan pembangunan baik yang sektoral maupun spasial yang dilakukan di suatu daerah harus sejalan dengan upaya pembangunan dalam lingkup daerah. Oleh karena itu perkembangan suatu wilayah dengan wilayah lain menjadi berbeda-beda.

Pembangunan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan suatu wilayah dengan memanfaatkan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan infrastruktur, sumber daya kelembagaan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut (Rahayu & Santoso 2014). Perkembangan suatu wilayah erat kaitannya dengan teori pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan

wilayah merupakan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik suatu wilayah yang ditandai oleh kemajuan, penambahan serta peningkatan sarana dan prasarana pada suatu wilayah. Teori pertumbuhan wilayah dapat ditinjau dari dua aspek yaitu dari aspek sektoral dan aspek regional (spasial).

5.2 Teori Pertumbuhan Wilayah Ditinjau dari Aspek Sektoral

Pertumbuhan wilayah dapat ditinjau dari aspek sektoral yang mana pada aspek ini pertumbuhan wilayah dilihat dari aktivitas masyarakat suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Teori pertumbuhan wilayah yang ditinjau dari aspek sektoral umumnya kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan (Tarigan 2005). Pada umumnya teori pertumbuhan yang ditinjau dari aspek sektoral merupakan teori-teori yang mengukur pertumbuhan wilayah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Berikut ini merupakan teori pertumbuhan wilayah yang ditinjau dari aspek sektoral.

5.2.1 Teori Neo Klasik

Teori Neo Klasik merupakan teori yang dikembangkan oleh ahli ekonomi Harry W Richardson (1973). Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor (Richardson, 1973) yaitu:

- a. **Tenaga Kerja.** Salah satu unsur yang sangat menentukan dalam pembangunan suatu daerah adalah tenaga kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Jika angkatan kerja bertambah, maka ekonomi lokal telah berhasil menyerap tenaga kerja, yang mana hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Akibatnya, wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dengan pendapatan yang lebih tinggi.
- b. **Ketersediaan Modal (investasi).** Kemampuan suatu daerah untuk mengakses modal sangat penting untuk pembangunannya. Besarnya modal yang terakumulasi

menentukan perkembangan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan investasi baik investasi domestik maupun investasi pada tingkat internasional. Investasi dapat memperluas barang modal dalam meningkatkan output yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan suatu wilayah. Investasi terdiri dari dua jenis yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil terdiri dari pembelian barang modal, seperti peralatan, perlengkapan, dan barang lain yang digunakan dalam proses produksi. Investasi keuangan adalah pembelian sekuritas, seperti saham, obligasi, dan jenis aset lainnya.

- c. **Kemajuan Teknologi.** Menurut perspektif Neo Klasik, kemajuan teknologi merupakan salah satu penyebab peningkatan pendapatan nasional. Hal ini karena penemuan-penemuan baru yang cenderung dapat menghemat tenaga kerja yang menyebabkan tingginya permintaan akan barang-barang yang digunakan dalam produksi.

Ketiga faktor tersebut berfungsi sebagai stabilitator dalam menciptakan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah yang mana dalam hal ini negara memiliki kapasitas sebagai penyeimbang antara dunia usaha dan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan 3 (tiga) faktor tersebut maka semakin cepat juga wilayah tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Signifikansi pergerakan faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan investasi antar wilayah dan negara, perlu ditekankan dalam teori ini. Pola migrasi ini memungkinkan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah. Teori Neo-Klasik menjunjung tinggi gagasan bahwa kemajuan suatu wilayah selalu dalam keseimbangan yang dinamis. Misalnya, daerah kaya melakukan investasi keuangan di daerah tertinggal. Ketika investasi dilakukan di daerah tertinggal, di mana modal menjadi salah satu keunggulannya, maka kesenjangan antara kedua daerah tersebut dapat ditutup tanpa perlu campur tangan pemerintah.

5.2.2 Teori Neo Keynesian

Teori *Neo Keynesian* diciptakan oleh Roy F. Harrod (1948) dan Evsey Domar pada tahun 1957 sebagai perpanjangan dari Teori Keynes yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1936, dengan mengemukakan teori tentang hubungan antara tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Harrod dan Domar menerapkan gagasan Keynesian pada proses pembangunan jangka panjang yang mana studi tentang aktivitas ekonomi nasional dan kesulitan tenaga kerja yang diberikan Keynes diperluas oleh teori Harrod-Domar.

Pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan mencontohkan komponen kunci kerangka analisis Keynesian baik dalam konsepsi maupun perincian model. Hal ini karena analisis Keynesian tidak membahas masalah ekonomi jangka panjang, analisis ini dianggap tidak cukup. Harrod mempertanyakan fokus sempit Keynes pada tingkat stabilitas pendapatan berdasarkan lapangan kerja penuh, yang mencakup penggunaan kapasitas produksi yang terpasang, dan bertanya dalam keadaan apa stabilitas pendapatan dan kesempatan kerja penuh dapat dicapai dan dipertahankan selama pembangunan ekonomi. Ini mengacu pada keadaan di mana proses pertumbuhan terjadi dalam keseimbangan yang stabil. Harrod berkonsentrasi pada kondisi yang harus diikuti untuk menjaga keharmonisan atau keseimbangan antara tabungan, investasi dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi.

Harrod berpendapat bahwa ada ketidakstabilan teoretis karena tingkat pertumbuhan yang dianggap tepat oleh investor (*warranted growth*) berbeda dari tingkat pertumbuhan yang ditentukan oleh kondisi fundamental yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan angkatan kerja (*natural growth*). Menurut hipotesis Harrod, komponen ketidakstabilan yang mengganggu keseimbangan atau keadaan ekuilibrium merupakan bagian alami dari proses pertumbuhan. Hal ini disebut sebagai teorema ketidakstabilan dan diakui sebagai inti dari teori Harrod. Implikasi teorema ketidakstabilan adalah bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan berdasarkan keseimbangan yang stabil, langkah-langkah

kebijakan atau kebijakan tertentu harus diterapkan untuk memerangi ketidakstabilan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*). Sementara itu gagasan Domar berpangkal pada berlakunya asas *investment multiplier* yang mana laju pertumbuhan pada permintaan dihadapkan pada pertumbuhan kapasitas produksi.

Berikut ini merupakan beberapa asumsi dari teori Harrod-Domar (Arsyad 1999):

- a. Perekonomian mengalami kesempatan kerja penuh dan aset modal masyarakat dimanfaatkan sepenuhnya.
- b. Karena hanya ada dua sektor ekonomi yaitu sektor bisnis dan sektor rumah tangga sehingga tidak diperlukan pemerintah atau perdagangan internasional.
- c. Fungsi tabungan dimulai dari nol karena tabungan publik berbanding terbalik dengan pendapatan nasional.
- d. Kecenderungan untuk menabung (kecenderungan marginal untuk menabung, atau MPS), rasio output modal terhadap output total (rasio output modal, atau COR), dan rasio output modal inkremental, atau ICOR, semuanya konstan.

Secara garis besar Teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi dalam wilayah tersebut. Apabila tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau wilayah tersebut akan rendah. Oleh karena itu, agar suatu wilayah yang kurang berkembang dapat berkembang lebih baik maka perlu adanya intervensi dari pemerintah dengan cara memperbesar investasi pada suatu wilayah ataupun dengan cara memperkecil stok modal.

Berdasarkan hal tersebut maka teori Neo Keynesian lebih berfokus pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu wilayah dan tidak terlalu menekankan pada konsep lapangan kerja penuh. Adapun dalam teori ini terdapat dua bidang utama dalam ekonomi mikro yaitu kekakuan harga dan kekakuan upah. Kekakuan harga dan kekakuan upah dapat berdampak secara signifikan terhadap ekonomi makro.

5.2.3 Teori Pentahapan (*Staging Theory*)

Teori Pentahapan merupakan teori pertumbuhan wilayah yang ditinjau dari aspek ekonomi. Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi yaitu Walt Whitman Rostow pada tahun 1956 yang berawal dari artikel *The Take-Off Into Self-Sustained Growth*. W.W Rostow mengemukakan ide bahwa transformasi ekonomi setiap bangsa dapat diamati melalui segi sejarahnya. Selain itu, W.W. Rostow mengkategorikan karakteristik ekonomi menjadi lima tahap (Azwar 1962), yaitu:

a. Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Sistem ekonomi yang mendominasi pada tahap ini yaitu pertanian oleh masyarakat tradisional yang mana cara-cara bertani masyarakat masih tradisional dan relatif primitif serta terbatas. Hal ini disebabkan oleh teknologi, ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Pola pikir masyarakat tradisional lebih mengacu pada tradisi bertani secara turun temurun. (Budiman 1995) mengemukakan bahwa masyarakat tradisional sebagian besar belum banyak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan lebih mempercayai kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan manusia atau hal gaib. Hal itu menyebabkan hasil produksi pertanian menjadi sangat terbatas dan cenderung bersifat statis dan hanya digunakan secara pribadi oleh masyarakat sehingga tidak ada yang diinvestasi. Sementara itu menurut Rostow, apabila terdapat tabungan atau investasi dalam suatu wilayah maka pembangunan dapat tercapai.

b. Pra-Kondisi Lepas Landas (*Pre-Condition for Take Off*)

Pada titik ini, masyarakat mulai berkembang dan dapat dikatakan dinamis, dengan adanya peningkatan investasi akibat campur tangan pihak luar. Masuknya teknologi ke dalam suatu bangsa, sebagai produk sampingan dari dimulainya revolusi industri, menandai perubahan yang sangat dinamis. Dampak dari penyesuaian ini juga melibatkan pengembangan pada sektor pertanian, termasuk beban kerja yang berlebihan di sektor-sektor primer.

Proses perpindahan dari peradaban agraris ke peradaban industri pada dasarnya adalah apa yang dimaksud dengan tahap

kondisi *pra take off*. Selain sektor pertanian yang terus menjadi andalan perekonomian suatu daerah, sektor industri kini mulai berkembang. Tahap ini sangat penting untuk menyiapkan dan melengkapi kondisi pertumbuhan swadaya masyarakat yang digerakkan oleh antusiasme masyarakat pada suatu wilayah. Pada titik ini, perekonomian mulai bergerak dinamis seiring dengan munculnya industri baru, kemajuan teknis, lembaga keuangan resmi yang bertindak sebagai penggerak uang publik, dan investasi skala besar mulai bermunculan. Hal ini tidak lepas dari intervensi dari luar misalnya adanya campur tangan dari masyarakat maju dalam melakukan inovasi guna meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang belum maju mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan pada masyarakat tradisional.

Bentuk intervensi dari masyarakat maju juga dalam bentuk pemberian pemahaman kepada masyarakat tradisional dalam melakukan investasi jangka panjang berupa pendidikan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Rostow yang mana fokus pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada peningkatan dan investasi melainkan pada iklim sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan elemen pendukung pembangunan secara utuh. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat termasuk didalamnya pendidikan masyarakat wilayah tersebut. Melalui pendidikan masyarakat akan memiliki kemampuan dalam menggunakan ilmu pengetahuan modern dan inovasi yang bisa menekan biaya produksi. Selain itu akan muncul masyarakat kreatif dan memiliki jiwa wiraswasta dan dapat menunjang perekonomian suatu wilayah dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain, sehingga kenaikan investasi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya dan tidak bergantung pada kenaikan tingkat tabungan tetapi pada perubahan radikal dalam sikap masyarakat yang mulai terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknik produksi, pengambilan resiko dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut Rostow aspek sosiologis juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut maka sektor pertanian akan lebih maju sehingga terjadi peningkatan investasi. Kemajuan yang terjadi pada sektor pertanian memiliki peranan yang penting sehingga ketersediaan bahan makanan bagi penduduk di pedesaan maupun perkotaan terpenuhi, sehingga dapat meminimalisir impor bahan makanan dari wilayah luar. Selain itu kenaikan produktivitas di sektor pertanian dapat memperluas pasar dari berbagai kegiatan industri yang berdampak pada kenaikan pendapatan petani. Hal ini secara tidak langsung memperluas pasar industri penghasil input pertanian modern seperti mesin-mesin pertanian dan pupuk kimia sehingga hal tersebut dapat menciptakan tabungan yang bisa digunakan pada sektor lain (industri) sehingga dapat meningkatkan investasi pada sektor tersebut.

c. Lepas Landas (*Take Off*)

Tahap ketiga dalam tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow yaitu tahap lepas landas. Tingkat ekspansi ekonomi yang sedang berlangsung menentukan tahap ini. Pada titik ini, pertumbuhan internal yang berkelanjutan yang tidak memerlukan rangsangan eksternal adalah atribut utama dari pertumbuhan ekonomi. Penghapusan hambatan untuk ekspansi ekonomi adalah karakteristik lain dari tahap ini. Pada titik ini, masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti pergolakan politik, munculnya pasar baru, atau pesatnya kemajuan inovasi. Inovasi dan peningkatan investasi di lapangan diproduksi sebagai hasil dari perubahan ini. Peningkatan investasi akan menyebabkan laju pertumbuhan pendapatan negara meningkat bahkan melebihi laju pertumbuhan penduduk sehingga meningkatkan tingkat pendapatan per kapita suatu daerah.

Tahap take-off adalah salah satu tahapan yang menentukan bagaimana komunitas akan berkembang secara keseluruhan. Sebuah revolusi industri yang terkait erat dengan teknik manufaktur sedang terjadi saat ini. Menurut Rostow ciri-ciri suatu negara atau wilayah yang berada pada tahap lepas landas yaitu:

- 1) Investasi produktif meningkat dari 5% atau kurang dari Net National Product (NNP) menjadi 10% dari NNP.
- 2) Perkembangan satu atau lebih sektor industri terjadi dengan sangat cepat.
- 3) Penetapan struktur politik, sosial, dan kelembagaan fundamental yang mampu membawa reformasi yang dibutuhkan untuk pembangunan sektor modern. Pada titik ini dipilih satu atau lebih sektor unggulan, yaitu industri yang pertumbuhannya dapat menarik pertumbuhan industri hilir (industri dengan keterkaitan ke depan) dan dapat mendorong pertumbuhan industri hulu (industri dengan keterkaitan ke belakang).

Menurut Rostow dalam (Sadono 2006) Adapun negara-negara yang pernah mengalami tahapan pertumbuhan ekonomi pada tahap lepas landas yaitu Inggris, Perancis, Belgia, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Rusia, Kanada, Turki, India dan Cina Komunis.

d. Gerakan Menuju Kedewasaan (*The Drive to Maturity*)

Tahapan berikut setelah lepas landas yaitu tahap menuju kedewasaan. Pada tahap ini Rostow tidak menjelaskan secara jelas dan rinci ciri apa yang melatarbelakangi keadaan pada tahap ini. Rostow hanya menjelaskan bahwa tahap lepas landas dan tahap gerakan menuju kedewasaan saling berkaitan. Hal yang menonjol pada tahap ini yaitu munculnya *leading sectors* (sektor pemimpin) seperti pada tahap lepas landas. Sektor pemimpin yang diciptakan oleh setiap negara berbeda-beda misalnya di Inggris sektor pemimpin pada tahap lepas landas yaitu tekstil katun sementara di Amerika Serikat, Perancis dan Jerman yang menjadi sektor pemimpin adalah perkembangan jaringan jalan kereta api. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dipenuhi dalam menciptakan sektor pemimpin yaitu sebagai berikut:

- 1) Muncul kemungkinan bahwa pasar barang-barang yang dibuat oleh kegiatan ekonomi yang berbeda dengan potensi pertumbuhan yang cepat dapat diperluas.
- 2) Industri ini harus mengembangkan metode produksi yang lebih mutakhir dan kapasitas produksi yang dapat diperluas.

- 3) Untuk mendukung perluasan industri unggulan, tabungan harus dihasilkan dalam masyarakat dan pemilik bisnis harus menginvestasikan kembali keuntungan mereka.
- 4) Pengembangan kapasitas dan modernisasi sektor lain harus didorong oleh pertumbuhan dan transformasi teknis industri unggulan.

Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Adapun perubahan penting yang terjadi ketika suatu negara atau wilayah mencapai titik kematangan teknologi yaitu

- 1) Tenaga kerja terdidik menggantikan tenaga kerja yang buta huruf.
 - 2) Mengubah pemilik bisnis dari pekerja keras dan kasar menjadi manajer efektif yang baik hati dan sopan.
 - 3) Industrialisasi masyarakat menjadi membosankan sehingga orang menginginkan lebih banyak perubahan.
- e. Periode Konsumsi Tinggi (*High Consumption Period*)

Menurut W.W. Rostow, tahap konsumsi tinggi menandai berakhirnya teori pertumbuhan ekonomi. Tahap ini dicirikan sebagai tahap di mana masyarakat telah berhasil menerapkan teknologi modern pada sebagian besar proses produksi dan pengelolaan sumber daya alamnya. Saat ini, masyarakat kurang memperhatikan kesulitan produksi dan investasi namun lebih memperhatikan masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya bukan lagi berinvestasi untuk menggenjot produksi. Setelah fase matang, surplus keuangan yang dihasilkan dari proses politik dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan tambahan dana sosial. Pembangunan saat ini merupakan proses berkelanjutan yang dapat mendukung kemajuan yang berkelanjutan (Abraham 1991).

Mengingat pertumbuhan pusat kota sebagai pusat tempat kerja, masa konsumsi tinggi juga ditandai dengan eksodus yang signifikan dari kota ke pinggiran kota. Saat ini, ada tiga jenis tujuan komunitas (tujuan regional/nasional), yaitu:

- 1) Mendapatkan lebih banyak kekuatan dan pengaruh di luar negeri, sebuah tren yang dapat menyebabkan penjajahan negara lain.

- 2) Mendirikan negara kesejahteraan dengan mengupayakan distribusi pendapatan yang lebih adil melalui struktur pajak progresif.
- 3) Memperluas konsumsi masyarakat untuk memasukkan barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang kelas atas selain kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Menurut Rostow, pembangunan atau pertumbuhan ekonomi adalah proses multifaset yang melibatkan perubahan budaya tradisional menjadi peradaban kontemporer. Pembangunan ekonomi kadang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi, adalah suatu proses yang terjadi antara lain oleh:

- 1) Pergeseran fokus organisasi ekonomi, politik, dan sosial dari fokus ke dalam menjadi lebih fokus ke luar.
- 2) Pergeseran opini publik tentang *prevalensi* keluarga dan anak.
- 3) Pergeseran dari melakukan investasi yang tidak produktif (seperti menimbun emas atau membeli rumah) menjadi memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 4) Modifikasi kebiasaan gaya hidup dan sikap yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi (seperti perubahan sikap dari mengabaikan menjadi menghargai waktu).

5.2.4 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Salah satu ide yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu wilayah tumbuh adalah Teori Basis Ekonomi. Menurut Teori Basis Ekonomi Harry W. Richardson, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1973, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah secara langsung terkait dengan permintaan produk dan jasa dari luar wilayah atau daerah. Gagasan ini berpendapat bahwa kapasitas suatu wilayah untuk mengeksport produk atau jasa menentukan seberapa cepat pertumbuhan wilayah tersebut. Permintaan eksternal untuk barang dan jasa yang dihasilkan kawasan untuk ekspor merupakan pendorong fundamental pertumbuhan kawasan atau wilayah. Menurut pemahaman ini, jika salah satu aspek kegiatan ekonomi berubah, misalnya peningkatan

permintaan ekspor, maka output domestik dan keseluruhan kegiatan ekonomi akan berubah lebih signifikan. Hal ini terjadi sebagai akibat perkembangan sektor industri barang ekspor yang meningkatkan pendapatan pekerja industri, yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran mereka. Selain itu, permintaan dari luar daerah berdampak pada tenaga kerja, teknologi, dan modal (Nikijuluw 2013).

Richardson (Adisasmita 2018), berfokus pada penentuan pendapatan dasar. Aliran pendapatan ke suatu wilayah akan meningkat seiring dengan naiknya tingkat aktivitas basis, yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan produk dan jasa di wilayah tersebut dan pada akhirnya meningkatkan jumlah aktivitas non basis (Adisasmita, 2018).

Menurut (Tarigan 2005), berdasarkan teori basis ekonomi, perekonomian wilayah terbagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu:

a. Sektor Basis (Ekspor)

Agar barang dan jasa yang diekspor dapat memberikan pendapatan bagi daerah itu sendiri, maka aktivitas dari sektor basis adalah aktivitas yang mengekspor barang dan jasa ke lokasi di luar batas ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Seluruh perkembangan wilayah atau daerah dipengaruhi oleh kegiatan di sektor basis dan pemekaran sektor tersebut (Arsyad 1999). Mengingat keunggulan kompetitifnya yang besar, maka sektor basis juga berfungsi sebagai fondasi ekonomi lokal (Sjafrizal 2014).

b. Sektor Non Basis (Lokal)

Sektor non basis adalah sektor yang dalam batas-batas ekonomi lokal, menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Karena peran sektor nonbasis sebagai penopang sektor basis, maka pendapatan daerah dapat meningkatkan permintaan terhadapnya. Selain itu, menurut Tarigan (2005), sektor non basis terdiri dari usaha-usaha yang semata-mata melayani kebutuhan mereka yang berada dalam batas ekonomi wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait teori basis ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa industri pada sektor basis merupakan industri yang harus dikembangkan pada suatu wilayah. Hal ini

karena industri pada sektor basis dapat meningkatkan pendapatan suatu wilayah atau daerah melalui kegiatan ekspor sehingga berpengaruh pada kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan.

5.2.5 Teori Dependensi (Teori Ketergantungan)

Ketergantungan adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara atau wilayah lain. Teori ketergantungan (*dependency*) muncul sebagai akibat dari kegagalan teori modernisasi dalam mengembangkan perekonomian negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Teori ketergantungan berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga lebih sering merupakan hasil dari campur tangan dan dominasi negara-negara kaya dalam pembangunan mereka (Afandi et al. 2022).

Dos Santos dalam (Budiman 1995), mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk ketergantungan yaitu:

- a. Ketergantungan Kolonial.
- b. Ketergantungan Finansial-Industrial.
- c. Ketergantungan Teknologis-Industrial.

5.3 Teori Pertumbuhan Wilayah Ditinjau dari Aspek Spasial

Selain aspek sektoral, pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau dari aspek spasial (keruangan). Adapun teori pertumbuhan wilayah yang ditinjau dari aspek spasial dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

5.3.1 Teori Lokasi Terpusat (*Central Place Theory*)

Teori lokasi terpusat (*central place theory*) pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaller (ahli geografi) pada tahun 1933 dan kemudian dikembangkan oleh ahli ekonomi yaitu August Losch (1945). Teori tempat sentral atau teori lokasi terpusat menurut Christaller merupakan pengembangan dari teori perkembangan kota dalam hal ini teori lokasi industri

menurut Alfred Webber (1909). Kota sentral atau lokasi terpusat merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain (Christaller 1933).

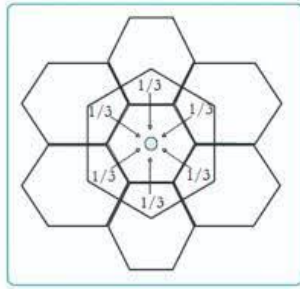
Teori lokasi terpusat menjelaskan tentang suatu lokasi terpusat yang dapat melayani berbagai kebutuhan dalam suatu wilayah yang mana tempat terpusat tersebut menjadi inti dari semua kegiatan pelayanan termasuk dalam hal pelayanan sarana perdagangan (Afrianita, Yurika 2022). Menurut Christaller pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam suatu wilayah berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan tersebut dapat terlihat dengan jelas pada wilayah yang memiliki topografi yang seragam (cenderung datar dan tidak berbukit) dan wilayah dengan kehidupan ekonomi yang homogen (tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama).

Menurut Christaller, teori lokasi terpusat sering digunakan untuk mengkaji pertumbuhan suatu wilayah dari perspektif spasial. Secara khusus, hubungan antara ekonomi dan interaksi spasial, aksesibilitas antara pusat dan perhentian suatu wilayah, dan hambatan interaksi diperiksa untuk menentukan apakah kondisi saat ini konsisten dengan struktur geografis. Konsumsi komoditas sentral yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, penawaran dan permintaan, harga, serta keadaan daerah dan transportasi, inilah yang mendorong berkembangnya lokasi sentral. Adanya saling ketergantungan antar daerah.

Berdasarkan jenis-jenis pusat pelayanan dalam teori lokasi terpusat menurut Christaller, hirarki ruang dalam suatu wilayah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:

a. Tempat Sentral dengan Hierarki 3 ($K=3$) (Pasar)

Pusat pelayanan berupa pasar yang secara konsisten menawarkan barang untuk daerah sekitarnya merupakan lokasi pusat dengan hirarki tiga ($K=3$). Fitur penting dari lokasi pusat, yang secara hirarki tiga adalah bahwa pasar yang ideal tidak hanya memengaruhi wilayah itu sendiri tetapi juga $1/3$ dari wilayah sekitarnya yang berbentuk heksagonal.



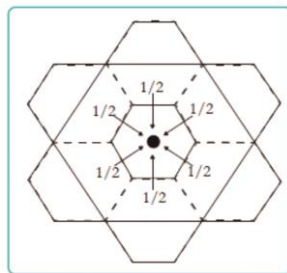
Gambar 5.1 Tempat Sentral Berhierarki 3 ($K=3$)

Sumber : (Daldjoeni 1997)

$K=3$ diperoleh dari penjumlahan kawasan tempat sentral (1) dengan satu pertiga ($1/3$) bagian kawasan yang ada disekelilingnya yang berjumlah 6 (enam) sehingga $K = 6 (1/3) + 1 = 3$ atau ($K=3$). Untuk membangun lokasi pasar ataupun fasilitas umum lainnya harus di kawasan yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap $1/3$ penduduk dari keenam kawasan yang ada disekitarnya.

b. Tempat Sentral dengan Hierarki 4 ($K=4$) (Transportasi)

Lokasi sentral dengan hierarki 4 ($K=4$) adalah lokasi yang menawarkan kondisi lalu lintas terbaik atau rute lalu lintas paling efektif. Kondisi lalu lintas dihitung dengan menjumlahkan area pusat lokasi (1) dengan setengah area sekitarnya, yang dijumlahkan menjadi 6 (enam), maka $K = 6 (1/2) + 1 = 4$ atau ($K = 4$).



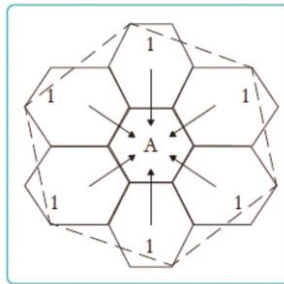
Gambar 5.2 Tempat Sentral Berhierarki 4 ($K=4$)

Sumber : (Daldjoeni 1997)

Pada tempat sentral berhierarki 4 ini misalnya yaitu penempatan lokasi terminal kendaraan yang mana dalam penempatannya sekurang-kurangnya harus memiliki kawasan pengaruh setengah dari enam kawasan tetangganya. Oleh karena itu terminal harus berada pada tempat yang mudah dijangkau oleh para pemakai jasa angkutan yang secara sentral memiliki radius yang relatif sama ke segala arah.

c. Tempat Sentral dengan Hierarki 7 ($K=7$) (Administratif)

Skenario administrasi atau konsep administrasi yang ideal didefinisikan sebagai tempat sentral dengan hirarki 7 (tujuh), yaitu titik pusat yang mempengaruhi semua bagian wilayah sekitarnya. Pusat pemerintahan kota mungkin merupakan jenis skenario administratif yang disebutkan di tempat sentral dari tujuh hierarki. Luas pusat yang berhierarki 7 diperoleh dengan menjumlahkannya dengan satu (1) bagian daerah sekitarnya yang berhierarki 6 sehingga $K=6(1)+1 = 7$, atau ($K=7$).



Gambar 5.3 Tempat Sentral Berhierarki 7 ($K=7$)

Sumber : (Daldjoeni 1997)

Tempat sentral berhierarki tujuh dalam hal ini pusat kegiatan administratif pemerintahan merupakan kawasan yang jangkauannya lebih luas. Kawasan tersebut harus mampu menjangkau dan dijangkau oleh kawasan yang berada di bawah kekuasaannya. Lokasi tempat sentral ini berada di wilayah yang memiliki radius relatif sama dan mudah terjangkau dari semua arah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat dan wilayah dibawahnya.

5.3.2 Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Menurut gagasan Perroux (1950) tentang pusat pertumbuhan, pembangunan daerah harus dicapai dengan investasi industri di pusat-pusat regional. Pertumbuhan akan terjadi di lokasi tertentu yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan, tetapi tidak akan terjadi di semua tempat sekaligus. Pusat pertumbuhan adalah kelompok industri yang dapat mendorong pertumbuhan dinamis dalam ekonomi dan terhubung satu sama lain melalui hubungan input-output dalam industri (Mahi 2016).

Pengembangan pusat pertumbuhan merupakan suatu cara dalam menyelesaikan persoalan pertumbuhan wilayah yang disebabkan oleh keterbatasan dimensi geografis. Pembentukan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah bertujuan untuk mencegah meluasnya kecenderungan sentrifugal dari modal, tenaga kerja, dan keuntungan untuk bermigrasi ke inti wilayah. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi wilayah atau daerah-daerah terbelakang (*pheri-pheri*). Adapun inti dari teori pusat pertumbuhan oleh Perroux (Mahi 2016) yaitu:

- a. Sistem industri terkemuka dan industri pasif yang bergantung pada sistem industri terkemuka membentuk perekonomian.
- b. Seiring berkembangnya suatu wilayah, akan muncul industri unggulan yang akan berperan sebagai penggerak utama pembangunan wilayah tersebut, atau wilayah dimana industri unggulan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan industri terkait.
- c. Karena akan mengubah pola konsumsi daerah, pemusatan industri di satu tempat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu metode yang dapat menggabungkan konsep konsentrasi dan desentralisasi adalah teori pusat pertumbuhan. Selain itu, dengan menggunakan sistem aglomerasi ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan suatu daerah, teori ini dapat menjadi landasan bagi pendekatan kebijakan pembangunan suatu daerah melalui industri daerah.

5.3.3 Teori Agropolitan

Agropolitan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang memadukan antara pembangunan sektor pertanian (sektor basis di pedesaan) dengan sektor industri secara terpusat berkembang di kota-kota tertentu (Mahi 2014) . Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh McDouglass dan Friedman pada tahun 1974 (Mahi 2016) sebagai siasat untuk pengembangan wilayah pedesaan. Dalam pengembangan konsep agropolitan istilah lain yang digunakan oleh Friedman adalah kota di ladang. Hal ini memudahkan petani atau masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan baik pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan sehari-hari sehingga petani dan masyarakat desa tidak perlu ke kota. Pusat pelayanan diberikan pada tingkat desa baik pelayanan mengenai teknik budidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar. Hal tersebut dapat menekan biaya produksi berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, alat produksi dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain sebagainya) dan biaya pemasaran dalam hal ini sarana pemasaran seperti pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan penunjang lain dalam pemasaran.

Pengembangan agropolitan dalam artian yang lebih luas yaitu suatu bentuk pengembangan pedesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota (modern) yang disesuaikan dengan lingkungan pedesaan seperti fasilitas yang terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, akses permodalan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Berdasarkan hal tersebut muncul suatu kawasan agropolitan atau suatu kawasan yang berbasis pada pertanian. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan.

Berikut ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah agar dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan (Mahi 2014):

- a. Memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditas pertanian yang dapat dipasarkan (komoditas unggulan) serta berpotensi
- b. Memiliki prasarana dan sarana agrobisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agrobisnis seperti pasar, jaringan jalan, lembaga keuangan, balai penyuluhan pertanian, dan fasilitas penunjang lain.
- c. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai seperti jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih.
- d. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, swalayan, perpustakaan , dan rekreasi.
- e. Kelestarian lingkungan hidup baik sumber daya alam dan sosial budaya maupun keharmonisan hubungan desa dan kota yang terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, F.M., 1991. *Modernisasi Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Adisasmita, R., 2018. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah : Edisi 2*, Yogyakarta: Expert.
- Afandi, S.A., Afandi, M. & Erdayani, R., 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Afrianita, Yurika, dkk, 2022. Kajian Teori Lokasi Christaller Terhadap Jaringan Pelayanan Sarana Perdagangan di Pulau Karimun Besar. *Jurnal Pelita Kota*, 3 (1), pp.150–161.
- Arsyad, L., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE.
- Azwar, 1962. *Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi : Terjemahan Buku The Stages of Economic Growth W.W Rostow*, Jakarta: Bhatara.
- Budiman, A., 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Christaller, W., 1933. *Central Places in Southern Germany*, Germany.
- Daldjoeni, N., 1997. *Geografi Baru : Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- Mahi, A.K., 2014. *Agropolitan : Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahi, A.K., 2016. *Pengembangan Wilayah : Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nikijuluw, J.B., 2013. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika*, VII(2). Available at: https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_lnk.php?id=640.
- Nugraha, A.P., 2012. Evaluasi Pengembangan Wilayah dalam Meningkatkan Agropolitan di Kabupaten Tabalong (Studi Wilayah Pembangunan Utara). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintah Lokal*, 1 (2), pp.93–106. Available at: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/79>

ew/806.

- Rahayu, E. & Santoso, E.B., 2014. Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Teknik POMITS*, 3 (2). Available at: <https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7296>.
- Richardson, H.W., 1973. *Dasar-Dasar Ilmu Regional : Terjemahan Paul Sitohang Edisi Revisi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sadono, S., 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjafrizal, 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tarigan, R., 2005. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 6

PROSEDUR DAN PROSES PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Ardiyanto Maksimilianus Gai

6.1 Pengertian

Perencanaan wilayah berdasarkan telaah pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis kondisi saat ini, memperkirakan perkembangan berbagai sektor, mengidentifikasi perkiraan faktor pembatas, menentukan tujuan pencapaian dan langkah-langkah yang harus dilakukan serta menentukan lokasi dari aktivitas kegiatan yang dilakukan pada suatu wilayah. Melalui pengertian perencanaan wilayah tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur dan proses perlu diterapkan secara terarah untuk mendapatkan perencanaan yang tepat pada suatu wilayah.

6.1.1 Pemahaman prosedur perencanaan wilayah

Berdasarkan KBBI, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode Langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama (Azhar, 2000). Pengertian lain menyebutkan bahwa prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu (Sugiyono, 2015). Pengertian lain mengenai prosedur, yang diartikan sebagai metode-metode yang dibutuhkan untuk

menangani aktivitas-aktivitas secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu (Djunaidi,2012).

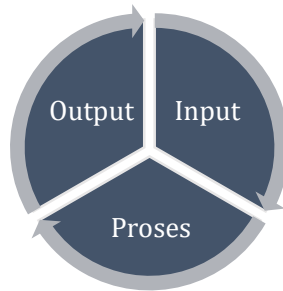
Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka prosedur dapat dianggap sebagai urutan kegiatan yang berurutan, dilakukan sebagai proses yang berurutan hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jika dalam perencanaan wilayah, prosedur dalam perencanaan wilayah dapat diartikan sebagai suatu proses berurutan yang dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana tujuan akan disesuaikan dengan stakeholder terkait, serta potensi suatu wilayah. Karena prosedur dilakukan secara berurutan, maka prosedur dapat dianggap sebagai kegiatan administratif.



Gambar 6.1 Visualisasi Prosedur

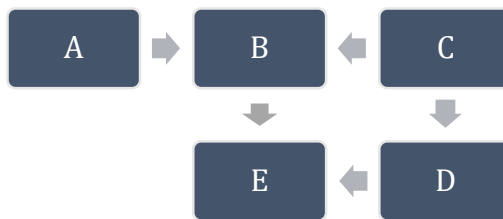
6.1.2 Pemahaman proses perencanaan wilayah

Proses berdasarkan KBBI merupakan runtutan perubahan dari suatu peristiwa dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian tindakan yang menghasilkan suatu produk. Proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus (Hadjisaroso, 1981). Pengertian lain menyebutkan bahwa proses secara sistem merupakan aktivitas teknik dan administratif yang berbaur untuk dijadikan masukan yang ditransformasikan menjadi keluaran (Gibson et al., 2005). Proses berdasarkan pengertian lain adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk mencapai beberapa hasil sehingga sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan (Evans, 2007). Secara tidak langsung, proses merupakan bagian dari prosedur, dimana proses perencanaan dilakukan dalam urutan tahapan dengan menampung aktivitas teknis dan administratif.



Gambar 6.2 Proses dalam Prosedur Perencanaan

Sehingga pada perencanaan wilayah, proses merupakan bagian pelaksanaan prosedur dari perencanaan yang dilakukan pada wilayah tertentu. Pada proses tersebut terjadi rentetan perubahan-perubahan menuju perkembangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dimana pada suatu proses, dipertimbangkan kondisi masa kini untuk mencitrakan kondisi di masa mendatang, serta akan terlihat apa dan bagaimana suatu perencanaan berdampak pada suatu wilayah. Pada suatu proses terdapat tahapan-tahapan yang disusun dari berbagai sumber untuk mendapatkan hasil.



Gambar 6.3 Visualisasi Proses

Perencanaan merupakan rangkaian tindakan kolektif (Friedmann, 1987). Sehingga proses perencanaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan berpikir yang berkesinambungan dengan pertimbangan rasional untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu di masa depan secara sistematis. Sebagai suatu proses yang

berkesinambungan, perencanaan memiliki beberapa implikasi sebagai berikut (Webber, 1963) :

1. Perencanaan tidak mempunyai awal dan akhir yang definitif
Perencanaan merupakan proses terus menerus yang tidak berhenti. Dimana hasil akhir dari suatu proses perencanaan akan menjadi input bagi perencanaan lain di masa berikutnya. Kondisi wilayah yang bersifat dinamis, dimana perkembangan selalu terjadi dan perencanaan harus menjadi adaptif untuk diimplementasikan. Sehingga dalam perencanaan harus ada kemampuan implementasi yang adaptif yang diimbangi dengan kemampuan evaluasi sebagai bentuk siklus yang berulang.
2. Perencanaan akan berlangsung terus menerus untuk menyelesaikan masalah sesuai kondisi dan tantangan
Permasalahan-permasalahan pada suatu wilayah akan muncul seiring dengan perkembangan zaman, sehingga akan mengakibatkan ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana yang telah disusun. Disini peran perencanaan penting.
3. Perencanaan akan selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat maupun sumber daya lainnya
Perencanaan memanfaatkan informasi dari sumber daya yang ada untuk mengestimasi pengembangan suatu wilayah, baik sumber daya sosial hingga sumber daya alam. Sehingga, evaluasi terus menerus akan diperlukan seiring dengan perkembangan sumber daya tersebut.

6.1.3 Skala wilayah terhadap prosedur dan proses perencanaan wilayah

Wilayah yang direncanakan pada suatu proses perencanaan berbeda-beda. Ada wilayah skala perkotaan, kota atau kabupaten, skala provinsi maupun skala nasional. Dimana perbedaan tingkatan wilayah akan memberikan pengaruh pada proses serta prosedur dalam merencanakan perkembangan wilayah.

Berdasarkan skala wilayah, maka setiap wilayah akan memiliki peran berbeda. Perbedaan skala wilayah akan mempengaruhi bagaimana prosedur perencanaan dijalankan. Peran wilayah berskala nasional akan menjadi panduan bagi wilayah dibawahnya, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Peran wilayah berskala provinsi akan menjadi panduan bagi kabupaten atau kota. Peran wilayah yang berskala kota atau kabupaten akan menjadi panduan bagi pembangunan daerah pada skala kecamatan, kelurahan dan desa.

Pada dasarnya dalam perencanaan wilayah, baik skala provinsi maupun skala kabupaten atau kota, terdapat sifat mendasar yang harus diterapkan, antara lain :

1. Siklik, dimana perencanaan terus berulang dalam suatu rangkaian.
2. Terpadu, dimana dengan banyaknya keragaman sektor dan kegiatan, seluruhnya harus terintegrasi.
3. Spontan, dimana tahapan perencanaan tidak selalu berurutan karena kadang ada intervensi antar siklus ataupun hambatan yang mengganggu jalannya tahapan kegiatan, sehingga proses perencanaan harus segera disesuaikan dengan kondisi yang terbaru.

Perencana wilayah memanfaatkan proses perencanaan untuk menyusun perencanaan komprehensif. Dimana komprehensif merupakan bentuk pemahaman perencana terhadap seluruh sektor yang ada di dalam suatu wilayah. Hal ini akan melibatkan banyak individu maupun golongan dari berbagai sektor dan kepentingan.

6.2 Kegunaan

Proses perencanaan penting dilakukan, karena pada proses tersebut terdapat pertimbangan pada kondisi di masa kini yang diproyeksikan untuk masa depan. Selain itu, proses perencanaan perlu dipahami oleh perencana wilayah, karena proses perencanaan harus dilakukan sejak suatu wilayah sudah menjadi objek perencanaan.

Keterlibatan seluruh aspek pembangunan, baik dari individu masyarakat dan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

juga diperlukan dalam proses perencanaan. Hal ini diperlukan, karena perencanaan suatu wilayah akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Seluruh aspek dan sektor yang dipertimbangkan dalam proses perencanaan, merupakan aspek dan sektor yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan OPD hingga pihak swasta dalam keseharian.

Selain untuk kepentingan tersebut, proses perencanaan juga akan mengakomodir perencanaan-perencanaan lain yang berhubungan dengan wilayah perencanaan. Termasuk perencanaan lintas daerah, lintas sektor, lintas OPD hingga lintas negara. Sehingga, melalui proses perencanaan, seluruh komponen perencanaan dapat ditampung untuk kemudian dianalisa dan disintesa sesuai dengan kebutuhan pengembangan pada suatu wilayah hingga kurun waktu tertentu.

6.3 Model Proses Perencanaan Wilayah

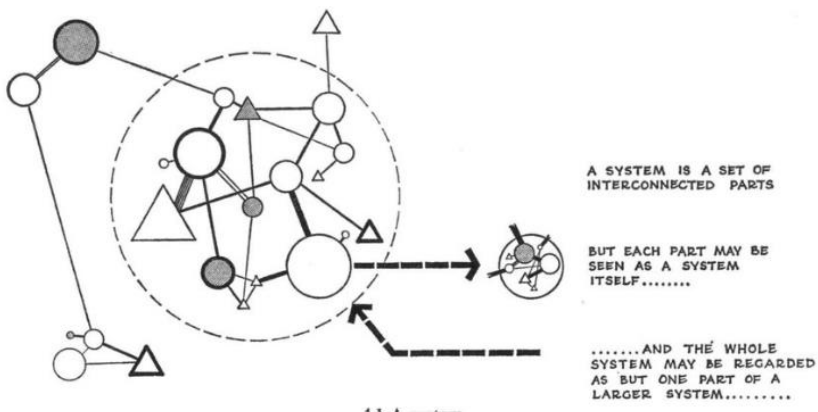
Patrick Geddes, merupakan salah satu pelopor bahwa perencanaan merupakan rangkaian dari sebuah proses. Dimana Patrick Geddes memperkenalkan proses perencanaan sebagai rangkaian survei, analisis dan rencana dan dikenal dengan *the classical planning process* (Tyrwhitt, 1956). Proses perencanaan klasik yang diterapkan oleh Patrick Geddes berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Frederic Le Play. Survei merupakan tahapan pengumpulan data dan informasi, sedangkan analisis merupakan pengolahan dan interpretasi data serta informasi untuk menghasilkan landasan pertimbangan perencanaan dan pemecahan masalah. Adapun rencana merupakan sintesis dari hasil analisis tersebut.

Data yang telah diperoleh melewati proses analisis terlebih dahulu hingga hasil akhir merupakan sintesis antara kondisi lapangan (data) dan kajian ilmiah. Hal ini serupa dengan makna proses menurut definisi sebelumnya, yaitu input, proses, dan output. Terapan dari diagram proses perencanaan klasik menunjukkan bahwa data yang diperoleh melalui tahapan survei kemudian diolah menjadi rencana melalui sebuah proses analisis.



Gambar 6.4 Bagan Proses Perencanaan Klasik

Pendapat lain menyatakan bahwa proses perencanaan dapat dipandang sebagai suatu proses sistemis. Setiap sistem dirangkai oleh subsistem subsistem yang lebih kecil. Selain itu, sistem-sistem bergabung dan membentuk sistem yang lebih besar. Perencanaan merupakan suatu sistem komprehensif yang beranggotakan sistem-sistem, mulai yang terbesar hingga yang terkecil, yang saling berinteraksi antara satu dan yang lainnya (McLoughlin, 1969). Misalnya, dalam merencanakan ruang wilayah suatu kota, seorang perencana harus membaginya dalam subsistem guna lahan, subsistem kependudukan, subsistem ekonomi, dan subsistem kelembagaan.



Gambar 6.5 Sistem Menurut McLoughlin
(Sumber : McLoughlin, 1969)

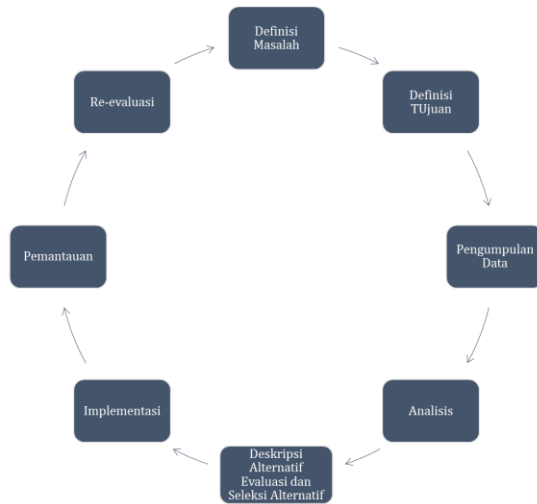
Suatu model proses perencanaan menyatakan bahwa perencanaan membutuhkan kerangka organisasi dalam implementasinya agar dapat dilakukan secara spesifik dan efisien. Walaupun perencanaan merumuskan hal yang

komprehensif, pelaksanaannya harus dilakukan secara sektoral agar tujuan pelaksanaannya dapat tepat dan efektif (Conyer dan Hills, 1984).

Perencanaan merupakan metode, yaitu tujuannya harus disusun secara spesifik dan mengacu pada hasil yang jelas di kemudian hari. Conyer juga menekankan pentingnya memformulasi sasaran dan urgensi pengumpulan serta analisis data untuk memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik akan diperoleh dengan identifikasi alternatif yang paling representatif dari seluruh alternatif tindakan, yang ditunjukkan dengan pemberian penilaian bagi setiap alternatif, kemudian diseleksi berdasarkan penilaian tersebut. Lebih dari semua itu, Conyer menekankan pentingnya implementasi, yang urgensinya sama dengan seluruh proses rencana yang telah disusun. Setelah implementasi, hal yang masih dipandang perlu adalah pemantauan dan evaluasi untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan rencana yang telah disusun.

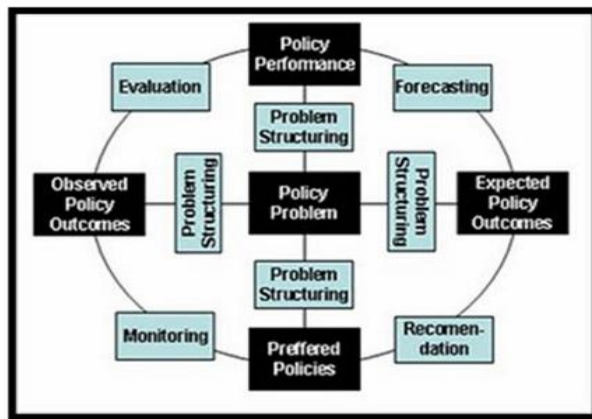
Pendapat lain menyatakan bahwa suatu permasalahan harus dibahas lebih rinci melalui verifikasi, redefinisi, dan perincian persoalan. Perincian diperlukan dalam mengembangkan setiap tahapan perencanaan. Selain itu, pengembangan kriteria evaluasi sebelum rencana diimplementasikan juga diperlukan (Patton, 1968).

Tahapan terperinci pada suatu siklus proses perencanaan banyak digunakan pada perencanaan modern. Tahapan-tahapan tersebut terdiri atas pendefinisian masalah, perumusan tujuan dan sasaran, pengumpulan data, analisis, deskripsi alternatif, evaluasi dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan, serta evaluasi (Moore, 1988).



Gambar 6.6 Proses Perencanaan Menurut Terry Moore

Sedangkan pernyataan lain menyebutkan perlunya memandang perencanaan sebagai suatu proses analisis kebijakan publik. Proses ini meliputi perumusan persoalan, peramalan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi (Dunn, 2003).

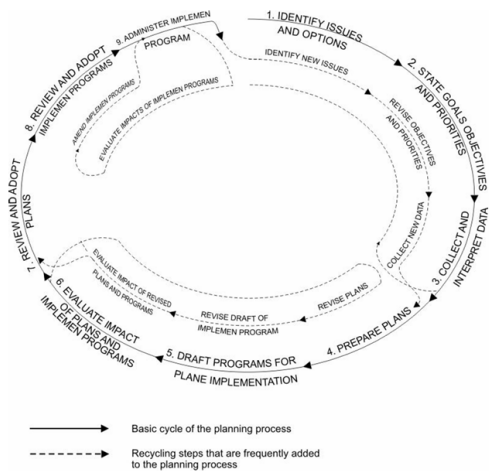


Gambar 6.7 Diagram Analisis Kebijakan Publik William Dunn
(Sumber : Dunn, 2003)

Berdasarkan model-model proses perencanaan diatas, menunjukkan bahwa proses perencanaan akan dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan pengembangan. Untuk itu, diperlukan intuisi yang kuat dari perencana wilayah untuk menentukan model yang tepat sehingga dapat mengakomodir sifat-sifat dalam proses perencanaan.

6.4 Langkah-langkah Perencanaan Wilayah

Beberapa tahapan perencanaan dapat dan harus dilakukan secara bersamaan. Langkah-langkah yang beragam ini sangat interaktif, yaitu antara tahap yang satu dan yang lainnya perlu harmonis. Apabila terdapat ketidakcocokan, langkah-langkah sebelumnya perlu mengalami penyesuaian (Anderson, 1995). Hal ini tertuang dalam siklus perencanaan berikut :



Gambar 6.8 Tahapan Perencanaan
(Sumber : Anderson, 1995)

- 1. Identifikasi Permasalahan
Permasalahan suatu wilayah perlu diidentifikasi untuk didapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Proses identifikasi tersebut masuk dalam proses perencanaan.

Dimana proses perencanaan akan mampu memunculkan isu dari kondisi permasalahan yang ada saat ini serta memperkirakan permasalahan yang muncul di masa mendatang. Selain itu, identifikasi permasalahan juga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi wilayah tersebut.

2. Rumuskan Tujuan dan Prioritas Pengembangan

Perumusan tujuan diperlukan sebagai target capaian yang diharapkan pada kurun waktu tertentu. Perumusan tujuan disusun berdasarkan identifikasi permasalahan di awal. Nantinya dari tujuan tersebut, akan dibuat sasaran-sasaran yang dapat menjadi langkah-langkah dalam mencapai tujuan.

Pada sasaran yang ingin dicapai, harus dikaji mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sasaran. Sehingga ketercapaian sasaran dapat terukur dan teridentifikasi dengan tepat. Pertimbangan yang terukur ini kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memunculkan prioritas-prioritas pengembangan dalam mencapai tujuan.

3. Pengumpulan dan Interpretasi Data

Data yang diperlukan dalam proses perencanaan merupakan turunan dari sasaran yang sudah disusun. Dimana dari sasaran tersebut, akan muncul parameter yang akan digunakan untuk menentukan data yang diperlukan untuk dianalisa dalam proses selanjutnya.

Data yang ada, akan diinterpretasi sebagai bentuk gambaran dari kondisi wilayah saat ini. Selain itu dari interpretasi akan muncul visualisasi logis yang metodis dari data-data yang dikumpulkan.

4. Analisa Data

Pada tahapan analisis, dilakukan perincian objek yang direncanakan kemudian dilakukan sintesa berpikir dengan penggabungan dan pengombinasian hasil analisis objek perencanaan sehingga didapatkan pemahaman konteks secara utuh. Dimana konteks yang ada termasuk variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perencana wilayah. Analisis harus

diiringi dengan sintesis dikarenakan dua kegiatan ini adalah kegiatan saling melengkapi untuk menyusun konsep rencana di suatu wilayah.

5. Rancangan Program Implementasi Rencana

Program yang disusun sebagai rencana akan menggabungkan pertimbangan dari berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga program implementasi rencana harus mampu dipahami oleh seluruh pihak. Program implementasi yang akan direncanakan dapat berupa kategori peraturan daerah terkait penggunaan lahan, ulasan hasil kajian dan perencanaan lainnya, program implementasi untuk pelayanan publik dan bangunan-bangunan yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

6. Evaluasi Dampak Program Implementasi Rencana

Pada implementasi rencana, perlu dilihat beberapa dampak dari implementasi rencana yang disusun. Bentuk dampak yang dapat dilihat antara lain dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak finansial daerah dan dampak sosial masyarakat.

7. Telaah dan Adaptasi Rencana

Nantinya dokumen rencana yang disusun akan menjadi keputusan pemerintah sebagai komitmen untuk tindakan di masa mendatang. Langkah ini harus diikuti dengan proses sosialisasi pada masyarakat. Proses perencanaan harus dipahami oleh seluruh pihak, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga individu masyarakat. Sehingga nantinya selain tujuan perencanaan, program implementasi dan dampak perencanaan juga dipahami oleh seluruh stakeholder.

8. Telaah dan Adaptasi Implementasi Program

Setelah dipahami oleh seluruh stakeholder, maka implementasi program akan diadopsi. Dimana pada proses berjalannya perencanaan tersebut, akan terus berlangsung proses sosialisasi agar sinergitas antara pemerintah dan masyarakat akan terus dapat berkesinambungan.

9. Pengelolaan dan Evaluasi Implementasi Program

Pelaksanaan implementasi program akan diawasi oleh masyarakat, dan dari pengawasan tersebut akan ada

tanggapan balik dari masyarakat. Tanggapan ini diperlukan sebagai bentuk perbaikan atau evaluasi dalam pelaksanaan program.

Bentuk tahapan lain dalam proses perencanaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut (Tarigan, 2004) :

- a. Identifikasi gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan (baik jangka pendek, menengah, maupun panjang). Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi diperlukan pengumpulan data terlebih dahulu (data primer dan sekunder) serta ciri khas kawasan;
- b. Penetapan visi, misi, dan tujuan umum serta tujuan kebijakan strategis;
- c. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan dihadapi pada masa mendatang;
- d. Memproyeksikan berbagai variabel terkait, baik yang dapat dikendalikan maupun yang di luar jangkauan pengendalian perencanaan;
- e. Penetapan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (berupa tujuan yang dapat diukur);
- f. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut (dengan memperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia);
- g. Pemilihan alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan;
- h. Penetapan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Penyusunan kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada proses perencanaan, poin penting yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Akomodir aspirasi dan partisipasi publik. Aspirasi dan partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa tahap yang nantinya akan berpengaruh secara keseluruhan pada proses perencanaan.

2. Tahapan proses perencanaan ada yang perlu dilakukan beriringan dan ada yang perlu dilakukan secara berurutan. Hal ini bergantung pada kondisi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan aspek lain di wilayah perencanaan.
3. Pengkajian ulang dalam setiap tahap perencanaan. Jika ada tahapan yang sudah terselesaikan, maka perlu ditinjau kembali tahapan yang dilakukan sebelumnya untuk dikaji ulang dan diperbaiki sesuai pembaharuan.

Sehingga, dari beberapa definisi dan langkah-langkah perencanaan tersebut, secara ringkas, proses perencanaan dapat dilakukan dengan :

1. Persiapan penyusunan. Identifikasi kondisi wilayah, pengumpulan data dan interpretasi;
2. Penyusunan rancangan awal. Analisis, sintesis dan penyusunan tujuan strategis dan sasaran;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan musyawarah. Konsultasi publik dengan stakeholder terkait perencanaan pada wilayah tersebut;
5. Perumusan rancangan akhir. Evaluasi rancangan dari hasil konsultasi publik;
6. Penetapan. Perumusan perencanaan menjadi ketetapan hukum.

6.5 Peran Daerah dalam Proses Perencanaan Wilayah

Peran daerah dalam perencanaan wilayah sangat penting dan strategis. Daerah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, kebutuhan, dan potensi wilayah mereka. Berikut adalah beberapa peran utama daerah dalam perencanaan wilayah:

- a. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Wilayah: Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, masalah, dan potensi yang ada di wilayah mereka. Mereka dapat melakukan analisis yang mendalam terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur yang unik bagi wilayah mereka. Dengan demikian, daerah dapat berperan dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan

dan peluang pengembangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah mereka.

- b. **Penyusunan Rencana Wilayah:** Daerah memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana wilayah yang komprehensif dan terarah. Rencana wilayah ini mencakup visi jangka panjang, tujuan pembangunan, kebijakan, strategi, dan tindakan konkret untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, mengelola sumber daya alam, membangun infrastruktur, serta mengembangkan sektor ekonomi dan sosial wilayah. Rencana wilayah ini harus berdasarkan analisis yang mendalam dan melibatkan partisipasi publik.
- c. **Pengaturan dan Pengawasan Pembangunan:** Daerah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pembangunan wilayah. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan izin dan regulasi terkait penggunaan lahan, perencanaan tata ruang, lingkungan, serta pembangunan infrastruktur. Daerah juga berperan dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan pembangunan wilayah agar sesuai dengan rencana wilayah yang telah disusun.
- d. **Kolaborasi dan Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Daerah berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, masyarakat, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya. Mereka perlu melakukan kolaborasi dan koordinasi yang baik untuk memastikan implementasi yang efektif dari rencana wilayah. Daerah juga dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam melibatkan partisipasi publik, mendapatkan dukungan finansial, dan memperkuat kapasitas pelaksanaan perencanaan wilayah.
- e. **Monitoring dan Evaluasi:** Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana wilayah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana wilayah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana wilayah di masa mendatang.

Melalui peran-peran tersebut, daerah dapat menjadi aktor utama dalam perencanaan wilayah yang berkelanjutan, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah mereka.

6.6 Kendala dalam Proses Perencanaan Wilayah

Pada proses perencanaan wilayah, ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Berikut adalah beberapa kendala umum yang dapat muncul dalam proses perencanaan wilayah :

1. Kompleksitas Masalah

Perencanaan wilayah melibatkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain. Kompleksitas masalah ini membuat proses perencanaan menjadi sulit, karena memerlukan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat diatasi dengan penentuan skala prioritas terhadap penyelesaian masalah. Dengan didukung ketersediaan waktu yang cukup, serta kemampuan mengolah strategi agar permasalahan teratasi, seharusnya kompleksitas ini akan menjadi kekuatan dalam perencanaan wilayah.

2. Perspektif dan Kepentingan yang Beragam

Setiap pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda dalam perencanaan wilayah. Adanya perbedaan ini bisa menyulitkan proses pengambilan keputusan dan mencapai konsensus. Panduan yang terpenting dalam mengatasi hal ini adalah menghitung seberapa besar perbandingan kebaikan dan keburukan yang didapat untuk masyarakat.

3. Sumber Daya Terbatas

Perencanaan wilayah sering kali membutuhkan sumber daya finansial, manusia, dan teknis yang cukup besar. Terbatasnya sumber daya ini dapat menjadi kendala dalam melakukan analisis yang mendalam, melakukan kajian yang lengkap, dan mengimplementasikan rencana dengan efektif. Hal ini harus menjadi poin pertimbangan dari pemerintah daerah maupun para perencana wilayah. Dimana, kesesuaian kemampuan

daerah patut dipertimbangkan dalam menyusun suatu perencanaan. Sehingga rencana yang disusun akan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya daerah.

4. Kurangnya Data dan Informasi yang Tersedia

Perencanaan wilayah yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat, terkini, dan lengkap. Namun, seringkali data dan informasi ini sulit didapatkan atau tidak memadai, terutama di daerah yang kurang berkembang atau sulit diakses. Kurangnya data dan informasi yang tersedia dapat mempengaruhi kualitas perencanaan wilayah. Untuk itu, dengan kondisi khusus pada beberapa daerah dengan data dan informasi minim, perlu adanya identifikasi terkait data sebelum pelaksanaan rencana. Kesiapan para perencana wilayah untuk siap mengakomodir kepentingan data tersebut sangat diperlukan.

5. Konflik Sosial

Proses perencanaan wilayah dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Konflik dan ketegangan antara kelompok masyarakat, sektor swasta, atau bahkan dalam pemerintahan sendiri dapat menghambat proses perencanaan dan implementasi rencana. Disinilah peran konsultasi publik menjadi penting. Selain itu, permasalahan ini juga akan menjadi bahan evaluasi perencanaan yang akan dilakukan pada jangka waktu yang berikutnya.

6. Perubahan Keadaan dan Ketidakpastian

Perubahan keadaan seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan dapat mempengaruhi proses perencanaan wilayah. Ketidakpastian dalam faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan rencana yang telah dibuat menjadi tidak relevan atau tidak efektif. Sehingga, peran perencana wilayah adalah memahami kondisi terkini sehingga dapat memperbaharui perencanaan yang disusun.

7. Keterbatasan Koordinasi Antar Instansi

Proses perencanaan wilayah melibatkan berbagai instansi pemerintah, termasuk tingkat lokal, regional, dan nasional. Keterbatasan koordinasi dan sinergi antar instansi dapat

menghambat proses perencanaan dan mengurangi efektivitas implementasi rencana. Sehingga, integrasi antar instansi harus terfasilitasi dengan baik. Selain itu, bentuk dukungan antar instansi juga harus dioptimalkan, misalnya dalam bentuk sokongan informasi dan data, agar perencanaan yang komprehensif dapat terwujud.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi, membangun kapasitas, dan menggunakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam proses perencanaan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. 1995. *Guidelines for Preparing Urban Plans*. Washington DC: APA Planners Press.
- Azhar. 2000. *Prosedur Definisi*. Jakarta:Alfabeta.
- Ballater Geddes Project. 2004. "*Picture of Patrick Geddes*." (<http://www.ballaterscotland.com/geddes/geddesdir.htm>), diakses pada Mei 2023.
- Conyer, Diana and Peter Hill. 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley and Sons Ltd.
- Djunaidi Achmad. 2012. *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Evans, James and Lindsay William. 2007. *Six Sigma An Introduction To Six Sigma And Process Improvement*. Jakarta: Salemba Empat
- Friedmann, J. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Gibson, James et al.2005. *Organization : Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Hadjisaroso, Poernomo. 1981. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.
- Hudalah, Delik. 2010. *Pengantar Proses Perencanaan*. Bandung
- McLoughlin, J. B. 1969. *Urban & Regional Planning: A systems approach*. Faber and Faber.
- Moore, Terry. 1988. *Planning without Preliminaries*. Journal of the American Planning Association, 54:4, 525-528, DOI: 10.1080/01944368808976679

- Muta'ali Lutfi. 2011. *Kapita Selekta Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Patton C. dan, Sawicki, D. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall (Eaglewood Cliff).
- Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun, dan Panuju Dyah R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Crestpent Press Dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan. Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tyrwhitt, J. 1956. *Geddesian Model of Planning Process dalam Roger W. Caves (editor) Encyclopedia of The City*. New York :Routledge.
- Webber, M.M. 1963. *The prospects for policies planning*, in: Duhl, op. cit., Part 4, pp. 319-30

BAB 7

PERMASALAHAN DI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Akhmad Andi Saputra

7.1 Pendahuluan

Perencanaan Wilayah pada kenyataannya menemui banyak permasalahan, tidak hanya dari ruang fisik (permasalahan pertanahan, penggunaan lahan) yang akan dijadikan sebagai objek kegiatan proyek atau program tapi juga menyangkut kebijakan atau dokumen perencanaan tata ruang itu sendiri yang harus terkontrol atau sesuai dengan program pembangunan dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/Kota maupun propinsi. Pada aspek permasalahan pertanahan, terkadang perencana wilayah tidak memperhatikan aspek tersebut (status kepemilikan tanah, analisis fakta wilayah), sehingga rencana yang disusun tidak dapat mengantisipasi persoalan pertanahan ditahap penataan ruang, akibatnya dalam tahap pemanfaatan ruang sering menemui kendala. Hak atas tanah di masyarakat memiliki dimensi kompleks, apabila proses penyediaan tanah (pengadaan tanah atau pembebasan tanah) untuk pembangunan sering mengalami kendala.

Permasalahan lain yang dibidang perencanaan wilayah yaitu penggunaan data. Adanya perbedaan sistem proyeksi peta dan sistem koordinatnya antar instansi pembuat peta maupun antara instansi pembuat peta dengan pihak pengguna. Selain itu, klasifikasi data yang dimuat dalam peta serta ketelitian peta (skala peta) tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna peta. Ketidakesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah juga menjadi kendala, beberapa faktor yang

menyebabkan ketidaksesuaian tersebut meliputi belum adanya regulasi atau aturan terkait penggunaan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam penyusunan program pembangunan wilayah, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dokumen rencana tata ruang belum merata (belum merambah ke Pemerintah Desa atau Kelurahan), kualitas rencana yang kurang sesuai dengan keadaan dilapangan, terdapat lebih dari satu jenis dokumen rencana tata ruang, kualitas aparat dan kelembagaan juga berpengaruh dalam penggunaan rencana tata ruang, aparat perlu memiliki kemampuan dalam hal fungsional perencanaan, berkomunikasi dan berkoordinasi dalam perencanaan program pembangunan, pengambilan keputusan dan pengorganisasian informasi.

Selain penjelasan diatas, juga terdapat permasalahan lain yaitu permasalahan mikro, permasalahan makro, permasalahan sistem transportasi, permasalahan penyediaan prasarana dan permasalahan pada sistem pembiayaan pembangunan. Permasalahan mikro berkaitan dengan kegiatan teknis proyek, ditinjau dari sudut pandang pengelola maupun dari sudut pandang pemberi izin proyek. Sedangkan permasalahan makro yaitu permasalahan yang terkait dengan pemerintah, dimana proyek dikaitkan dengan program pemerintah secara keseluruhan (makro) meliputi tugas pemeriksaan atau pengawasan kebenaran gagasan yang terkait dengan analisis ekonomi, dampak lingkungan dan sikap sosial masyarakat. Untuk menyusun dokumen rencana tata ruang seorang perencana wilayah perlu melihat sistem transportasi dan penyediaan prasarana yang ada pada lokasi program (efisiensi), hal tersebut menjadi pertimbangan agar rencana tata ruang yang disusun tidak menimbulkan permasalahan lain seperti penumpukan kegiatan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Program atau proyek jelas memerlukan biaya yang seringkali melampaui kemampuan dana pemerintah yang tersedia. Oleh sebab itu perlu diberi skala prioritas. Namun jika belum sampai pada keputusan akhir, perencana wilayah harus mengetahui tentang sistem pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan

jenis proyek yang disusulkan harus disesuaikan dengan sumber dana yang akan membiayai proyek tersebut.

7.2 Persoalan Pertanahan

Administrasi pertanahan terkait erat dengan kegiatan penataan ruang dalam tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Akan tetapi dalam setiap tahapan penataan ruang tersebut masih ditemui kelemahan dalam kaitannya dengan aspek pertanahan. Misalnya dalam tahap proses perencanaan tata ruang tidak mengkaji aspek pertanahan secara detail untuk menjadi landasan penyusunan rencana tata ruang. Data status kepemilikan tanah sering diabaikan di dalam proses analisis fakta wilayah. Fakta wilayah sebagai titik tolak rencana kurang lengkap sehingga rencana yang disusun tidak dapat mengantisipasi kemungkinan persoalan pertanahan ditahap penataan ruang berikutnya. Akibatnya, didalam tahap pemanfaatan ruang sering menemui kendala didalam pelaksanaannya (Sadyohutomo, 2006).

Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang erat kaitannya dengan kegiatan pengembangan tanah (*land development*). Salah satu syarat bagi setiap pihak (pengguna atau pengembang tanah) yang akan menggunakan tanah dalam rangka pengembangan pemanfaatannya adalah harus sudah menguasai bidang tanah tersebut (kesesuaian kondisi fisik tanah dengan rencana penggunaan tanahnya / *land suitability*) dan kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan rencana tata ruang).

Pada kenyataannya, setiap jengkal tanah di muka bumi ini sudah melekat hak atas tanah sedangkan pihak yang akan melakukan pengembangan tanah (swasta dan pemerintah) belum memiliki hak atas tanah yang akan dibangun. Oleh karena itu, pengembangan tanah sesuai rencana dengan rencana tata ruang hampir selalu diawali dengan proses peralihan hak atas. Pada kenyataannya, proses penyediaan tanah untuk bisa dibangun berfokus pada nilai ekonomi tanah di mana calon pengguna tanah percaya dengan kekuatan uangnya akan selalu berhasil dalam penyediaan tanah.

Padahal hak atas tanah dimasyarakat memiliki dimensi kompleks (ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) sehingga tidak heran bila proses penyediaan tanah untuk pembangunan sering mengalami kendala. Kendala sering terjadi pada proses pengadaan tanah (umum) daripada yang terjadi pada proses pembebasan tanah (swasta). Hal ini disebabkan karena besarnya ganti rugi pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah dibatasi rambu-rambu yang dianggap tidak merugikan negara. Misalnya, ganti rugi tanah yang diberikan kepada pemilik tanah diatas kewajaran dengan maksud demi keberhasilan proses pengadaan tanah maka tim pengadaan tanah akan dikenai ancaman pidana korupsi. Lain halnya pembebasan tanah oleh pihak swasta, nilai ganti ruginya tidak ada urusan dengan pemerintah dan semata-mata terkait dengan pertimbangan ekonomi swasta.

Pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang, administrasi pertanahan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu instrumen pengendalian. Pengendalian pemanfaatan ruang hanya mengandalkan instrumen peraturan perundangan tata ruang. Peraturan perundangan tata ruang (*land use control*) dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang paling mudah aplikasinya adalah dalam bentuk perizinan meliputi izin lokasi (swasta) atau penetapan lokasi (umum), IMB, AMDAL, izin gangguan dan sebagainya. Sedangkan instrumen layanan publik, baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat layanan prasarana belum dimanfaatkan untuk instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Didalam aplikasi kedua instrumen tersebut perlu dibarengi dengan penggunaan strategi insentif dan disinsentif.

Layanan administrasi pertanahan merupakan salah satu bentuk layanan administrasi pemerintah maka dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Layanan tersebut mencakup pertimbangan teknis dalam pemberian izin lokasi, pemberian hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, perubahan penggunaan tanah, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan sebagainya, yang semuanya itu mengacu pada ketentuan tata ruang. Pada praktiknya dimasa lalu

selain proses pelaksanaan penataan ruang belum sepenuhnya mengaitkan dengan aspek pertanahan, layanan pertanahan belum sepenuhnya terpadu dengan proses penataan ruang. Demikian pula penggunaan strategi insentif – dis-insentif dalam layanan administrasi pertanahan yang terkait penatan ruang masih belum nampak.

Dari penjelasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa aspek pertanahan masih sering diabaikan di dalam proses penataan ruang. Akibatnya, aplikasi rencana tata ruang yang telah disusun susah payah hingga menjadi peraturan daerah sering menemui kendala, terutama didalam penyediaan tanah dan pemanfaatan tanah sesuai tata ruang.

7.3 Permasalahan Dalam Penggunaan Data

Inventarisasi sumber daya tanah diawali dengan memanfaatkandata dan peta baku yang ada, kemudian dilanjutkan kegiatan survei dan pemetaan tanah secara sistematis dan berkelanjutan. Peta baku yang ada, misalnya peta topografi TNI AD, peta Rupa Bumi Indonesia, dan peta citra satelit digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka inventarisasi sumber daya tanah . Selanjutnya dilakukan analisa data dan peta menghasilkan fakta sumber daya tanah yang lebih bermakna. Jenis data yang dihasilkan antara lain : peta dasar pendaftaran tanah,peta bidang (persil) tanah,peta penggunaan dan data pemanfaatan tanah, peta kemampuan tanah, peta pola pemilikan dan penguasaan tanah, peta pola harga tanah, peta infrastruktur wilayah dan tempat-tempat penting, peta indikasi tanah terlantar dan kritis dan peta tematik pendukung lainnya.

Inventarisasi data dan peta harus dilakukan terus menerus agar datanya *up to date*. Fakta sumber daya tanah yang dihasilkan selain digunakan untuk kegiatan intern pelayanan pertanahan juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lintas sektor atau instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Terkait dengan pelaksanaan penataan ruang, fakta sumber daya tanah dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam proses penyusunan

rencana tata ruang wilayah. Selain itu, fakta tersebut dapat digunakan untuk kegiatan *monitoring* pemanfaatan ruang sekaligus menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang, serta evaluasi terhadap rencana tata ruang.

Permasalahan penggunaan data lintas instansi adalah adanya perbedaan sistem proyeksi peta dan sistem koordinatnya antar instansi pembuat peta maupun antar instansi pembuat peta dengan pihak pengguna. Selain itu, klasifikasi data yang dimuat dalam peta serta ketelitian peta (skala peta) tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna peta. Oleh karena itu perlu pembakuan sistem pemetaan sumber daya yang berlaku mengikat secara nasional dan sejalan dengan standar internasional (Sadyohutomo, 2006).

7.4 Ketidaksesuaian Program Pembangunan Dan Rencana Tata Ruang

Dalam menyusun program pembangunan harus memanfaatkan rencana tata ruang (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pasal 34 ayat 1c). Nusi (1994) menyatakan saat ini rencana tata ruang belum terkait dengan sistem pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga kurang operasional dalam penerapannya, sebagai akibatnya rencana tata ruang kurang diperhatikan dalam Forum Rapat Koordinasi Pembangunan. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa, rencana tata ruang kurang dijabarkan ke dalam rencana program pembangunan tahunan yang dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Pembangunan. Akibatnya ada program yang sesuai dengan rencana tata ruang dan ada program yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuai atau tidaknya usulan program yang dibahas dalam forum dengan rencana tata ruang ditentukan oleh kesesuaian lokasi program dengan rencana tata ruang (Oetomo, 1998).

Program pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan menimbulkan ketidak konsistenan dalam pemanfaatan ruang yang ada. Di beberapa Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Kota/Kabupaten pernah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten. Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk kesesuaian antara program pembangunan yang membutuhkan ruang (baik program pembangunan yang telah maupun yang sedang dilaksanakan) terhadap rencana tata ruang, rata-rata masih $\leq 50\%$ program pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketidakesesuaian diukur terhadap materi struktur pemanfaatan ruang, struktur utama tingkat pelayanan, sistem utama transportasi dan sistem utama jaringan utilitas. Hasil evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan rencana tata ruang dalam program pembangunan di Kota/Kabupaten masih rendah (Sardjito).

Ketidakesesuaian antara program pembangunan dan rencana tata ruang salah satunya adalah terkait dengan proses perencanaan program pembangunan. Program pembangunan disusun berdasarkan hasil dari proses penyusunan rencana program pembangunan, sedangkan rencana program pembangunan disusun berdasarkan penetapan prioritas usulan rencana program pembangunan. Oleh karena itu ketidakesesuaian antara program pembangunan dan rencana tata ruang tidak terlepas dari proses pengusulan rencana program pembangunan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), apakah dalam pengusulan rencana program pembangunan memperhatikan dan menggunakan rencana tata ruang atau belum atau tidak memperhatikan rencana tata ruang. Masih rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam program pembangunan di Kota atau Kabupaten menunjukkan telah diperlukannya usaha-usaha untuk meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang (Santoso, 2016).

Faktor – faktor yang mempengaruhi usulan program peserta Rapat Koordinasi Pembangunan dalam memanfaatkan rencana tata ruang pada proses penyusunan rencana program pembangunan. Faktor – faktor tersebut didasarkan pada studi literatur dan hasil studi lainnya terkait upaya pemanfaatan rencana tata ruang dalam proses perencanaan program pembangunan, antara lain :

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap rencana tata ruang masih rendah.

Hal ini disebabkan oleh dokumen rencana tata ruang belum terdistribusi dengan baik, pemerintahan ditingkat Desa atau Kelurahan belum memiliki dokumen rencana tata ruang, lingkup pembahasan rencana tata ruang terlalu luas, jenis dokumen rencana tata ruang jumlahnya lebih dari satu, bahasanya terlalu teknis dan kadang masyarakat kurang mengetahui rencana tata ruang karena beranggapan bukan bidang mereka untuk mengetahui terkait dokumen rencana tata ruang.

2. Pemahaman masyarakat terkait dokumen rencana tata ruang.

Masyarakat terlebih dahulu harus mengetahui dokumen rencana tata ruang sebelum memahaminya, akan tetapi dalam tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami dokumen rencana tata ruang rendah, yang menjadi penyebab tingkat pemahaman rendah meliputi faktor kesibukan, tugas pokok dan fungsi SKPD tidak sesuai dengan bidang tata ruang.

Selain itu penyajian dokumen rencana tata ruang juga mempengaruhi pemahaman masyarakat. Dokumen rencana tata ruang yang besar dan tebal mempengaruhi minat pembaca.

3. Kualitas dokumen rencana tata ruang.

Penulisan atau perumusan rencana tata ruang harus mudah dimengerti, dipahami dan mudah diimplementasikan. Agar mudah untuk dilaksanakan, dokumen tata ruang harus memperhatikan kualitas. Kualitas yang dimaksudkan yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupunantisipasi.

Prosedur penyusunan rencana tata ruang memberikan petunjuk teknik mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang. Dalam prosedur penyusunan tersebut memiliki hierarki atau tahapan penyusunan, dengan kata lain rencana tata ruang yang skala perencanaan mikro (detail), harus mengacu ke perencanaan yang skalanya makro (umum).

Dalam pelaksanaannya ada penyusun yang tidak mengikuti prosedur tersebut, padahal wilayah perencanaan tidak berdiri sendiri melainkan terkait juga dengan wilayah yang ada di sekitarnya sebagai wilayah perencanaan tata ruang yang sejenis. Sebagai akibatnya dimungkinkan apabila antar dokumen yang sejenis dalam satu wilayah perkotaan disambungkan, hasilnya tidak menyatu (tidak sambung). Sehingga kualitas rencana yang kurang sesuai dengan keadaan lapangan; kualitas rencana tata ruang yang kurang akurat; tidak mengikuti prosedur penyusunan rencana tata ruang; penyajian dokumen yang terlalu tebal dan lebar; isi dokumen rencana tata ruang kurang atau tidak menampung aspirasi masyarakat; indikasi program kurang sesuai dengan kebijaksanaan prioritas pembangunan; indikasi program direncana tata ruang kurang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Kualitas aparat dan kelembagaan.

Kemampuan aparat dan kelembagaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam memahami dokumen rencana tata ruang. Beberapa hal yang menjadi penilaian meliputi kemampuan dalam hal fungsional perencanaan, berkomunikasi dan berkoordinasi dalam perencanaan program pembangunan, pengambilan keputusan dan pengorganisasian informasi, kemampuan untuk memahami isi dokumen rencana tata ruang, latar belakang pendidikan bukan dari fakultas teknik, pendidikan tingkat SMU, kemauan untuk membaca dokumen rencana tata ruang, tidak atau kurangnya kemauan menerima dan memperhatikan rencana tata ruang, memiliki kebijakan perencanaan selain rencana tata ruang.

5. *Trend* (kecenderungan) Perkembangan.

Kecenderungan perkembangan yang terjadi, dapat mempengaruhi penggunaan rencana tata ruang. Perubahan tersebut meliputi perubahan kebijaksanaan prioritas pembangunan; dinamika perkembangan masyarakat (perubahan budaya, perubahan orientasi kegiatan masyarakat, perubahan kebiasaan/adat masyarakat) serta

adanya program yang mendesak untuk segera diselenggarakan.

6. Penyebarluasan dokumen rencana tata ruang.

Tidak digunakannya rencana tata ruang yaitu rendahnya kemampuan peserta dalam pemahaman tentang rencana tata ruang yang disebabkan kurang disosialisasikannya pemahaman tentang rencana tata ruang. Sosialisasi dalam rangka pemahaman rencana tata ruang, kurang atau tidak dilaksanakan dengan baik antara lain kurang sosialisasi atau memasyarakatkan rencana tata ruang; pendistribusian dokumen rencana tata ruang belum sampai ke tingkat kelurahan atau desa; sulitnya memperoleh informasi keberadaan dokumen rencana tata ruang.

7. Penggunaan rencana tata ruang.

Alasan belum atau tidak digunakannya dokumen rencana tata ruang untuk menyusun usulan program pembangunan, antara lain belum adanya peraturan terkait penggunaan rencana tata ruang dalam penyusunan program pembangunan (faktor yang sangat berpengaruh) ; kebutuhan program tidak terakomodasi didalam rencana tata ruang ; perumusan rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan ; indikasi program tidak menyerap aspirasi masyarakat ; kualitas rencana tata ruang kurang akurat dan tidak mengikuti prosedur penyusunan rencana tata ruang.

8. Perumusan pemanfaatan rencana tata ruang

Penggunaan rencana tata ruang dalam proses penyusunan usulan program pembangunan, ternyata belum ada aturan yang mengharuskan peserta untuk menggunakan dokumen tata ruang dalam penyusunan usulan program pembangunan. Demikian juga halnya penggunaan tata ruang sebagai kriteria seleksi usulan program pembangunan dalam forum. Belum adanya peraturan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi peserta dalam menggunakan rencana tata ruang, sewaktu menyusun usulan program pembangunan.

7.5 Kelompok Permasalahan Yang Dihadapi Perencana Wilayah

Mengingat bidang kegiatan perencanaan wilayah cukup luas cakupannya, maka perlu seorang perencana wilayah yang ahli pada bidang tersebut. Sebetulnya tugas perencana wilayah adalah menjawab pertanyaan sederhana yaitu kegiatan apa yang ingin dikembangkan dan di mana lokasinya (sektoral). Permasalahan dapat juga dilihat dari sisi lain (pendekatan regional), yaitu mengetahui penggunaan lahan saat ini dan melihat kemungkinan masih adanya lahan yang diubah penggunaannya agar kemakmuran masyarakat meningkat, permasalahannya adalah kegiatan apa yang paling cocok dikembangkan pada lahan tersebut, kegiatannya tidak harus sama sekali baru tetapi dapat berupa peningkatan kegiatan yang selama ini telah ada di lahan tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan dibidang perencanaan wilayah perlu keterlibatan keahlian dibidang yang lainnya agar permasalahan tersebut terselesaikan dengan baik. Faktor keterlibatan pihak swasta dan pemerintah dalam penanganan masalah juga menjadi hal yang berbeda dalam proses penyelesaian masalah. Permasalahan yang terkandung dalam perencanaan wilayah utamanya penentuan kegiatan apa dan di mana lokasinya, dikelompokkan menjadi permasalahan mikro dan permasalahan makro, sistem transportasi / penyediaan prasarana dan sistem pembiayaan pembangunan daerah (Tarigan, 2016).

7.5.1 Permasalahan Mikro

Permasalahan mikro adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek, baik ditinjau dari sudut pandang pengelola maupun dari sudut pandang pemberi izin proyek. Kelompok permasalahan mikro meliputi :

1. Masalah teknis, antara lain di dalamnya termasuk peraturan pemerintah tentang tata guna lahan yaitu bahwa kegiatan seperti itu memang dibenarkan pada lokasi tersebut, kondisi lahan sesuai, peralatan yang dibutuhkan untuk membangun

proyek tersedia dan adanya tenaga terampil sehingga proyek benar-benar dapat dibangun sesuai rencana.

2. Masalah pengelolaan, setelah proyek selesai timbul pertanyaan, apakah dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Artinya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan fasilitas pendukung, tenaga kerja dan fasilitas pendukung cukup tersedia sehingga tidak menjadi permasalahan dalam pemanfaatan/pengoperasian proyek.
3. Masalah keuangan, apakah terdapat dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek dan ada dana operasional untuk mengoperasikan proyek. Apakah lokasi itu cukup efisien ditinjau dari pengeluaran biaya, baik semasa pembangunannya maupun setelah pengopersiannya. Apabila proyek itu ditujukan untuk menghasilkan laba, apakah akan diperoleh laba/pendapatan dari pengoperasian proyek sehingga proyek itu menguntungkan dari sudut pandang bisnis.
4. Masalah ekonomi, Apakah sumber daya yang dikorbankan untuk proyek tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dengan biaya yang dikorbankan ditinjau dari sudut ekonomi nasional secara keseluruhan. Apakah nilai tunai manfaat (*benefit*) lebih besar dari nilai tunai biaya (*cost*) yang dihitung dengan menggunakan harga bayangan (*shadow prices*), dan telah memperhatikan faktor eksternal.
5. Masalah dampak lingkungan, apakah proyek tersebut tidak akan menciptakan dampak lingkungan yang berlebihan, baik sewaktu pembangunannya ataupun sewaktu pengoperasiannya.
6. Sikap sosial masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima kehadiran proyek tersebut. Seandainya proyek itu terpaksa menggeser masyarakat yang sebelumnya telah bermukim/berusaha pada lokasi itu, apakah masalah penggeseran ini akan dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat yang tergeser. Seandainya proyek tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dikemudian hari,

apakah partisipasi akan dapat diperoleh pada saat dibutuhkan.

7. Masalah keamanan, apakah kondisi wilayah cukup aman termasuk pada lokasi proyek. Keamanan harus terjamin, baik dalam masa pembangunannya maupun dalam masa pengoperasiannya. Keamanan di sini berarti terhindar dari kondisi perang, kerusakan antar kelompok masyarakat, penjarahan, pencurian, dan pemerasan (pungutan liar). Faktor keamanan ini sampai batas tertentu mungkin masih bisa ditoleransi, namun biasanya akan menambah biaya, baik untuk pembangunannya demikian juga dalam masa pengoperasiannya.

Permasalahan di atas merupakan jenis-jenis permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang perencana, bisa disebut sebagai masalah yang sangat kompleks karena kegiatan proyek tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga seorang perencana wajib memiliki intuisi, kemampuan adaptasi yang cepat serta memiliki pengalaman yang luar biasa agar mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dan mampu menyerap aspirasi masyarakat sehingga rencana tata ruang yang dihasilkan efektif, efisien dan berkualitas.

7.5.2 Permasalahan Makro

Merupakan permasalahan yang terkait dengan pemerintah, dimana proyek dikaitkan dengan program pemerintah secara keseluruhan (makro). Permasalahan makro dari penggunaan lahan untuk suatu kegiatan tertentu dikelompokkan sebagai berikut (Tarigan, 2016).

1. Kesesuaian lokasi

Lokasi kegiatan proyek harus disesuaikan dengan daya dukung dan kesesuaian lahan secara makroregional. Kalau sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) maka penentuan lokasi mengacu pada rencana tersebut. Jika belum memiliki RTRW/RUTRK dan walaupun ada tapi tidak cukup detail/rinci maka perencana wilayah harus mengaitkan

lokasi proyek dengan kebijakan penggunaan lahan yang baik atau mengikuti prinsip-prinsip penggunaan lahan yang baik. Misalkan lokasi *real estate* atau industri selayaknya menghindari penggunaan lahan yang subur untuk pertanian, lahan dengan kemiringan tertentu atau lahan resapan air.

2. Strategi pengembangan ekonomi wilayah

Apabila pemerintah ingin membangun suatu proyek terutama proyek berskala besar, hal itu harus terkait dengan strategi pengembangan wilayah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi perlu dilihat apakah proyek yang diusulkan cukup strategis dan sinkron dengan rencana umum pengembangan wilayah dan menuju tercapainya visi wilayah. Misalnya, apakah proyek tersebut bersifat basis dan memiliki *forward linkage* atau *backward linkage* yang tinggi. Jika memiliki, maka proyek tersebut harus diprioritaskan. Apabila proyek tersebut bersifat pelayanan (non – basis) maka perlu dikaji bahwa proyek tersebut memang sudah dibutuhkan.

Dalam hal ini perencanaan wilayah tentunya melakukan koordinasi yang sering dengan pihak pemerintah agar nantinya dokumen rencana tata ruang bisa dipahami dan sesuai dengan kebutuhan untuk program pembangunan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, E.B. (2016) *Perspektif Pengembangan Wilayah dan Kota*. Edited by P. Santoso, Eko Budi., Navitas. Yogyakarta: Teknosain.
- Sardjito (2016) 'Usaha Meningkatkan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dalam Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan di Kota atau Kabupaten', in *Perspektif Pengembangan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Teknosain, p. 125.
- Tarigan, R. (2016) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sadyohutomo, M. (2008) *Manajemen Kota dan Wilayah - Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sadyohutomo, M. (2006) *Penatagunaan Tanah Sebagai Subsistem dari Penataan Ruang*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasution (2003) *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiharjo, E. (1997) *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Oetomo, A. (1996) *Otoritas Penataan Ruang di Indonesia*. Bandung. Sadyohutomo, M. (2006) *Penatagunaan Tanah Sebagai Subsistem dari Penataan Ruang*. Yogyakarta: Aditya Media.

BAB 8

ANALISIS PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Firdaus

8.1 Analisis Daya Dukung Fisik Wilayah

Secara garis besar untuk melakukan kegiatan perencanaan wilayah khususnya dalam suatu kawasan perencanaan perlu dilakukan analisis daya dukung fisik wilayah yang terdiri atas dua analisis besar, yaitu analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Sebelum dilakukan kedua analisis tersebut, dilakukan penyusunan Satuan Kemampuan Lahan (SKL), yaitu suatu studi yang dilakukan untuk melihat kemampuan fisik geografis suatu wilayah untuk dapat dikembangkan dari segi aspek fisik dan kegelogian. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat sembilan SKL yang dikeluarkan, yaitu SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air, SKL morfologi, SKL Ketersediaan Air, SKL Kemudahan Dikerjakan, SKL terhadap erosi, SKL Kebencanaan dan SKL untuk drainase (Fauziya, 2023).

8.1.1 Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan ini pada dasarnya merupakan analisis untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya ('Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang', 2007).

Klasifikasi kemampuan lahan menunjukkan daya dukung tanah-lahan yang merupakan analisis fisik dan lingkungan yang memberikan informasi mengenai kemampuan tanah dalam

mendukung untuk kegiatan konstruksi untuk dikembangkan sebagai perkotaan. Adapun kriteria konstruksi untuk daya dukung tanah ini ditetapkan berdasarkan pada peta hasil analisis SKL, peta topografi, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima tipologi sebagai berikut:

- a. Kemampuan Pengembangan Tinggi, dengan nilai total 135-160, merupakan tipologi yang memiliki kemampuan dikembangkan sebagai lahan terbangun tinggi;
- b. Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi, dengan nilai total 110-134, merupakan tipologi yang memiliki kemampuan sebagai pengembangan lahan terbangun hanya saja kualitasnya satu tingkat di bawah tipologi daya dukung sangat tinggi;
- c. Kemampuan Pengembangan Sedang, dengan nilai total 84-109, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan sedang sebagai lahan terbangun;
- d. Kemampuan Pengembangan Rendah, dengan nilai total 59-83, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan rendah sebagai lahan terbangun; dan
- e. Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah, dengan nilai total 32-58, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan sangat rendah sebagai lahan terbangun, dapat dikembangkan dengan rekayasa dan konstruksi khusus.

8.1.2 Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Wilayah Perencanaan sangat diperlukan terkait dengan memberikan arahan pengembangan kegiatan dari sisi fisik. Secara definitif, analisis kesesuaian lahan merupakan analisis kecocokan lahan untuk suatu penggunaan kegiatan tertentu berdasarkan karakteristik fisik lahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan ini akan dapat diketahui kegiatan apa saja yang sesuai untuk dikembangkan di kawasan tersebut.

Dalam proses analisis kesesuaian lahan ini, karakteristik lahan yang dimiliki dikelompokkan berdasarkan kesesuaiannya

untuk pengembangan tiap kegiatan. Adapun kegiatan yang dikembangkan didasarkan pada dua kelompok besar, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan pertanian. Pengelompokan kedua kawasan ini didasarkan pada tiga kriteria, yaitu kemiringan lereng, SKL rawan bencana, dan kemampuan lahan. Ketiga aspek ini menjadi kriteria ini karena merupakan syarat dasar dalam pembangunan fisik.

Untuk kegiatan perkotaan dan pertanian sendiri masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub-kegiatan berdasarkan tiga kriteria yaitu kemiringan lereng, SKL ketersediaan air, dan kemampuan lahan. Berdasarkan kriteria tersebut untuk kegiatan perkotaan dihasilkan dua kelompok kawasan, yaitu kawasan industri dan kawasan permukiman dan perdagangan jasa.

Sedangkan untuk kegiatan pertanian dibagi lagi menjadi kegiatan pertanian lahan basah dan perikanan, serta pertanian lahan kering, perkebunan, dan peternakan. Dari hasil analisis kesesuaian lahan apabila dilihat dari sisi keruangan terdapat beberapa perbedaan. Oleh karena itu dalam proses berikutnya dilakukan proses koreksi terhadap hasil yang diperoleh dengan menggunakan dasar pertimbangan, antara lain:

1. Kondisi eksisting kawasan;
2. Peraturan perundangan yang berlaku, terutamanya yang terkait dengan pengembangan kawasan lindung; dan
3. Arahan rencana tata ruang kota/kabupaten terkait.

Analisis kesesuaian lahan dimaksudkan agar potensi penggunaan lahan untuk suatu atau beberapa komoditas dapat diketahui. Potensi yang dimaksud dinyatakan dalam tingkat kesesuaiannya yang secara garis besar dapat dipisahkan ke dalam kategori sesuai dan tidak sesuai, didasarkan pada syarat tumbuh tanaman dibandingkan dengan kualitas lahan yang dicerminkan oleh karakteristiknya. Menurut konsep evaluasi lahan yang dikembangkan oleh (FAO, 1976) pembagian lahan menjadi sesuai dan tidak sesuai merupakan klasifikasi kesesuaian lahan pada kategori ordo dengan simbol berturut-turut S dan N. Selanjutnya ordo S dapat diperinci lagi ke dalam kategori kelas menjadi sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marjinal berturut-turut diberikan notasi S1, S2, dan S3; sementara itu ordo N diperinci

lagi menjadi tidak sesuai saat ini (N1) dan tidak sesuai selamanya (N2). Setiap kelas selanjutnya dapat dipilah lagi berdasarkan faktor pembatas atau penghambat (karakteristik lahan) ke dalam kategori unit. Berdasarkan konsep ini kemudian dikembangkan kriteria penilaian kesesuaian lahan untuk berbagai tanaman, baik untuk tanaman tahunan yang meliputi komoditas tanaman hutan, perkebunan, dan buah-buahan maupun tanaman setahun yang meliputi tanaman palawija dan sayuran.

Sebagai kelanjutan dari analisis kesesuaian lahan, pewilayahan komoditas dimaksudkan untuk lebih jauh menata peruntukan lahan berdasarkan pertimbangan komoditas unggulan di suatu daerah atau wilayah agar penyebarannya selain sesuai dengan daya dukung lahannya juga sesuai dengan prospek ekonomi. Pewilayahan komoditas dapat diartikan sebagai arahan pengembangan pertanian berbasis daya dukung lahan dan komoditas unggulan. Berdasarkan kesesuaian lahannya berbagai tanaman atau komoditas pertanian dapat dikembangkan pada suatu lahan, namun demikian lahan hanya dapat diperuntukan untuk satu tanaman tertentu sehingga penggunaan atau pemanfaatannya perlu diarahkan untuk komoditas yang paling prospektif secara ekonomi dan atau strategis dilihat dari sisi sosio-kultural atau dari aspek ketahanan pangan dan atau energi. Selain itu pengembangan komoditas pertanian yang sesuai secara biofisik dan menguntungkan secara ekonomi, sangat penting dalam perencanaan pengkajian teknologi untuk pengembangan komoditas unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan sehingga pengembangan komoditas tersebut dapat berkelanjutan.

8.2 Analisis Kependudukan

Penduduk merupakan gambaran utama karakteristik sosial budaya dalam wilayah perencanaan. Data dasar penghitungan laju pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan didapat dari data statistik yang bersumber dari BPS. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah berkaitan

dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Demografi berasal dari kata Yunani demos - penduduk dan Grafien - Gambaran, Dapat diartikan gambaran tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Sifat Ilmu demografi :

- Demografi yang bersifat kuantitatif (disebut *Formal Demography - Demography Formal*) lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik.
- Demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskriptif analitik.

Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya. Masalah kependudukan sudah menjadi masalah global dan merupakan salah satu dari dua sumber masalah kehidupan di dunia yang menonjol disamping masalah lingkungan hidup. Masalah kependudukan terutama masalah pertumbuhan penduduk sudah menjadi pusat perhatian dan banyak dibicarakan dunia sejak lama.

8.2.1 Pengertian Dasar Tentang Kependudukan

Berdasarkan (Nations, U, 1958), definisi demografi yang diterjemahkan oleh (Mantra, 2003) sebagai berikut: Demografi mempelajari penduduk suatu wilayah terutama mengenai jumlah, struktur atau komposisi penduduk dan perubahannya. Menurut (Hauser, Philip M., 1959) mengusulkan definisi sebagai berikut: Demografi mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi pembentuk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas dan gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial.

Kondisi Sosial Kependudukan, meliputi data-data:

- Jumlah dan perkembangan penduduk;
- Penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk;
- Migrasi penduduk;
- Struktur penduduk, menurut ; umur, jenis kelamin, suku, agama, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan.

8.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Pertumbuhan Penduduk Geometri (*Geometric Growth*).

Rumus: $P_t = P_o (1 + r)^t$ Atau $P_n = P_o (1 + r)^n$

Keterangan:

- P_t / P_n = jumlah penduduk pada tahun t atau n.
- P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar/awal.
- r = jangka pertumbuhan penduduk per tahun.
- n = jangka waktu dalam tahun.

Pertumbuhan Penduduk Eksponensial

Pertumbuhan penduduk eksponensial adalah pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara terus menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Ukuran pertumbuhan penduduk secara eksponensial ini lebih tepat, mengingat bahwa dalam kenyataannya pertumbuhan penduduk juga berlangsung terus menerus.

Rumus : $P_t = P_o \cdot e^t$ atau $P_n = P_o \cdot e^n$

Keterangan:

- P_t / P_n = jumlah penduduk pada tahun t atau n.
- P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar/awal.
- r = jangka pertumbuhan penduduk.
- t/n = jangka waktu dalam tahun.
- e = bilangan eksponensial yang besarnya 2,7182818.

8.3 Analisis Ekonomi Wilayah

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau

lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan di samping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output riil*. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output riil* per orang. Mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

8.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan

sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas.

Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interelasi. Pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan.

Perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (*factors movement*).

Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan. Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa. Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

8.3.2 Pendapatan Regional

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional. Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barangbarang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun. Sedangkan menurut (Tarigan, 2014), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut .

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

- 1) Pertanian.
- 2) Pertambangan dan Penggalian.
- 3) Industri Pengolahan.
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- 5) Bangunan/Konstruksi.
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi.
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- 9) Jasa-jasa.

8.3.3 Analisis Ekonomi Basis

Inti dari teori ekonomi basis adalah bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/kota ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut (barang maupun jasa); sektor ini disebut sektor basis. Semakin besar ekspor, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Namun demikian, besarnya ekspor tergantung pada permintaan dari luar wilayah (*exogenous demand*).

Di samping sektor basis, ada kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani (*service*) kegiatan produksi sektor basis termasuk pekerjaannya. Sektor ini disebut sebagai sektor non-basis. Kedua sektor (basis dan non-basis) saling berhubungan. Artinya bahwa bila permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Berkembangnya sektor basis akan mendorong perkembangan

sektor non-basis dan perkembangan kedua sektor tsb pada gilirannya akan menumbuhkembangkan perekonomian wilayah/kota melalui proses penggandaan.

1. Analisis Location Question (LQ)

Analisis *Location Question* (LQ) merupakan suatu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar (Tarigan, 2014). Adapun cara menghitung LQ adalah :

$$LQ = \frac{\left(\frac{X_{ir}}{X_r}\right)}{\left(\frac{X_{in}}{X_n}\right)}$$

Dimana :

- X_{ir} adalah suatu sektor i di tingkat daerah
- X_r adalah jumlah seluruh sektor di tingkat daerah
- X_{in} adalah suatu sektor i di tingkat nasional
- X_n adalah jumlah seluruh sektor di tingkat nasional

Adapun hasil dari perhitungan LQ dapat diartikan sebagai berikut :

- a. $LQ > 1$, mengindikasikan dilakukannya ekspor produk pada sektor tersebut, ekspor dilakukan karena adanya surplus. (peranan sektor lebih besar di daerah daripada nasional).
- b. $LQ < 1$, mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. (peranan sektor lebih kecil di daerah daripada nasional).
- c. $LQ = 1$, mengindikasikan bahwa adanya produktivitas berimbang yang berarti sektor ini masih belum layak untuk diekspor. (peranan sektor sama baik di daerah ataupun secara nasional).

2. Analisis shift share

Analisis *shift share* merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor atau pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Tiga komponen dalam analisis *shift share* yakni *National Share*, *Proportional Shift*, dan *Differential Shift*.

- a. *National share* merupakan komponen untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional.
- b. *Proportional shift* merupakan pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat nasional.
- c. *Differential shift* atau *competitive position* merupakan perbedaan pertumbuhan perekonomian suatu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional.

Dengan analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift share*, kita akan semakin cepat menemukan potensi serta sektor unggulan di daerah kita, dan tentunya akan memudahkan dalam menyusun strategi pengembangan ke depannya (Perkim.id, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- FAO (1976) *A Framework For Land Evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division*. Rome, Italy: FAO Soil Bulletin.
- Fauziya, B.S. (2023) 'Bahan Ajar Matakuliah Studio Perencanaan Wilayah Semester 6'. Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana.
- Hauser, Philip M., O.D.D., eds (1959) *The Study of Population: An Investory and Appraisal*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mantra, B., Ida (2003) *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nations, U (1958) *Multilingual Demographic Dictionary*. New York: United Nations.
- 'Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang' (2007). Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Perkim.id (2021) 'Mengenal Location Quotien dan Shift Share', <https://perkim.id/>.
- Tarigan, R. (2014) *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 9

PEMECAHAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Irma Maria Dulame

9.1 Pengertian

Apa yang dimaksud dari Perencanaan wilayah itu ? Perencanaan Wilayah dan Kota adalah jurusan yang mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakannya untuk kebutuhan masa depan. Ruang lingkup yang dipelajari mulai dari skala kecil yaitu satu RT hingga skala kota dan skala yang lebih luas.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Definisi wilayah perencanaan atau planning region atau programming region, disebut juga sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi. Contoh wilayah perencanaan adalah DAS atau Daerah Aliran Sungai Cimanuk, dan lain sebagainya.



Perencanaan Wilayah dan Kota adalah jurusan yang mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakannya untuk kebutuhan masa depan. Ruang lingkup yang dipelajari mulai dari skala kecil yaitu satu RT hingga skala kota dan skala yang lebih luas. Lalu, terbesit pertanyaan “Mengapa sih, kita harus belajar ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota?” Jawabannya: Karena kuantitas ruang tidak akan pernah bertambah, namun populasi manusia terus meningkat, nah untuk itu ruang perlu ditata dan dikelola dengan baik agar tetap mencukupi kebutuhan manusia dan manusia yang tinggal tetap merasa nyaman.

Sesuai dengan namanya, “Perencanaan” maka output yang dihasilkan juga berupa dokumen-dokumen rencana tata ruang. Dokumen itu berisi aturan perencanaan yang dijadikan pedoman atau dipakai oleh siapa saja yang ingin membangun di daerah tersebut. Kebayang kan, kalau gak ada anak PWK terus gak ada dokumen itu? Jelas kota di masa depan akan menjadi semrawut.

9.1.1 Why

Masih bingung dan ragu? Lanjut ke pertanyaan, “Kenapa sih, kita butuh ngerencanakan ruang?”, jawabannya sebenarnya mirip sama alasan yang di atas tadi, tapi di sini mau menitik beratkan kalau ruang itu ikut membentuk perilaku manusia, aneh ya? Padahal yang awalnya mengatur ruang itu ya manusia. Jadi sebenarnya, dua-duanya saling mempengaruhi, gak bisa dicari mana duluan mempengaruhi yang mana, kayak teka-teki “duluan mana ayam sama telur?” aja.

Belum paham? Coba bandingin perilaku orang yang tinggal di kota besar sama yang tinggal di desa. Orang di kota besar cenderung agresif karena manusianya lebih padat menghuni ruang, jadi ruang personal masing-masing orang berkurang, dan gak ada kan orang yang suka ruang personalnya diganggu, udah gitu masalah yang dihadapin sehari-hari tambah banyak, ya macet lah, sampah numpuk, kepanasan, kena aseps dimana-mana, bahkan sampai masalah “bosen” matanya ngeliat bangunan dan kendaraan terus, gak ada ruang publiknya. Sedangkan di desa kecil yang masih adem ayem tentrem? Hampir terbalik banget kan.

Jadi kesimpulannya, kita butuh belajar PWK, karena dunia ini dihuni manusia sebagai makhluk yang mengendalikan jalannya peradaban, jadi kalo mau peradabannya bener, manusianya juga harus bener, nah salah satu faktor yang membentuk manusia? Ruang.

9.1.2 Where

Nah, ngomongin prospek kerja nya, PWK punya prospek kerja yang baik karena ilmu PWK itu multidisiplin alias belajar banyak hal, jadi kita sebagai mahasiswa PWK juga terbekali dengan banyak skill. Skill tersebutlah yang bisa membawa kita untuk bekerja di mana saja. Bisa di pemerintahan, misalnya di dinas PU atau Bappeda lalu di NGO (Non Government Organisation) seperti di United Nation, RUJAK, KotaKita dan sebagainya atau di BUMN seperti ITDC, ITDP lalu bisa juga di bidang akademik menjadi dosen, pilihan lainnya bisa bekerja sebagai konsultan dan bahkan bisa juga bekerja di Bank. Seaneh-anehnya tempat kita kerja nanti, percaya deh kalo ilmu yang kita pelajari di PWK tuh ya dibutuhkan. Di bank? Bank bakal butuh perencanaan untuk nyari tempat yang tepat mau bangun bank baru, yang strategis dan bisa dijangkau masyarakat. Siapa yang ngerti gitu kalo gak belajar di PWK?

Selain itu, Indonesia lagi butuh banyak banget perencana, karena kita sedang giat-giatnya “membangun”, jadi biar gak salah dalam membangun, jelas dibutuhkan orang-orang yang tahu proses perencanaan yang benar, seluk beluk lapangan, dan kenyataan pembangunan yang ada.

9.1.3 When

PWK UGM terbentuk pada tahun 2003 dan mendapat akreditasi A. PWK UGM juga memiliki himpunan mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik – Perencanaan Wilayah dan Kota (HMT PWK) yang terbentuk pada tahun 2009. Untuk kegiatan yang ada di PWK juga cukup beragam. Misalnya KP atau Kuliah Praktek atau magang yang diselenggarakan pada semester 5 atau 6, lalu ada KKP atau Kuliah Kerja Perencana alias studi banding yang diselenggarakan pada liburan semester 4-5. Dan

juga ada KKN yang dilaksanakan pada liburan semester 7-8. Semuanya jelas akan membekali kita untuk kehidupan sebagai perencana.

9.1.4 Who

Siapa aja sih orang yang terkenal di ranah PWK? Pada saat ini banyak sekali kota-kota besar yang menggunakan konsep TOD, atau dapat dikatakan konsep tersebut merupakan konsep yang sedang tren pada jaman ini. Sebenarnya konsep tersebut sudah dikenalkan sejak tahun 1980. Penemu konsep tersebut adalah Peter Calthorpe. Beliau adalah seorang perencana dari San Francisco yang percaya bahwa kota yang baik adalah kota yang walkable, jadi kemana-mana bisa dicapai dengan berjalan kaki, maka dari itu muncullah konsep TOD.

TOD adalah singkatan dari Transit-Oriented Development. Artinya, perkembangan di sekitar area-area transit. Perkembangan apa? Perkembangan fungsi lahan. Area transit maksudnya? Area yang dijadikan tempat transit moda-moda transportasi, seperti halte dan stasiun.



9.2 Need For Urband & Regional Planning

Apa yang dimaksud dengan perencanaan wilayah dan kota?

Perencanaan kota, juga dikenal sebagai perencanaan kota, perencanaan kota, perencanaan wilayah, atau perencanaan pedesaan, adalah proses teknis dan politik yang berfokus pada pengembangan dan desain tata guna lahan dan lingkungan binaan, termasuk udara, air, dan infrastruktur yang melewatinya masuk dan keluar dari daerah perkotaan



9.3 Penyebaran Wilayah

Penyebaran wilayah didefinisikan sebagai "penyebaran pembangunan perkotaan (seperti rumah dan pusat perbelanjaan) di lahan yang belum dikembangkan di dekat kota."

Penyebaran Wilayah ini digambarkan sebagai pertumbuhan tak terbatas di banyak daerah perkotaan perumahan, pengembangan komersial, dan jalan di atas hamparan tanah yang luas, dengan sedikit perhatian pada perencanaan kota. Selain itu dapat juga diartikan sebagai menggambarkan bentuk khusus dari urbanisasi, istilah tersebut juga berkaitan dengan konsekuensi sosial dan lingkungan yang terkait dengan perkembangan ini. Pinggiran kota abad pertengahan menderita karena hilangnya perlindungan tembok

kota, sebelum munculnya perang industri. Kerugian dan biaya modern termasuk peningkatan waktu perjalanan, biaya transportasi, polusi, dan kerusakan pedesaan. Biaya pembangunan infrastruktur perkotaan untuk pembangunan baru hampir tidak pernah dapat diperoleh kembali melalui pajak properti, sebesar subsidi untuk pengembang dan penduduk baru dengan mengorbankan pembayar pajak properti yang ada.

Di Benua Eropa, istilah peri-urbanisasi sering digunakan untuk menunjukkan dinamika dan fenomena serupa, tetapi istilah Penyebaran Wilayah saat ini digunakan oleh Badan Lingkungan Eropa. Ada ketidaksepakatan yang meluas tentang apa yang merupakan *gepeng* dan bagaimana mengukurnya. Sebagai contoh, beberapa komentator mengukur penyebaran berdasarkan kepadatan pemukiman, menggunakan jumlah rata-rata unit pemukiman per acre di area tertentu. Yang lain mengaitkannya dengan Istilah penyebaran wilayah sangat dipolitisasi dan hampir selalu berkonotasi negatif. Itu dikritik karena menyebabkan degradasi lingkungan, mengintensifkan segregasi, dan merongrong vitalitas kawasan perkotaan yang ada, dan diserang atas dasar estetika. Makna pejoratif dari istilah tersebut berarti hanya sedikit yang secara terbuka mendukung penyebaran wilayah seperti itu. Istilah tersebut telah menjadi seruan untuk mengelola pertumbuhan kota.

Reid Ewing telah menunjukkan bahwa *sprawl* biasanya dicirikan sebagai pembangunan perkotaan yang menunjukkan setidaknya salah satu dari karakteristik berikut: pembangunan dengan kepadatan rendah atau sekali pakai, pengembangan jalur, pengembangan tersebar, dan/atau pengembangan *leapfrog* (area pengembangan diselingi dengan lahan kosong).).

Dia berpendapat bahwa cara yang lebih baik untuk mengidentifikasi *gepeng* adalah dengan menggunakan indikator daripada karakteristik karena ini adalah metode yang lebih fleksibel dan tidak sewenang-wenang. Dia mengusulkan penggunaan "aksesibilitas" dan "ruang terbuka fungsional" sebagai indikator. Pendekatan Ewing telah dikritik karena berasumsi bahwa *gepeng* didefinisikan oleh karakteristik negatif.

Apa yang merupakan gepeng dapat dianggap sebagai masalah derajat dan akan selalu agak subyektif di bawah banyak definisi istilah tersebut. Ewing juga berpendapat bahwa pembangunan pinggiran kota tidak, per se, merupakan sprawl tergantung pada bentuk yang diambilnya, meskipun Gordon & Richardson berpendapat bahwa istilah tersebut kadang-kadang digunakan secara sinonim dengan suburbanisasi dengan cara yang merendahkan.



9.4 Types of Regional planning - Assignment Point



Namun, tujuan utama perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan masyarakat yang peka terhadap masalah sosial ekonomi dan lingkungan.

Jenis Perencanaan Wilayah itu sendiri terbagi dalam beberapa Jenis yaitu :

(1) Perencanaan Fisik Wilayah:

Perencanaan wilayah berkaitan dengan perencanaan wilayah yang mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan. Tujuannya adalah untuk mempercepat kemajuan sosial komunitas komunitas mana pun. Proses perencanaan ekonomi, sosial, dan lingkungan setiap negara harus dimulai di tingkat lokal melalui rencana regional yang sesuai. Perencanaan wilayah tidak dilakukan untuk mencapai tujuan tunggal.

Perencanaan wilayah merupakan komponen penting dari perencanaan kota. Ini berfokus pada bagaimana berbagai aspek kota dapat bekerja sama untuk membuatnya berfungsi seefisien mungkin. Namun, tujuan utama perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan masyarakat yang peka terhadap masalah sosial ekonomi dan lingkungan.

Jenis Perencanaan Wilayah

(1) Perencanaan Fisik Wilayah:

Jenis perencanaan ini dapat didefinisikan sebagai pola penggunaan lahan secara keseluruhan, serta karakter dan distribusi struktur dan konstruksi publik. Ini mengatur distribusi dan ketersediaan fasilitas fisik yang diperlukan untuk pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dari perencanaan fisik adalah untuk membangun kawasan tertentu berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi yang ideal dan untuk mendukung pembentukan kehidupan yang teratur.

(2) Perencanaan Wilayah Ekonomi:

Jenis perencanaan ini berfokus pada keseluruhan struktur dan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Ini berkaitan dengan penciptaan, distribusi, dan konsumsi sumber daya material dan non-material. Jenis perencanaan regional ini meletakkan dasar bagi pembangunan inklusif di setiap kawasan.

(3) Perencanaan Wilayah Alokatif:

Ketika distribusi sumber daya sangat tidak merata, jenis perencanaan ini dapat digunakan. Akibatnya, alokasi sumber daya menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Pengembangan wilayah pada dasarnya adalah masalah aset dan distribusi yang terkonsentrasi secara lokal.

(4) Perencanaan Wilayah yang Inovatif:

Minat dalam perencanaan inovatif untuk kemajuan daerah tumbuh dalam dekade terakhir abad kedua puluh. Hubungan antara inovasi dan pembangunan sangat tidak dapat diprediksi. Dalam perencanaan ini, perencana bertanggung jawab untuk menilai kapasitas dan kemahiran sambil juga berusaha untuk meningkatkan kerangka kerja secara keseluruhan.

(5) Perencanaan Wilayah Indikatif:

Jenis perencanaan ini kemungkinan besar dimulai di Prancis setelah Perang Dunia II. Charles d. Gaullein menciptakan istilah "perencanaan wilayah indikatif" pada tahun 1946. Ketika seorang perencana memberikan insentif kepada orang-orang untuk meningkatkan kehidupan mereka, ini sebagian besar dianggap sebagai perencanaan indikatif.

(6) Perencanaan Wilayah Penting:

Pada dasarnya, ini adalah perencanaan di mana penggunaannya ditentukan bersama dengan definisi rencana. Akibatnya, dua bagian persiapan, perumusan, dan pelaksanaan, sudah dibahas di awal. Bagian terakhir terdiri dari pengaturan dengan cara yang jelas sama seperti yang pertama. Alasan untuk perencanaan ini sangat mudah: setelah rencana dikembangkan, rencana itu harus dilaksanakan.

(2) Perencanaan Wilayah Ekonomi:

Bagaimana cara kerja perencanaan ekonomi?

Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya berdasarkan prosedur komputasi untuk memecahkan masalah maksimisasi terbatas dengan proses iteratif untuk mendapatkan solusinya. Perencanaan adalah mekanisme alokasi sumber daya antara dan di dalam organisasi berbeda dengan mekanisme pasar.

Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya berdasarkan prosedur komputasi untuk memecahkan masalah maksimisasi terbatas dengan proses iteratif untuk mendapatkan solusinya. Perencanaan adalah mekanisme alokasi sumber daya antara dan di dalam organisasi berbeda dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme alokasi untuk sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dengan prosedur alokasi langsung sumber daya dalam kelompok yang saling berhubungan dari organisasi yang dimiliki secara sosial yang bersama-sama terdiri dari peralatan produktif ekonomi.

Ada berbagai bentuk perencanaan ekonomi yang bervariasi berdasarkan prosedur dan pendekatan khusus mereka. Tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan bergantung pada tipe spesifik dari mekanisme perencanaan yang digunakan. Selain itu, seseorang dapat membedakan antara perencanaan terpusat dan perencanaan desentralisasi.

Ekonomi yang terutama didasarkan pada perencanaan disebut sebagai ekonomi terencana. Dalam ekonomi terencana terpusat, alokasi sumber daya ditentukan oleh rencana produksi komprehensif yang menentukan persyaratan output.

Perencanaan juga dapat berbentuk perencanaan indikatif dalam ekonomi berbasis pasar, di mana negara menggunakan instrumen pasar untuk mendorong perusahaan independen mencapai tujuan pembangunan.

Perbedaan dapat dibuat antara perencanaan fisik (seperti dalam sosialisme murni) dan perencanaan keuangan (seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta dalam kapitalisme). Perencanaan fisik melibatkan perencanaan ekonomi dan koordinasi yang dilakukan dalam unit fisik terpilah sedangkan perencanaan keuangan melibatkan rencana yang dirumuskan dalam unit keuangan.

Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya berdasarkan prosedur penyelesaian untuk memecahkan masalah maksimisasi terbatas dengan proses iteratif untuk mendapatkan solusinya. Perencanaan adalah mekanisme alokasi sumber daya antara dan di dalam organisasi yang berbeda

dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme alokasi untuk sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan faktor pasar dengan prosedur alokasi langsung sumber daya dalam kelompok yang saling berhubungan dari organisasi yang dimiliki secara sosial yang bersama-sama terdiri dari peralatan ekonomi produktif.

Ada berbagai bentuk perencanaan ekonomi yang bervariasi berdasarkan prosedur dan pendekatan khusus mereka. Tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan bergantung pada tipe spesifik dari mekanisme perencanaan yang digunakan. Selain itu, seseorang dapat membedakan antara perencanaan yang direncanakan dan perencanaan desentralisasi.

Ekonomi yang terutama didasarkan pada perencanaan disebut sebagai ekonomi terencana. Dalam terencana ekonomi yang direncanakan, alokasi sumber daya ditentukan oleh rencana produksi komprehensif yang menentukan persyaratan keluaran.

Perencanaan juga dapat membentuk perencanaan indikatif dalam ekonomi berbasis pasar, di mana negara menggunakan instrumen pasar untuk mendorong perusahaan independen mencapai tujuan pembangunan.

Perbedaan dapat dibuat antara perencanaan fisik (seperti dalam sosialisme murni) dan perencanaan keuangan (seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta dalam kapitalisme). Perencanaan fisik melibatkan perencanaan ekonomi dan koordinasi yang dilakukan dalam unit fisik terpilah sedangkan perencanaan keuangan melibatkan rencana yang dirumuskan dalam unit keuangan.

(3) Perencanaan Wilayah Alokatif:

Jenis perencanaan ini dapat digunakan ketika distribusi sumber daya sangat tidak merata. Akibatnya, alokasi sumber daya menentukan bagaimana sumber daya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Pengembangan kawasan pada dasarnya adalah masalah pemusatan dan pendistribusian aset secara lokal.

Alokasi sumber daya lahan yang optimal merupakan prasyarat penting untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan dan untuk pengembangan sinergis sumber daya-lingkungan-ekonomi daerah. Pertanyaan tentang bagaimana mengoptimalkan dan mengalokasikan sumber daya lahan daerah telah menjadi hotspot dalam studi perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan. Namun, efisiensi alokatif lahan konstruksi China saat ini merupakan masalah yang belum sempurna dan subyektif. Studi ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang diperluas untuk mengukur efisiensi alokatif lahan konstruksi di tingkat nasional dan regional menggunakan data panel provinsi yang seimbang dari periode 1985–2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan konstruksi China telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama tiga dekade terakhir, dan tingkat pertumbuhannya di wilayah tengah relatif lebih tinggi daripada di wilayah timur dan barat. Hanya ada sedikit atau tidak ada lahan subur yang dapat ditempati oleh penggunaan konstruksi di provinsi-provinsi China yang ekonominya berkembang. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa investasi modal, tenaga kerja dan tanah semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB non-pertanian di Cina.

Efisiensi alokatif lahan konstruksi di wilayah timur lebih besar dibandingkan dengan di wilayah tengah dan barat. Efisiensi alokasi lahan konstruksi di China perlu ditingkatkan lebih lanjut, dan pemanfaatan sumber daya lahan secara intensif diperlukan, terutama dalam konteks ekonomi “normal baru” China. Karena disparitas regional dalam efisiensi alokasi lahan konstruksi, perumusan perencanaan penggunaan lahan berorientasi wilayah tertentu mungkin lebih mendesak. Temuan ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk penggunaan lahan dan perencanaan kota.

Sumber data

Dalam studi ini, fungsi produksi Cobb-Douglas yang diperluas digunakan untuk mengukur efisiensi alokasi lahan konstruksi, dan data tentang angkatan kerja, investasi lahan dan

modal, serta PDB non-pertanian, dimasukkan ke dalam model. Kumpulan data mencakup 31 provinsi China selama periode 1985–2014 (Hong Kong, Makau, dan Taiwan dikecualikan karena kurangnya data). Data nilai tambah PDRB nonpertanian provinsi dan angkatan kerja untuk sekunder dan tersier

Perluasan lahan konstruksi dan perubahan lahan budidaya. Total lahan konstruksi China telah meningkat dari 24,61 juta ha pada tahun 1985–38,11 juta ha pada tahun 2014, dengan peningkatan tahunan sebesar 1,52% (Gbr. 1). Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji perubahan lahan konstruksi untuk 31 provinsi di Cina selama periode 1985–2014. Kemiringan garis yang paling sesuai mencerminkan perubahan variabel, dan kemiringan yang lebih besar menunjukkan perubahan yang lebih besar pada variabel (Liu et al., 2015). Tingkat pertumbuhan lahan konstruksi di Cina adalah

Diskusi

Efektif tidaknya alokasi tata guna lahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan ekonomi, masyarakat, dan ekologi suatu negara atau wilayah. Pemerintah Cina sangat mementingkan masalah tanah sejak 1980-an. Misalnya, Dewan Negara China mengesahkan RUU Administrasi Pertanahan pada tahun 1986. Pada tahun 1994, Dewan Negara mengeluarkan “Peraturan Dasar Perlindungan Lahan Pertanian” untuk melarang konversi dasar lahan pertanian menjadi kegiatan non-pertanian. Pada tahun 1998, tanah

Kesimpulan dan implikasi kebijakan

Di sini, kami menyelidiki status quo lahan konstruksi dan menggunakan model ekonometrik untuk mengukur efisiensi alokasi lahan konstruksi di tingkat nasional dan regional berdasarkan dataset panel berimbang yang mencakup 31 provinsi di Tiongkok selama periode 1985–2014. Kami menemukan bahwa lahan konstruksi China menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Selain itu, tingkat pertumbuhan lahan konstruksi di Cina bagian tengah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian timur

Sumber daya suatu negara dikatakan dialokasikan secara efisien jika digunakan dengan cara yang "terbaik". Ini berarti bahwa keinginan maksimum orang yang tak terbatas dipenuhi dengan menggunakan sumber daya yang langka. Ini akan mengarah pada kepuasan keseluruhan maksimum dalam perekonomian. Ini disebut alokasi sumber daya yang efisien. Alokasi sumber daya yang efisien selalu diinginkan karena merupakan solusi terbaik untuk masalah ekonomi (sumber daya terbatas dan keinginan tak terbatas). Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui efisiensi alokatif.

Efisiensi alokatif mengacu pada distribusi barang yang optimal dalam suatu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini adalah ukuran seberapa baik ekonomi menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling dihargai orang. Tujuan efisiensi alokatif adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan sedemikian rupa sehingga manfaat marginalnya bagi masyarakat sama dengan biaya marginalnya.



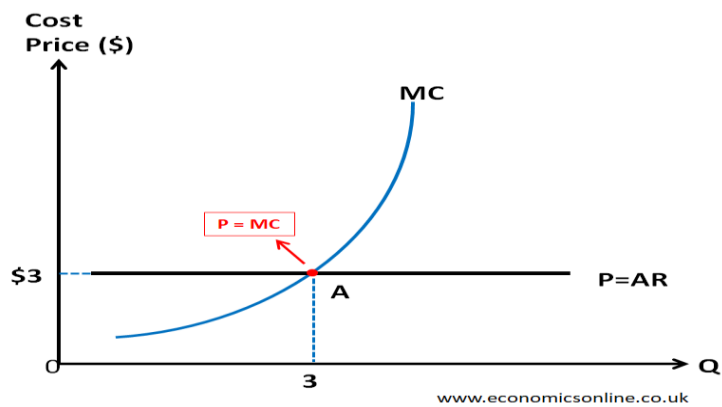
Efisiensi Alokatif untuk Perusahaan

Efisiensi alokatif dikatakan ada untuk perusahaan yang memproduksi output dimana harganya sama dengan biaya produksi marginal ($P = MC$)
 Data table showing allocative efficiency.

Q	1	2	3	4	5
P (\$)	3	3	3	3	3
MC (\$)	1	2	3	4	5

www.economicsonline.co.uk

Untuk output 3 unit, harga dan biaya marginal (MC) sama dengan \$3. Jika perusahaan ini akan memproduksi dan menjual 3 unit, kondisi efisiensi alokatif ($P = MC$) terpenuhi, dan perusahaan dikatakan memiliki efisiensi alokatif. Hal yang sama ditunjukkan oleh diagram berikut ketika efisiensi alokatif ada di titik A yang merupakan titik perpotongan kurva harga dan biaya marginal.

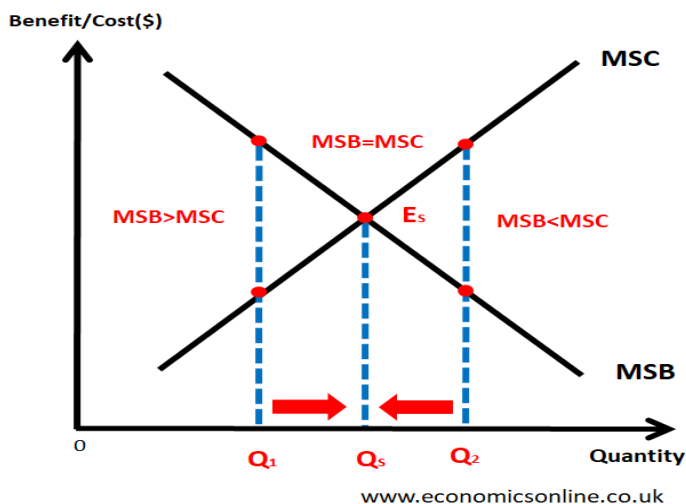


www.economicsonline.co.uk

Efisiensi Alokatif untuk Pasar

Pasar memiliki efisiensi alokatif ketika sumber daya digunakan sedemikian rupa sehingga biaya sosial marjinal (MSC) sama dengan manfaat sosial marjinal (MSB). Oleh karena itu, jika $MSC=MSB$, maka kesejahteraan masyarakat dimaksimalkan dan efisiensi alokatif dikatakan ada.

Pertimbangkan diagram berikut:



(4) Perencanaan Wilayah yang Inovatif:

Inovasi perencanaan wilayah dan dimensi laten: kasus wilayah Algarve. Konsep sistem inovasi regional (RSI) adalah teori penting kerangka kerja untuk menganalisis profil daerah ketika mencoba memahami Inovasi tetapi juga telah digunakan oleh para praktisi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan.

Studi ini berharap dapat berkontribusi pada pemahaman Algarve RSI, sebuah peripheral. Wilayah Portugis dalam kerangka Nasional dan Eropa, di mana ekonomi pertumbuhan didukung oleh Pariwisata, yang membuatnya keluar dari kelompok daerah termiskin. Ketika indikator GDPpc diperhitungkan. Profil daerah, perbandingannya dengan kawasan Eropa lainnya dan karakterisasi RSI ikut berkembang tipologi dibahas dalam

makalah ini. Melalui analisis 175 wilayah UE 15 penelitian ini berusaha untuk menemukan dimensi yang mendasari fenomena inovatif dan untuk membuat kelompok wilayah homogen yang menampilkan profil serupa. Analisis Faktorial digunakan untuk mereduksi dimensi data dari rentetan indikator regional tersebut sebagai: Masa Kritis Wilayah, Kinerja Ekonomi, Tingkat Kekayaan, Pasar Tenaga Kerja, Struktur Sektor Ekonomi, Struktur Kelompok Umur, Pendidikan dan Pelatihan, Ketenagakerjaan Teknologi, Litbang dan Paten. Setelah menentukan empat faktor utama dengan hasil yang signifikan (Inovasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Struktur Ekonomi dan Ketersediaan Pasar Tenaga Kerja) selanjutnya adalah analisis hirarki Klaster, menghasilkan lima pengelompokan wilayah: Tertinggal Daerah, Daerah Rata-Rata, Daerah Tengah.



Minat inovasi untuk pembangunan daerah telah tumbuh sejak pertengahan tahun 1990-an dengan intensifikasi globalisasi. Hubungan antara inovasi dan regional pembangunan itu kompleks, karena kegiatan inovatif bervariasi bahkan di daerah dengan profil teknologi yang serupa. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan pendidikan dan pengembangan budaya, akses ke

pasar, keunggulan teknologi, investasi dan kerjasama kelembagaan. Karakteristik yang berbeda ini memberi daerah panggilan atau spesialisasi yang berbeda dalam ekonomi global yang menciptakan asimetris pertunjukan ekonomi. Saat ini penelitian Regional Innovation System (RSI) sedang dilakukan dalam sorotan perdebatan, bukan hanya karena pencapaian teoretisnya yang menarik dalam menganalisis profil dan lintasan inovatif yang sangat kompleks dan beragam, tetapi juga dengan nilai operasional dan pemanfaatannya secara terus menerus untuk strategi regional dan perencanaan. Namun demikian, industri yang inovatif cenderung berkonsentrasi pada tempat-tempat di mana ada lingkungan yang menguntungkan untuk inovasi. Mengembangkan strategi inovasi tidak menjamin pengembangan, karena selain strategi tersebut ada banyak faktor dan masalah lain yang membatasi implementasinya dan faktor-faktor ini bervariasi dengan konteks teritorial yang berbeda. Strategi untuk inovasi harus fokus pada satu set tindakan inovatif yang dapat dieksekusi, dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif regional, kerangka kerja dan tujuan inovasi.

Uni Eropa (UE) telah menyiapkan beberapa dokumen yang menyatakan minat inovasi, yang berpuncak pada Strategi Lisbon yang ambisius. Di Portugal itu telah mempengaruhi Rencana Teknologi, agenda politik nasional yang diusulkan untuk pertumbuhan berdasarkan inovasi, ilmu pengetahuan dan perusahaan yang kompetitif. Sementara minat dalam agenda ini bervariasi di seluruh Portugal, wilayah Portugis di The Algarve, minat dalam inovasi kuat dan tidak baru-baru ini. Wilayah ini adalah yang pertama di Eropa yang membuat lintas batas BIC (Pusat Inovasi Bisnis Komisi Eropa) pada tahun 1995, sebuah badan yang berfokus tentang inovasi di UKM (usaha kecil dan menengah). Algarve juga berkembang Ettirse, strategi regional untuk transfer teknologi, yang diikuti oleh INOValgarve, program aksi inovasi regional.

Munculnya model rantai terkait dari Kline dan Rosenberg (1986) disediakan bukti bahwa inovasi tidak muncul di masyarakat dengan cara biasa dan jika beberapa langkah diperhitungkan dan jenis lingkungan tertentu dikembangkan,

inovasi cenderung terjadi dengan lebih mudah sehingga menciptakan dasar untuk sistem inovasi pendekatan pembangunan. Pandangan sistemik inovasi mencerminkan multiplisitas aktor yang berpartisipasi dalam proses inovatif, dengan interaksi mereka dan seperangkat aturan, organisasi dan institusi (Amable dan Petit 2001). Pandangan ini memfasilitasi masuknya, tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga kelembagaan, organisasi, sosial dan faktor kebijakan, Acs dan Varga (2002). Sistem ini selalu terlokalisasi (Ferrão 2002) sekali itu terjadi dalam urutan satu set hubungan yang dibatasi secara teritorial masing-masing aktor yang terlibat. Pendekatan Sistem Inovasi Nasional (NSI) percaya bahwa tingkat nasional cukup memadai untuk mendefinisikan hubungan ini. Asal usul konsep ini diberikan kepada Christopher Freeman, Richard R. Nelson dan Bengt-Ake Lundvall. NSI dapat dipahami sebagai kelompok lembaga terkait, didefinisikan pada skala nasional, itu mengembangkan kebijakan yang memengaruhi penciptaan dan transfer pengetahuan, kegiatan inovatif dan difusi yang didasari oleh segmen formal (lembaga publik dan swasta) dan segmen informal (berdasarkan proses pembelajaran dan produksi dan konsumsi rutinitas).

Relevansi yang berkembang dari konteks teritorial yang lebih kecil membawa konsep Sistem Inovasi Regional (RSI) ke arus utama diskusi kebijakan inovasi dan penelitian. Silva dan Silva (2000) mengamati pentingnya kawasan Eropa kebijakan memberi relevansi pada skala regional sebagai unit analitis dan pembuat kebijakan. Manual Oslo juga menunjukkan pentingnya lingkungan regional untuk promosi inovasi dan kapasitas inovatif perusahaan. Kesenjangan regional bisa sangat besar, dan identifikasi karakteristik ini sangat penting dalam elaborasi kebijakan yang memadai dan bermanfaat (OECD 2005).

Sistem Inovasi Regional dapat didefinisikan sebagai kelompok aktor dan organisasi (perusahaan, universitas, dan pusat penelitian) yang terlibat dalam inovasi dan pembelajaran regional (Doloreux dan Bitard 2005), dan dicirikan oleh adanya sumber daya teritorial, tidak berwujud, kelembagaan dan relasional (Guerreiro (2005)). Terlepas dari minat besar pada

faktor regional, konsep RSI tetap ambigu (Doloreux dan Bitard 2005). Terkadang RSI dipahami sebagai NSI berskala kecil. Ini gagasan gagal untuk mengenali kekhususan regional aktor, lembaga, hubungan dan atribut. RSI sering dikritik karena terkadang fokusnya diremehkan jaringan eksternal dan institusi.

9.5 Pemecahan Permasalahan di Bidang Perencanaan Wilayah

Perhatikan dua fakta berikut:

1) Perencanaan wilayah tidak menjawab penyebab masalah yang telah diidentifikasi dengan benar dalam tajuk rencana, yaitu pertumbuhan penduduk. Hukum alam yang mendasar adalah, "Anda tidak dapat memecahkan masalah jika Anda mengabaikan penyebabnya." Jadi tidak peduli berapa banyak perencanaan yang dilakukan, tidak ada masalah yang akan terselesaikan jika pertumbuhan penduduk dibiarkan terus berlanjut di daerah tersebut. Aspirin bukanlah solusi untuk kanker, meski bisa membuat pasien lebih nyaman.

2) Pada tingkat yang lebih mendasar, kita harus menyadari bahwa tujuan utama dari perencanaan adalah untuk "memecahkan" masalah yang muncul dari crowding. Dengan demikian perencanaan dirancang untuk membantu mengakomodasi populasi yang lebih besar. Untuk melihat cara kerjanya, mari kita bayangkan bahwa masalahnya adalah kemacetan lalu lintas dan bahwa perencanaan regional membutuhkan, dan pada akhirnya menghasilkan, perluasan besar-besaran sistem jalan raya regional. Hal ini akan mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan penduduk lebih lanjut sehingga segera penambahan penduduk baru akan memenuhi dan menyumbat sistem jalan raya regional yang diperluas. (Bartlett, 1969, 1973.) Para pembayar pajak akan membayar untuk perencanaan, mereka akan membayar untuk jalan raya yang diperluas, dan sebagai imbalannya mereka akan mengalami kemacetan lalu lintas dalam skala regional yang diperbesar.

Dengan demikian, pertumbuhan penduduk memaksa kita untuk pergi ke perencanaan daerah bukan perencanaan lokal. Ini

memperbesar masalah sehingga kemacetan lokal berubah menjadi kemacetan regional, dan tidak ada yang terselesaikan: justru masalah kemacetan menjadi lebih parah.

Umpan baliknya positif. Upaya yang dilakukan dengan menggunakan perencanaan wilayah untuk “menyelesaikan” permasalahan lokal menyebabkan permasalahan lokal tersebut berkembang menjadi permasalahan regional.

Begini cara kerjanya:

Hal-hal yang menghambat pertumbuhan penduduk dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan.

Oleh karena itu, memecahkan masalah ini membantu dan memfasilitasi pertumbuhan populasi.

Orang perlu mengingat Hukum Eric Sevareid: Penyebab utama masalah adalah solusi. (Sevareid, 1970.)

Memang, seseorang dapat mengenali Hukum Dasar Perencanaan:

Perencanaan dalam masyarakat atau wilayah dapat memberikan solusi jangka panjang untuk masalah masyarakat atau wilayah hanya jika perencanaan tersebut menyebabkan, atau disertai dengan, penghentian total pertumbuhan penduduk di masyarakat atau wilayah tersebut.

9.6 Perencanaan Daerah Mencairkan dan Akhirnya Mengalahkan Demokrasi

Apa pengaruh perencanaan regional terhadap demokrasi? Pada tahun 1950 populasi Kota Boulder adalah 20.000. Jadi ketika berbicara dengan seorang anggota Dewan Kota pada tahun 1950, seorang warga Boulder adalah satu suara dari 20.000. Pada tahun 1998 populasi Boulder kira-kira lima kali lebih besar, jadi satu warga Boulder pada tahun 1997 adalah satu suara dalam 100.000. Pertumbuhan penduduk di Boulder sejak 1950 telah mencairkan demokrasi di Boulder hingga lima kali lipat!

Ini cukup buruk. Tapi lihat apa yang akan terjadi jika kita beralih ke perencanaan daerah saat kita mencari "solusi" demokratis untuk masalah tersebut. Jika ada 100.000 orang di

"daerah", maka, seperti yang dilihat oleh masing-masing warga negara, perencanaan daerah akan melemahkan demokrasi lebih dari tiga kali lipat. Jika "kawasan" mencakup kabupaten Denver metropolitan dengan mungkin 2,5 juta penduduk, satu warga Boulder akan dikurangi menjadi hanya satu suara dalam 2,5 juta! Kemudian, yang lebih buruk lagi, jika perencanaan wilayah "berhasil", itu akan mempercepat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut menjadi 3, 4, atau bahkan 5 juta, dengan konsekuensi penghancuran demokrasi lebih lanjut.

Bagi individu, demokrasi berbanding terbalik dengan jumlah populasi yang berpartisipasi.

Dalam sebuah wawancara dengan Bill Moyers, Isaac Asimov membuat pengamatan yang sangat mendalam:

Demokrasi tidak dapat bertahan dari kelebihan populasi. Martabat manusia tidak dapat bertahan dari kelebihan populasi. Kenyamanan dan kesopanan tidak dapat bertahan dari kelebihan populasi. Saat Anda memasukkan lebih banyak orang ke dunia, nilai kehidupan tidak hanya menurun, tetapi juga menghilang. Tidak masalah jika seseorang meninggal. Semakin banyak orang, semakin sedikit satu orang yang berarti. (Moyers, 1980.)

Imam Besar Perencanaan Wilayah Terpencil

Ketika perencanaan daerah dilakukan, para perencana daerah hampir tidak mungkin jauh dari rata-rata warga. Para perencana dapat menjadi imamat yang memiliki akses ke "kebenaran" seperti yang ditentukan oleh model komputer yang lentur dan oleh penasihat tepercaya para perencana, yang umumnya adalah promotor yang kaya dan berpengaruh. Di ruang kantor mereka yang terisolasi secara terpusat, para perencana regional begitu terpencil, dan proses demokrasi begitu encer, sehingga para perencana regional sebagian besar dapat mengabaikan warga negara dan kelompok warga negara. Dengan semua "keahlian" mereka, mereka dapat mengesampingkan keberatan warga dan merekomendasikan penghancuran lingkungan dengan membangun mega-mal, pusat industri, jalur sabuk, dan tempat wisata raksasa di mana pun model komputer regional mereka atau milik mereka.

penasehat berpengaruh menunjukkan akan menjadi "yang terbaik untuk wilayah tersebut." Para perencana hampir tidak pernah mempersoalkan perlunya fasilitas-fasilitas besar yang mengganggu ini: jika promotor ingin menempatkannya, perencanaan tampaknya semata-mata terdiri dari menemukan lokasi yang "terbaik untuk wilayah tersebut", terlepas dari keinginan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, "terbaik" berarti "paling tidak buruk".

Untuk memfasilitasi perkembangan ini, para perencana regional selalu dapat diandalkan untuk menghasilkan pernyataan dampak lingkungan yang menegaskan dengan otoritas besar bahwa dampak dari setiap pembangunan baru yang diusulkan terhadap kualitas lalu lintas, udara dan air, dan kualitas hidup, akan "minimal".

Sulit bagi warga negara biasa untuk melawan argumen yang dihasilkan oleh pendeta tinggi yang jauh dan mengintimidasi yang berani karena gelar mereka yang tinggi dan menguasai model komputer mereka yang patuh. Melalui penggunaan perencanaan daerah, demokrasi digantikan oleh oligarki.

Pertumbuhan Cerdas

Saat ini kita banyak mendengar tentang "pertumbuhan cerdas", seolah-olah "pertumbuhan cerdas" adalah kunci ajaib untuk mencapai keberlanjutan. Bahan utama dalam "pertumbuhan cerdas" adalah perencanaan wilayah; perencanaan wilayah mendorong lebih banyak pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan penduduk tidak berkelanjutan. (Bartlett, 1994, 1998.) Dengan demikian jelaslah bahwa "pertumbuhan cerdas" tidak dapat menyelesaikan masalah.

"Pertumbuhan cerdas" menghancurkan lingkungan.

"Pertumbuhan bodoh" menghancurkan lingkungan.

Satu-satunya perbedaan adalah bahwa "pertumbuhan cerdas" merusak lingkungan dengan selera yang baik.

Itu sendiri adalah tujuan yang berharga, tetapi masih ada yang merusak lingkungan. Ini seperti memesan bagian di Titanic. Jika Anda bodoh, Anda pergi ke kemudi. Jika Anda "pintar", Anda pergi ke kelas satu. Tapi bagaimanapun juga, hasilnya sama saja.

Dilaporkan bahwa Ted Turner baru-baru ini berkata, "Saya berpendapat tidak ada yang namanya pertumbuhan cerdas. Kita adalah satu-satunya spesies yang pertumbuhannya tidak terkendali." (Turner, 1998.)

Pertumbuhan yang cerdas adalah cara untuk membuat ketidakberlanjutan menjadi senyaman mungkin.

9.7 Undergraduate Program in Urban and Regional

Kegiatan perencanaan kota dan wilayah terus berkembang. Mereka semakin kompleks, mencakup aspek spasial atau fisik dari lingkungan binaan yang berkelanjutan dan banyak aspek non-fisik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Perencana kota dan wilayah dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bidang dan memiliki keterampilan profesional dalam alokasi dan distribusi spasial penggunaan lahan dan fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat, merancang dan mengelola skema zonasi lahan, menyelesaikan konflik antara tuntutan yang bersaing untuk pengembangan lahan, memastikan bahwa perumahan dan fasilitas publik ditempatkan dengan baik dan nyaman, dan membantu memutuskan pembangunan mana yang harus dilanjutkan dan bangunan atau ruang mana yang harus dipertahankan.

Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB didirikan pada bulan September 1959, dengan bantuan awal dari para ahli dari Harvard University di bawah naungan United Nations Technical Assistance Bureau (UNTAB). Program Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB dirancang untuk menjadi pusat kritis bagi teori dan praktik perencanaan dan kebijakan kota dan wilayah di Indonesia. Program ini menyediakan:

- Pendidikan perencanaan yang berkualitas tinggi,
- Penelitian perencanaan ilmiah, dan

- Pelayanan perencanaan yang terbaik bagi masyarakat.

Filosofi Program

Perencanaan Wilayah dan Kota adalah seni dan ilmu mengatur pembangunan penggunaan lahan untuk keuntungan sosial, ekonomi dan politik penduduk. Ini berkaitan dengan perumusan, implementasi desain dan pemantauan kebijakan pembangunan melalui perencanaan tata ruang di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan Wilayah dan Kota ditawarkan sebagai disiplin ilmu berbasis luas yang, selain dari mata kuliah inti utamanya, membutuhkan banyak masukan dari bidang lain, terutama ilmu sosial. Lulusan dari program ini dapat dipekerjakan di Badan Perencanaan publik dan swasta, Lembaga Keuangan, Organisasi Internasional dan Unit Lingkungan dari organisasi manapun. Mereka juga bisa wiraswasta.



Tapi Al benar dalam banyak hal. Tentu saja, pertumbuhan populasi membebani planet kita yang terbatas ini. Kita tidak bisa terlalu terhibur dengan kenyataan bahwa tingkat kesuburan telah turun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan tingkat kematian di sebagian besar negara yang lebih maju. Agregat global masih meningkat kecuali astronot sesekali yang melakukan migrasi keluar dalam skala yang agak besar. Hanya ketika Al menyimpulkan bahwa perencanaan daerah adalah anti-demokrasi dan agen aktif dalam mendorong pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan kapasitas daerah untuk mengakomodasi pertumbuhan, ia tampaknya menyimpang dari jalan masuk akal yang merupakan jalur wawasan normalnya.

Pendapatnya tentang hal ini berasal dari karakterisasi perencanaan regional yang sangat keliru itu sendiri. Jika penokohnya akurat, maka kritiknya mungkin masuk akal, tetapi penokohnya jauh dari dasar sehingga kesimpulannya adalah bebek yang duduk. Saya bermaksud untuk mengambil tujuan mematikan pada anggapan dasarnya.

Realitas mendasarnya adalah bahwa Al, I, dan semua orang memiliki kepentingan yang melampaui kepentingan lokal, karena mereka berlandung di dalam batas kota. "Wilayah" dalam "perencanaan wilayah" menunjukkan lokalitas dan ruang di luarnya. Daerah perkotaan yang dibangun menderita oleh fragmentasi politik yang ekstrim. Akibatnya, banyak hal menghasilkan konsekuensi—"eksternalitas"—yang melampaui batas-batas politik. Eksternalitas ini, dalam bahasa ekonomi, adalah "efek samping yang tidak dihargai". Artinya, itu adalah konsekuensi, baik dan buruk, yang muncul dari tindakan di satu tempat yang memengaruhi aktor dan kepentingan di tempat lain. Karena mereka tidak diberi harga, ada sedikit apresiasi untuk konten atau besarnya dan tidak ada tolok ukur yang digerakkan oleh pasar untuk mengukur kompensasi perbaikan atau memprovokasi mitigasi sebelum tindakan itu sendiri. Limpahan yang melintasi batas politik sangat berbahaya karena mereka yang dirugikan oleh tindakan orang atau pemerintah di yurisdiksi lain tidak memiliki jalan politik. Dan jika kotamadya yang melanggar berkenan untuk tidak berkonsultasi dengan tetangganya sebelum melakukan pelanggaran, resep untuk tindakan politik jelas tidak demokratis.

Lebih lanjut menegaskan bahwa perencanaan wilayah membangun atau memungkinkan infrastruktur "besar", baik publik maupun swasta, seperti bandara, rel kereta api, mal komersial regional, jalan raya multi-jalur dan sebagainya. Tetapi entitas-entitas ini dan lainnya seperti pasokan air dan pengelolaan limbah secara intrinsik bersifat regional dan merupakan tanggung jawab pengambilan keputusan regional. Sudah menjadi sifat mereka untuk menjadi "tunggal" dan "besar", dan dengan demikian mencakup wilayah. Tidak, Profesor Bartlett mungkin berpendapat bahwa kita dapat melakukannya tanpa

hal-hal besar ini, dan bahwa banyak hal yang lebih kecil mungkin dapat melakukan pekerjaan dari hal-hal besar yang lebih sedikit, tetapi saya menyarankan kepada Anda bahwa "lebih kecil" sering disertai dengan ketidakefisienan yang menghasilkan harga satuan yang lebih tinggi, dan bahwa sebagian besar warga tampaknya menyukai efisiensi yang lebih tinggi, harga yang lebih rendah, dan kemudahan pergerakan yang lebih besar yang berasal dari adanya berbagai jenis infrastruktur yang melayani wilayah.

Sangat sedikit dari kita hari ini menjalani hidup kita dalam batas-batas kota yang sempit. Ini adalah infrastruktur pelayanan regional yang memungkinkan Colorado = s Front Range, misalnya, untuk menyadap pasokan air pada jarak yang lebih jauh, memindahkan barang dan komuter dengan setidaknya efisiensi marjinal antara kota-kota Front Range, dan mencapai efisiensi skala yang telah menghasilkan penghargaan Denver. - menang teater daerah. Bisakah kita menyalahkan perencanaan daerah untuk mengatasi masalah daerah? Hampir tidak! Jika masalah regional harus dihadapi dan infrastruktur yang melayani wilayah akan dibangun, maka tugas perencanaan regional adalah tugas perencanaan antar-lokal untuk mengirimkan barang-barang tersebut.

Di mana Profesor Bartlett benar dalam pengamatannya bahwa perencanaan regional seringkali tampak kurang sarana partisipatif yang memadai. Dan ini memang memprihatinkan. Satu solusi, tentu saja, bagi para tetangga untuk merundingkan solusi dan rencana regional. Di New Jersey, setiap kota tetangga menandatangani rencana tetangganya. Ini disebut "penerimaan silang" dan itu ide yang bagus. Ada konstruksi etis yang tidak dapat disangkal oleh orang berakal sehat. Cara lainnya adalah dengan menciptakan entitas pemerintah daerah atau penyedia layanan tunggal atau multiguna dan membebaskan mereka dengan tugas untuk melegitimasi kegiatan mereka melalui partisipasi politik regional. Ini ide yang bagus juga. Dan hanya karena kita lamban mengembangkan kendaraan partisipatif semacam itu tidak berarti mereka berada di luar jangkauan kita. Intinya adalah bahwa solusi regional seringkali dibutuhkan, jadi

kita perlu menciptakan sarana untuk membentuknya sambil melibatkan publik yang relevan.

Pada akhirnya, kita perlu melihat perencanaan daerah sebagai pelengkap yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Melalui partisipasi regional, lokalitas mendapatkan pengaruh ekstra-teritorial atas tindakan tetangga yang menghasilkan konsekuensi, baik dan buruk, di wilayah lokal. Ini adalah tawar-menawar yang tampaknya paling ingin dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter vCalthorpe , Sumber gambar:
<http://www.calthorpe.com/peter-calthorpe>
- Vohra R. (2008) Planning. In: Palgrave Macmillan (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London.
- Mandel, Ernest (September–October 1986). "In defense of socialist planning". *New Left Review*. I (159): 5–37. See also the PDF version.
- Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. (2003). *Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century*. Boston: Houghton Mifflin. pp. 23–24. ISBN 978-0-618-26181-9.
- Alec Nove (1987). "Planned economy". *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*. vol. 3. pp. 879–880.
- Nielsen K. (2008) Indicative Planning. In: Palgrave Macmillan (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London.
- Ellman, Michael (1989). *Socialist Planning*. Cambridge University Press. p. 25. ISBN 978-0-521-35866-8.
- Bockman, Johanna (2011). *Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism*. Stanford University Press. p. 35. ISBN 978-0-8047-7566-3.
- Schweickart, David; Lawler, James; Ticktin, Hillel; Ollman, Bertell (1998). "Definitions of Market and Socialism". *Market Socialism: The Debate Among Socialists*. New York: Routledge. pp. 58–59. ISBN 978-0-415-91967-8.
- "Socialism: Utopian and Scientific". *Marxists.org*.
- Wilhelm, John Howard (1985). "The Soviet Union Has an Administered, Not a Planned, Economy". *Soviet Studies*. 37 (1): 118–130. doi:10.1080/09668138508411571.
- Dowlah, Abu F. (1992). "Theoretical Expositions of Centralized versus Decentralized Strands of Socialist Economic Systems". *International Journal of Social Economics*. 19 (7/8/9): 210–258. doi:10.1108/EUM00000000000497.

- Montias, J. M. (1959). "Planning with Material Balances in Soviet-Type Economies". *American Economic Review*. 49 (5): 963–985. JSTOR 1813077.
- J. Bradford DeLong (1997). "The Corporation as a Command Economy" (PDF). UC Berkeley and National Bureau of Economic Research. Retrieved 27 May 2013.
- Galbraith, John K. (2007) [1967]. *The New Industrial State*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 9780691131412. For the Abridge version, see "Part I: The History and Nature of the New Industrial State" (1972).
- Y. Bai et al. New ecological redline policy (ERP) to secure ecosystem services in China
Land Use Policy (2016)
- R. Chakir et al. Predicting land use allocation in France: a spatial panel data analysis
Ecol. Econ. (2013)
- M. Chen et al. Evolution and assessment on China's urbanization 1960–2010: under-urbanization or over-urbanization?
Habitat Int. (2013)
- Y. Chen et al. Built-up land efficiency in urban China: insights from the general land use plan (2006–2020) *Habitat Int.* (2016)
- J. Chen Rapid urbanization in China: a real challenge to soil protection and food security *Catena* (2007)
- R. Cong et al. Experimental comparison of impact of auction format on carbon allowance market *Renew. Sust. Energy Rev.* (2012)

BIODATA PENULIS



Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.

Dosen Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penulis sebagai Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik, Untag Samarinda. Ia merupakan lulusan pendidikan Sarjana S1 pada Jurusan Teknik Planologi, ITN Malang kemudian melanjutkan S2 pada Magister Teknik Sipil Minat Kekhususan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2020, penulis masuk dalam struktural bidang penjaminan dan audit mutu, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Audit Mutu LPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda hingga sekarang. Aktif melakukan penelitian pada bidang perencanaan wilayah dan kota, yang salah satunya berhasil didanai oleh Ristekdikti pada tahun 2022. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, ia pun pernah terlibat aktif sebagai pelatihan dan narasumber terkait bidang sistem penjaminan mutu internal. Adapun karya buku yang telah ditulisnya sejak tahun 2020, diantaranya berjudul Ilmu Kealamiah Dasar, Statistik Ekonomi, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2022-2026, Buku Saku Pedoman Auditor SPMPT-AMI, Monograf Efektivitas Fungsi Taman Kota dan buku referensi lainnya.

BIODATA PENULIS



Ar. Fendy Faizal Gobel, ST., M.Sc, IAI.
Dosen Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tanggal 17 Agustus 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Arsitektur Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2009 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Arsitektur dengan konsentrasi Desain Kawasan Binaan di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan berhasil memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada tahun 2012. Penulis bekerja di kantor konsultan PT. Jakarta Konsultindo dari tahun 2012 sampai 2014. Pada tahun 2015 menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa (YP-DLP) di Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo. Mata kuliah yang diampu diantaranya perancangan arsitektur, struktur & konstruksi bangunan dan tata bangunan kawasan. Memperoleh hibah penelitian dosen pemula, Kemdikbudristek tahun 2021 dan 2022. Sejak tahun 2021 menjadi Tim Profesi Ahli (TPA) di Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara. Penulis memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI) sehingga sering terlibat menjadi Tenaga Ahli dalam beberapa proyek yang berskala lokal dan nasional. Penulis aktif dalam kepengurusan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Gorontalo dan saat ini menjabat sebagai ketua bidang Penghargaan, Sayembara dan Pengabdian Profesi.

BIODATA PENULIS



Yohanes P. Erick A
Staf Dosen Arsitektur

Penulis merupakan seorang Arsitek yang lahir di Semarang tanggal 25 Juni 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo sejak tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan S2 di Magister Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terkait dengan perencanaan wilayah, penulis juga aktif mengajar mata kuliah terkait perencanaan wilayah, menulis buku, dan melakukan berbagai penelitian baik yang didanai oleh internal perguruan tinggi, instansi swasta, NGO maupun dari Kemenristek DIKTI, selain juga aktif dalam kegiatan proyek yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota.
Email penulis: erickyohanesp@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Fahmy Rinanda Saputri, S.T., M.Eng.

Dosen Program Studi Teknik Fisika
Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia
Nusantara

Penulis lahir pada bulan Agustus 1993 di Cilacap. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Fisika Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studi pada Program Magister Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang instrumentasi, fisika bangunan, dan energi baru terbarukan.

BIODATA PENULIS



Indriani Umar, ST., M.URP

Dosen Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Pohuwato

Penulis lahir di Gorontalo, tanggal 8 Desember 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Pohuwato. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Ichsan Gorontalo dan S2 pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Anisa Mardatillah, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Bahasa Inggris Universitas Press

Penulis lahir di Padang tanggal 13 Mei 2020. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Inggris, Universitas Press. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa Inggris dan melanjutkan S2 pada Jurusan Bahasa Inggris. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Akhmad Andi Saputra, ST., MT.
Dosen Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Gresik

Penulis lahir di Gresik, tanggal 04 Februari 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang pada Tahun 2009 dan telah menyelesaikan jenjang Magister Teknik (S2) pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015.

Penulis sejak Tahun 2017 sampai sekarang menjadi Tenaga Pengajar pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Gresik, Jawa Timur. Selain sebagai tenaga pengajar, penulis juga bekerja sebagai konsultan tata ruang, serta menjadi asesor kompetensi di Kabupaten Gresik.

BIODATA PENULIS



Ir. Firdaus, ST., M.Si., M.T, IPM.

Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Samarinda, pada tanggal 27 November 1987. Menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar Tahun 2010, program magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin Tahun 2016, program profesi insinyur di Universitas Muslim Indonesia pada Tahun 2019 dan kembali menyelesaikan pendidikan magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan di Universitas Fajar Makassar Tahun 2022. Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan lingkungan dan tata ruang antara lain Diklat AMDAL A, Diklat AMDAL B, Diklat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pelatihan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Pelatihan Rencana Detail Tata Ruang. Penulis memiliki sertifikat keahlian kualifikasi utama bidang perencanaan wilayah dan kota, insinyur professional madya dan lisensi anggota tim penyusun AMDAL. Ia saat ini bekerja sebagai dosen pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota Universitas Muhammadiyah Makassar dengan kemampuan di bidang pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan dan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, selain sebagai dosen ia juga bekerja sebagai seorang konsultan profesional pada proyek-proyek pemerintah dan swasta di bidang penataan ruang, pengembangan kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup.